

**PENERAPAN VALUE ADDED STATEMENT SEBAGAI
SALAH SATU ALTERNATIF PENGUKURAN
KINERJA KEUANGAN PT (Persero)
PELABUHAN INDONESIA IV
MAKASSAR**



**OLEH:
MUTIA JAYANTI
A311 04 773**

PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl. Terbit	
Asal Dokumen	Ekonomi
Banyaknya	1 eksemplar
Harga	10000
No. Inventaris	76
No. Klasifikasi	SKR. EOP JY-P.

**PROGRAM REGULER SORE FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

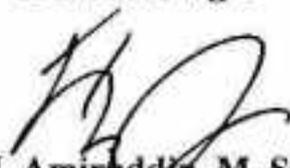
**PENERAPAN *VALUE ADDED STATEMENT* SEBAGAI
SALAH SATU ALTERNATIF PENGUKURAN
KINERJA KEUANGAN PT (Persero)
PELABUHAN INDONESIA IV
MAKASSAR**

OLEH:
MUTIA JAYANTI
A311 04 773

*Skripsi sarjana lengkap untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Reguler Sore
Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.*

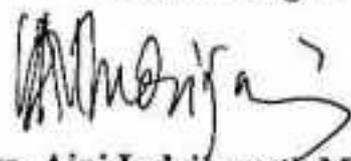
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. H. Amiruddin, M. Si., Ak
NIP. 131 869 787

Pembimbing II



Dra. Aini Indriawati, M. Si., Ak
NIP. 132 126 066

**PENERAPAN VALUE ADDED STATEMENT SEBAGAI
SALAH SATU ALTERNATIF PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN PT. (PERSERO) PELABUHAN
INDONESIA IV MAKASSAR**

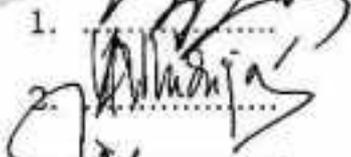
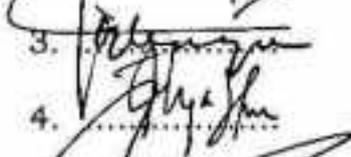
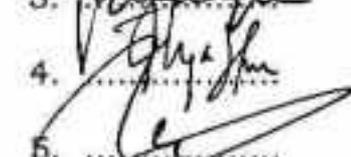
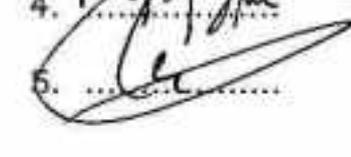
Oleh:

MUTIA JAYANTI

NIM. A31104773

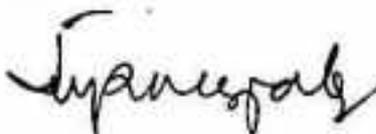
Telah Diuji dan Lulus Tanggal 19 APRIL 2008

TIM PENGUJI

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Drs. H. Amiruddin, M.Si.Ak.	Ketua	1. 
2. Dra. Aini Indrijawati, M.Si.Ak.	Sekretaris	2. 
3. Drs. Yulianus Sampe, M.Si.Ak.	Anggota	3. 
4. Drs. Syamsuddin, M.Si.Ak.	Anggota	4. 
5. Drs. Agus Bandang, M.Si.,Ak	Anggota	5. 

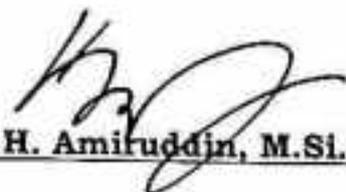
Disetujui oleh:

Program Reguler Sore
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua,



Dr. Muh. Idrus Taba, SE.,M.Si.

Tim Penguji
Jurusan AKUNTANSI
Fakultas Ekonomi UNHAS
Ketua,



Drs. H. Amiruddin, M.Si.Ak.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Sebagaimana halnya kehidupan, skripsi ini juga terbingkai pula oleh berbagai kesulitan dan kemudahan. Namun, berkat bantuan dari semua pihak sehingga penulis dapat melewati itu semua.

Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Drs. H. Amiruddin, M. Si., Ak dan Ibu Dra. Aini Indrijawati, M. Si., Ak masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II atas segala kebaikan dan keramahannya dalam membimbing dan mengarahkan serta memotivasi penulis. Semoga Allah SWT membalas segala jasa-jasanya. Amin.

Selama menuntut ilmu serta selesainya skripsi ini, penulis juga banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tercinta Ayahanda H. Mudjiono dan Ibunda Hj. Hasnia serta kakak dan adik saya, Mia dan Mardian yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan serta iringan do'anya kepada penulis.
2. Bapak Ketua Program Reguler Sore, para dosen serta staf akademik Fakultas Ekonomi Program Reguler Sore Universitas Hasanuddin.
3. Pimpinan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar beserta karyawan dan karyawatnya, terutama kepada Pak Ronald selaku SM Akuntansi Keuangan, Pak Sadri selaku ASM Akuntansi Keuangan dan Ibu Fadillah serta Ibu Basma atas waktu dan keramahan pelayanan sampai data-data penulis butuhkan tersedia.
4. Drs. Syamsuddin, M. Si. Ak., Drs. Agus Bandang, M. Si. Ak. dan Drs. Yulianus Sampe, M. Si. Ak. selaku penguji atas perhatian dan nasehat-nasihatnya.
5. Segenap sahabat dan teman-teman seperjuangan di bangku kuliah khususnya: Uni, Fido Dido, Sinbe, Ongky dan Ikrar serta segenap teman-teman angkatan 2004 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta do'anya.

Hanya do'a sebagai wujud nyata penulis lakukan sebagai balasan atas segala bantuan yang telah diberikan dengan meyakini bahwa balasan Allah SWT lebih baik lagi. Insya Allah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis menerima segala bentuk kritikan demi pengembangan dan keutuhan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi diri penulis dan kepada seluruh pihak yang memerlukannya. Amin.

Makassar, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II METODE PENELITIAN	
2.1 Lokasi Penelitian	10
2.2 Metode Pengumpulan Data	10
2.3 Jenis dan Sumber Data	10
2.3.1 Jenis Data	10
2.3.2 Sumber Data	11
2.4 Metode Analisis	11
2.5 Sistematika Pembahasan	14

BAB III LANDASAN TEORI

3.1	Pengertian Akuntansi	16
3.2	Laporan Keuangan	18
3.3	Definisi dan Manfaat Pengukuran Kinerja	21
3.4	Konsep Ekuitas dan Konsep Laba	22
3.4.1	Konsep Ekuitas	22
3.4.2	Konsep Laba	31
3.5	<i>Value Added Statement</i> (Laporan Nilai Tambah)	35
3.5.1	Definisi <i>Value Added</i>	35
3.5.2	Sejarah dan Perkembangan <i>Value Added Statement</i>	36
3.5.3	Perhitungan Nilai Tambah	39
3.5.4	<i>Value Added Statement</i> sebagai alat ukur kinerja Keuangan	43
3.5.5	Kelebihan dan Kelemahan <i>Value Added Statement</i>	45
3.5.5.1	Kelebihan Laporan Nilai Tambah	45
3.5.5.2	Kelemahan Laporan Nilai Tambah	46
3.5.6	Penerapan Laporan Nilai Tambah Pada BUMN	49

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1	Sejarah Singkat Perusahaan	52
4.2	Struktur Organisasi	55
4.3	Visi dan Misi Perusahaan	60

4.4	Komitmen Perusahaan	60
4.5	Sasaran Perusahaan	61
BAB V PENERAPAN <i>VALUE ADDED STATEMENT</i> SEBAGAI SALAH		
SATU ALTERNATIF PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PT		
(Persero) PELABUHAN INDONESIA IV MAKASSAR		
5.1	Penerapan Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar	62
5.2	Penyusunan Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar	63
5.2.1	Perhitungan Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar	72
5.2.2	Penjelasan Atas Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar	74
5.2.3	Distribusi Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar	80
5.2.4	Analisis Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar	84
5.2.5	Ratio-ratio Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar	85
5.2.6	Pengukuran Kinerja Keuangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar	91

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan	95
6.2 Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
5.2	Laporan Laba Rugi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar	66
5.3	Daftar Rincian Beban Per Jenis	67
5.4	Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar tahun 2006	72
5.5	Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar tahun 2005	73
5.6	Akun Pendapatan	74
5.7	Akun Reduksi Pendapatan	75
5.8	Daftar Rincian Beban-beban	76
5.9	Akun Distribusi Nilai Tambah Kepada Pegawai	81
5.10	Akun Distribusi Nilai Tambah Kepada Lessor	82
5.11	Akun Distribusi Nilai Tambah Kepada Pemerintah	83
5.12	Akun Distribusi Nilai Tambah Kepada Masyarakat	83
5.13	Ratio Distribusi Nilai Tambah Kepada <i>Stakeholders</i>	88
5.14	Ratio Distribusi Nilai Tambah	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Neraca Komparatif PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar Per 31 Desember 2006 dan 2005
- 2 Laporan Laba Rugi Per Pusat Pelayanan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar Per 31 Desember 2006 dan 2005
- 3 Laporan Laba Rugi Per Jenis Biaya PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar Per 31 Desember 2006 dan 2005
- 4 Laporan Arus Kas PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2006 dan 2005
- 5 Laporan Perubahan Ekuitas PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2006
- 6 Daftar Rincian Pendapatan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar Per 31 Desember 2006 dan 2005
- 7 Daftar Rincian Beban Per Pusat Pelayanan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar Per 31 Desember 2006 dan 2005
- 8 Daftar Rincian Beban Per Jenis PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar Per 31 Desember 2006 dan 2005
- 9 Realisasi Laba Rugi Cabang, UPK dan Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar Tahun 2006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan media pengungkapan informasi sumber daya keuangan yang diperoleh dalam periode tertentu. Tujuan utama laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Standar Akuntansi Keuangan, 2004, par.12).

Laporan keuangan menurut SAK (dalam Harahap, 2005: 201), yaitu: (1) daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu, (2) perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu, (3) laporan arus kas memuat sumber dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode.

Laporan keuangan konvensional merupakan sumber data utama untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Melalui laporan keuangan konvensional, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas dapat diukur dan diungkapkan mengenai:

- Likuiditas;
- Profitabilitas;
- Efisiensi/ aktivitas, dan
- *Leverage*.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi perusahaan. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Di samping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Informasi kinerja dalam laporan laba rugi menjadi acuan bagi para *shareholder*, karena jumlahnya menunjukkan hasil investasi mereka selama satu periode tertentu. Selain itu, dari laporan laba rugi juga kinerja manajemen perusahaan dapat diukur. Semakin besar laba yang dihasilkan maka ROI yang dihasilkan semakin besar pula dan para *shareholder* semakin yakin dengan kinerja manajemen perusahaan tersebut dalam mengelola sumber kekayaan yang dipercayakannya.

Namun jika pengukuran kinerja keuangan berdasarkan pada laporan keuangan konvensional, masyarakat umumnya masih sulit dalam menentukan seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap para *stakeholder*-nya (pemegang saham, karyawan, pemerintah, pemasok & kreditor). Meskipun telah lama dan lazim

digunakan namun bentuk laporan keuangan tersebut tidak dapat segera memberikan informasi mengenai distribusi keuntungan terhadap kelompok-kelompok *stakeholder* yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam mengelola sumber daya perusahaan. Menurut Belkaoui (dalam Harahap, 2005: 448), laporan keuangan utama neraca, laba rugi, dan arus kas gagal memberikan informasi:

1. Total produktivitas dari perusahaan.
2. *Share* dari setiap *stakeholders* atau anggota tim yang ikut dalam proses manajemen yaitu, pemegang saham, kreditor, pegawai dan pemerintah.

Laporan keuangan konvensional berkaitan erat dengan teori atau konsep sudut pandang akuntansi yaitu kombinasi konsep kepemilikan (*proprietary concept*), dimana pemilik merupakan fokus utamanya dan konsep kesatuan usaha (*entity concept*) yang berfokus pada perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) masih merujuk pada teori entitas. Dalam teori entitas, laporan keuangan diposisikan sebagai tameng yang melindungi kepentingan pemilik modal. Laporan laba rugi didesain untuk melaporkan laba, sedang laporan neraca dibuat sedemikian rupa agar bisa mendukung kepentingan pemilik saham. Adanya kelemahan laporan keuangan konvensional telah mendorong timbulnya laporan nilai tambah (*value added statement/reporting*) yang merupakan alternatif pelaporan yang dapat mengisi kekosongan jenis informasi tersebut.

Pada bulan Juli 1976, *The Accounting Standards Steering Committee of The Institute of Chartered Accountants* (ASSC) di Inggris dan Wales mempublikasikan *The Corporate Report*. *The Corporate Report* merupakan hasil studi terhadap ruang

lingkup dan arah laporan keuangan yang dipublikasikan ditinjau dari kebutuhan dan kondisi ekonomi yang berkembang pesat serta dikaitkan dengan tanggung jawab setiap entitas ekonomi terhadap masyarakat (Climo, 1976: 55).

Sebagai hasil studinya, *The Corporate Report* mengusulkan perlunya laporan tambahan yang melengkapi laporan keuangan konvensional. Menurut Hendriksen (1992: 10), salah satu laporan yang diusulkan oleh *The Corporate Report* yang dapat menggambarkan pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah Laporan Nilai Tambah (*Value Added Statement*).

Laporan nilai tambah erat kaitannya dengan teori perusahaan (*enterprise theory*). *Enterprise theory* adalah salah satu teori merangkul *socio-economic philosophy* yang berbeda dengan teori entitas. Menurut Belkaoui (dalam Tuanakotta, 1985: 339), akuntansi sosioekonomi adalah menginternalisasi biaya sosial dan faedah sosial atau menginterpretasikan *social cost* dan *social benefit* sehingga hasil yang relevan dan lengkap dapat ditentukan. Hasil ini adalah *socio-economic profit* bagi perusahaan. Apabila aktivitas perusahaan menyebabkan habisnya sumber sosial maka hasilnya adalah biaya sosial namun apabila aktivitas perusahaan menyebabkan bertambahnya sumber sosial maka hasilnya adalah berupa faedah sosial. Tujuan akuntansi sosioekonomi adalah mengukur dan mengungkapkan *social cost* dan *social benefit* kepada masyarakat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan.

Pandangan mengenai perusahaan sebagai institusi dengan berbagai tanggung jawab sosial diperkenalkan oleh Suojanen. Teori *enterprise* melihat perusahaan sebagai *social institution* (lembaga sosial) dimana keputusan-keputusan

dibuat untuk mempengaruhi sejumlah pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, karyawan, kreditur, pelanggan, berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat umum. Teori ini lebih luas dari teori entitas, sebab teori *enterprise* melihat perusahaan mempunyai peranan dalam masyarakat sedangkan teori entitas melihat perusahaan sebagai *isolated body* yang mencari laba dan terpisah dari masyarakat. Suojanen berpendapat bahwa manajemen pada zaman sekarang tidak hanya dianggap sebagai perwakilan pemegang saham, tetapi sebagai penjaga perusahaan, bertanggung jawab atas eksistensi dan pertumbuhannya (Kam, 1990: 314).

Dalam kaitannya dengan proses pemerolehan laba perusahaan, teori ini menganggap bahwa laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu merupakan hasil dari kerja sama para partisipan, yang terdiri dari pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah dan masyarakat umum. Jadi yang juga menjadi kewajiban perusahaan adalah menunjukkan pertanggungjawaban akuntansi kepada para partisipan tersebut.

Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai institusi atau badan sosial dapat dinilai dari output yang dihasilkannya sebagai kontribusi terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Suojanen, laba yang diukur dengan pendekatan nilai tambah dapat menggambarkan dengan baik kontribusi tersebut. Suojanen mengusulkan suatu laporan tambahan untuk menunjukkan nilai tambah dan distribusinya kepada berbagai pihak yang berpartisipasi terhadap perusahaan.

Semakin besar skala ukuran perusahaan, semakin banyak pihak yang terlibat di dalamnya, yang berkepentingan terhadapnya dan yang terkena dampak

perilakunya. Ini berarti bahwa semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula perannya sosialnya (Bambang Sudibyo, 1990:31).

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan jasa yang berfungsi menyediakan, melaksanakan dan mengusahakan sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan dalam rangka menunjang kelancaran arus kapal, angkutan penumpang, barang, hewan, dan tanaman. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan serta untuk memupuk keuntungan bagi perusahaan dengan menyelenggarakan usaha jasa kepelabuhanan dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha tersebut. Peranan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV cukup besar bagi pemerintah dan masyarakat umum, yaitu di satu sisi sebagai satu kesatuan usaha yang diharapkan oleh pemerintah dapat memenuhi hajat hidup orang banyak, di sisi lain sebagai satu kesatuan usaha yang mengharuskannya untuk tetap mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Maka pantaslah jika PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV sebagai BUMN fokus pelaporan keuangannya bukan lagi terletak pada laba yang menjadi hak pemerintah, melainkan pada nilai tambah yang berhasil diciptakannya. Dimana laporan nilai tambah tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban sosialnya. Besarnya nilai tambah merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dalam kegiatan produktifnya atau dalam menjalankan misi khususnya.

Hendriksen (1992: 334), menyatakan bahwa konsep nilai tambah menjadi lebih berarti apabila diterapkan pada perusahaan besar yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan memiliki pengaruh sosial ekonomi yang luas di atas kepentingan pemilik atau pemegang saham.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dan memilih judul "**Penerapan *Value Added Statement* Sebagai Salah Satu Alternatif Pengukuran Kinerja Keuangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.**"

1.2 Rumusan Masalah

Value Added Statement/Reporting berusaha untuk mengisi kekurangan pada laporan keuangan yang selama ini digunakan oleh banyak perusahaan (neraca, laba rugi dan arus kas), yaitu menambah dengan memberikan informasi tentang kompensasi yang diberikan kepada pegawai yang dapat digunakan baik oleh pegawai maupun mereka yang berkepentingan lainnya terhadap informasi kegiatan SDM dan prestasi perusahaan.

Kalau laporan keuangan konvensional menekankan informasinya pada laba maka VAS/R menekankan pada upaya meng-*generate* kekayaan. Karena laba biasanya hanya menggambarkan hak atau kepentingan pemegang saham saja bukan seluruh tim yang ikut terlibat dalam kegiatan perusahaan (Harahap, 2005: 448).

Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah yang ingin diteliti, yaitu:
"Apakah dengan menerapkan *Value Added Statement* dapat dijadikan sebagai alat ukur kinerja keuangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV sebagai BUMN?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran terhadap penerapan *value added statement* pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV sebagai salah satu alternatif pengukuran kinerja keuangan .
2. Untuk mengetahui bagaimana penyajian *value added statement* dalam laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pendistribusian nilai tambah kepada para *stakeholder* yang berhubungan dengan *enterprise theory*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian, yaitu:

1. Bagi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, penggunaan laporan nilai tambah memiliki dua alasan utama, yang pertama sebagai cara yang mudah dan cepat untuk memposisikan keuntungan pada sudut pandang yang benar jika dihubungkan sebagai hasil usaha bersama antara modal, manajemen dan para pekerja dalam suatu perusahaan. Kedua, sebagai alat yang berguna untuk mengukur kinerja dan aktivitas keuangan sebuah perusahaan.

2. Bagi penulis, dapat memperluas pengetahuan serta wawasan dan cara berpikir mengenai pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan.
3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik dan masalah yang sama.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, yang beralamat di Jl. Soekarno No. 1 Makassar.

2.2 Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada tempat penelitian dengan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati aktivitas maupun kegiatan perusahaan. Data yang diperoleh yaitu laporan keuangan perusahaan.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten sehingga dapat diperoleh data yang memadai.
2. Tinjauan Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2.3 Jenis dan Sumber Data

2.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data kualitatif, yaitu terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif, berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, hasil wawancara dan diskusi dengan pihak manajemen serta karyawan.
- b. Data kuantitatif, yaitu terdiri dari data berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2005 dan tahun 2006, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan lain sebagainya.

2.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan serta wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan tersebut.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan berupa dokumen tertulis.

2.4 Metode Analisis

Langkah dalam menyusun laporan nilai tambah dari laporan laba rugi konvensional menurut Belkaoui (1995: 453), adalah:

Langkah 1:

Menghitung laba ditahan yang didapat dari hasil penjualan dikurangi biaya, pajak, dividen atau:

Penjualan			Rp xxx
Dikurangi: Pemakaian bahan	Rp xxx		
Gaji dan upah	xxx		
Jasa	xxx		
Biaya bunga	xxx		
Penyusutan	<u>xxx</u>		<u>xxx</u>
Laba sebelum pajak			Rp xxx
Pajak penghasilan			<u>xxx</u>
Laba setelah pajak			Rp xxx
Dikurangi: Dividen			<u>xxx</u>
Laba ditahan			<u><u>Rp xxx</u></u>

Langkah 2:

- o Laporan nilai tambah (format bruto) dapat disusun dari data di atas dengan format sebagai berikut:

Penjualan			Rp xxx
Dikurangi: Pembelian bahan dan jasa			<u>xxx</u>
Nilai tambah yang tersedia			<u>Rp xxx</u>
Distribusi nilai tambah:			
Penyusutan	Rp xxx		
Para pekerja	xxx		
Pemilik modal			
Bunga	Rp xxx		
Dividen	<u>xxx</u>	xxx	
Pemerintah		xxx	
Laba ditahan		<u>xxx</u>	
Nilai tambah			<u><u>Rp xxx</u></u>

- o Laporan nilai tambah (format neto), yaitu:

Penjualan			Rp xxx
Dikurangi: Pembelian bahan, jasa dan penyusutan			<u>xxx</u>
Nilai tambah yang tersedia			<u>Rp xxx</u>
Distribusi nilai tambah kepada:			
Para pekerja	Rp xxx		
Pemilik modal			
Bunga	Rp xxx		
Dividen	<u>xxx</u>	xxx	
Pemerintah		xxx	
Laba ditahan		<u>xxx</u>	
Nilai tambah			<u><u>Rp xxx</u></u>



Setelah diperoleh data sebagai hasil studi lapangan, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode aplikasi konsep dengan menggunakan *enterprise theory*. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan berdasarkan ratio-ratio nilai tambah yang dapat digunakan dalam laporan nilai tambah yang diterapkan dari *enterprise theory*, yaitu (Morley, 1979):

1. Ratio Distribusi Nilai Tambah (Pegawai, Lessor, Pemerintah, Masyarakat, Kreditor dan Reinvestasi)

$$= \frac{\text{Jumlah Distribusi Nilai Tambah Yang Diterima}}{\text{Jumlah Nilai Tambah}}$$

2. Ratio untuk mengukur kontribusi pekerja terhadap nilai tambah yang terjadi dan meramalkan kecenderungan dalam biaya tenaga kerja, serta digunakan dalam negosiasi gaji

$$= \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Upah}}$$

3. Ratio untuk menentukan derajat integrasi vertikal pada suatu kelompok perusahaan. Ratio ini juga dapat dijadikan sebagai indeks daya tahan perusahaan terhadap perubahan pasokan bahan dan jasa

$$= \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Penjualan}}$$

4. Ratio Produktivitas Modal

$$= \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Modal}}$$

5. Ratio Produktivitas Aktiva

$$= \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Aktiva}}$$

2.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan maka penulis membagi dalam beberapa bab yang sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis dan sistematika pembahasan.

BAB III : LANDASAN TEORI

Teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan akan dijelaskan dalam bab ini.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, bidang usaha dan jenis produk, struktur organisasi, visi dan misi, komitmen dan sasaran perusahaan.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil analisis dan pembahasan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan dan mengaplikasikan dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari hasil analisis serta saran yang dianggap perlu sebagai hasil penelitian yang dilakukan sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pihak lainnya.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pengertian Akuntansi

American Accounting Assosiation (dalam Soemarso, 2004: 3)

mendefinisikan akuntansi sebagai:

"..... proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut".

Definisi tersebut mengandung dua pengertian, yakni:

1. Kegiatan Akuntansi

Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

2. Kegunaan Akuntansi

Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Paul Grady (dalam Suwardjono, 1992: 189), memberikan definisi akuntansi sebagai berikut:

"Accounting is body of knowledge and function concerned with systematic organizing, authenticating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting and supplying of dependable and significant information covering transactions and even which are, in part least, of financial character, required for management and operation of entity and for report that have to be submitted there on to meet fiductary and other responsibility".

Definisi tersebut menjelaskan bahwa akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang diperoleh dari hasil pemikiran mendalam para ahli (akuntan) agar dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. Definisi ini juga mengisyaratkan adanya proses kepemilikan terhadap informasi tersebut. Jadi, akuntansi bukan semata-mata merupakan pengetahuan yang bersifat mekanis atau keterampilan saja, akan tetapi juga melibatkan pemikiran dan penalaran.

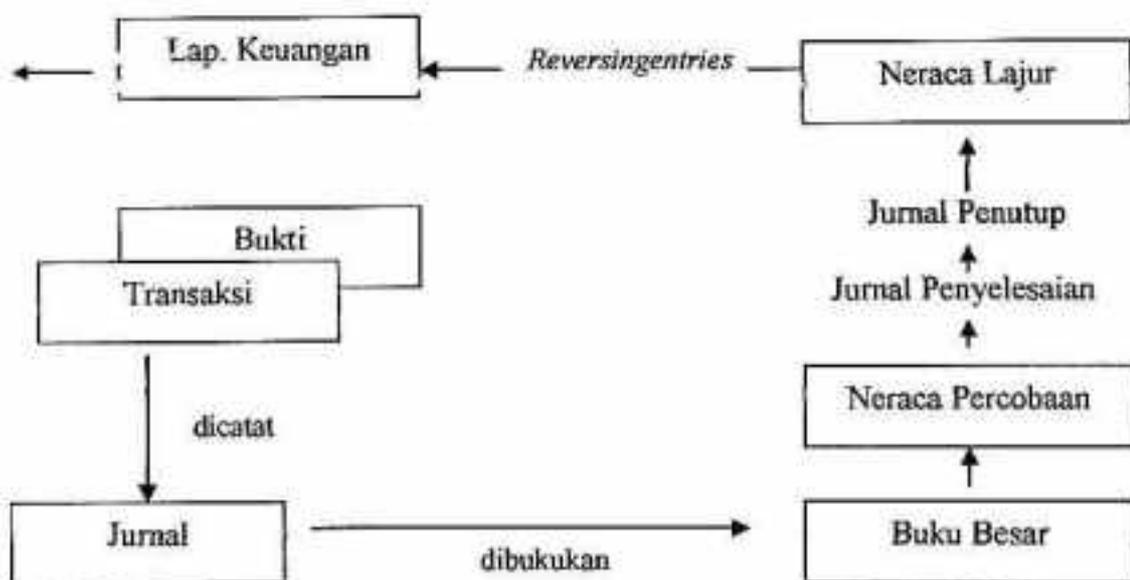
A Statement of Basic Accounting Theory (dalam Harahap, 2005: 4) akuntansi diartikan sebagai: "Proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya". Sedangkan *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* mendefinisikan akuntansi sebagai: "Seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya".

Selain itu, pengertian akuntansi dapat dianalisis melalui akronim akuntansi berikut:

A	Angka
K	Keputusan
U	Uang
N	Nilai
T	Tjatatan/Transaksi
A	Analisis
N	Netral
S	Seni
I	Informasi

Dari akronim tersebut dapat digambarkan bahwa akuntansi itu adalah menyangkut angka-angka yang akan dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan, angka itu menyangkut uang atau nilai moneter yang menggambarkan catatan dari transaksi perusahaan. Angka itu dapat dianalisis lebih lanjut, ia bersifat netral kepada semua pemakai laporan, ada unsur seninya karena berbagai alternatif yang bisa dipilih serta ia merupakan informasi yang sangat diperlukan para pemakai untuk pengambilan keputusan.

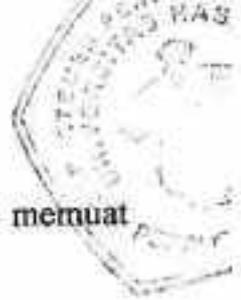
SIKLUS AKUNTANSI KONVENSIONAL



Sumber: Haruhap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 17

3.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah produk atau hasil akhir yang lahir melalui sistem, proses dan siklus atau prosedur akuntansi. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari: (1) daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu, (2) perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya



dan laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu, (3) laporan arus kas memuat sumber dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode.

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (PSAK No. 1). Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut SFAC No. 1 (dalam Harahap, 2005: 136-138), yaitu:

1. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna untuk investor (baik yang sudah maupun yang potensial), kreditur, dan pemakai lainnya dalam memutuskan secara rasional penggunaan investasi, kredit dan keputusan lainnya.
2. Untuk membantu investor atau calon investor dan kreditur dan pemakai lainnya untuk menilai jumlah, waktu dan prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan juga penerimaan dari penjualan, piutang atau saham dan pinjaman yang jatuh tempo.
3. Memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap kekayaan itu, pengaruh transaksi, kejadian dan keadaan lain yang mempengaruhi sumber kekayaan dan klaim terhadap kekayaan itu.
4. Memberikan informasi tentang prestasi keuangan perusahaan selama satu periode.
5. Memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pengembaliannya, tentang transaksi yang mempengaruhi modalnya, termasuk masalah dividen dan pembayaran

lainnya kepada pemilik dan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan.

6. Memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada pemilik atas penggunaan sumber kekayaan yang dipercayakan kepadanya.
7. Memberikan informasi yang berguna bagi manajer dan direksi dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan pemilik perusahaan.

Dalam kegiatan bisnis dan ekonomi, tidak hanya investor dan kreditor yang memerlukan informasi akuntansi. Manajemen, pelanggan, pemerintah dan masyarakat juga memerlukan informasi tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaporan keuangan mempunyai tujuan dan motivasi yang berbeda, tergantung sifat hubungannya dengan perusahaan. Akuntansi akan sangat bermanfaat kalau dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan variabel-variabel ekonomi dan sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, tujuan pelaporan keuangan harus diderivasi dari tujuan sosial ekonomi setempat, sehingga akan tergambar bahwa akuntansi mempunyai fungsi sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan sosial ekonomi (Suwaldiman, hal.59).

Pada tahun 1966, AAA mengemukakan tujuan akuntansi yang dimuat dalam pernyataan yang dikenal dengan ASOBAT (*A Statement of Basic Accounting Theory*). Salah satu tujuan akuntansi dalam ASOBAT (dalam Hendriksen, 1992: 105) adalah:

...facilitating social function and controls, that is facilitating the operations of organized society for the welfare all.

Akuntansi bertujuan untuk memberikan fasilitas dalam menjalankan fungsi sosial dan pengendalian sosial perusahaan. Fungsi sosial perusahaan seperti pembayaran pajak dan penyediaan data statistik keuangan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi perusahaan merupakan bagian dari tujuan akuntansi.

Dalam SFAC No.1 diakuinya adanya aspek sosial di dalam pelaporan keuangan (FASB, 1978, par. 7) yang dinyatakan sebagai berikut:

News releases, management's forecasts or the other descriptions of its plant or expectations, and descriptions of an enterprise social or environmental impact are examples of reports giving financial information other than financial statements or giving only nonfinancial information.

Dalam *financial reporting* dimungkinkan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3.3 Definisi dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja menurut Andrew D. Szilagyi (1998: 31) adalah:

Performance evaluation/appraisal is the process of identifying and measuring the result of organizational activities.

Definisi ini dapat diterjemahkan sebagai pengukuran kinerja adalah proses untuk mengukur hasil-hasil kegiatan yang dihasilkan oleh aktivitas organisasi. Sedangkan definisi pengukuran kinerja menurut Mulyadi dan Setiawan (1999: 227) adalah "pengukuran terhadap seberapa efisien dan efektif seorang manajer atau sebagai organisasi-seberapa baik manajer atau organisasi itu mencapai tujuan yang memadai".

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan, selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun *reward* yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat evaluasi pada periode yang lalu. Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi.

Manfaat penilaian kinerja menurut Mulyadi (1991: 139) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kontribusi suatu bagian dalam perusahaan terhadap organisasi secara keseluruhan.
2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing manajer.
3. Memotivasi para manajer supaya secara konsisten mengoperasikan divisinya sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan.

3.4 Konsep ekuitas dan konsep laba

3.4.1 Konsep Ekuitas

Konsep ekuitas menentukan dari sudut mana dan untuk kepentingan siapa laporan keuangan dibuat. Konsep kesatuan ini menunjukkan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan laporan keuangan dan mempunyai hak atas sumber daya ekonomi perusahaan. Pengaruh lain dari konsep ekuitas

ini adalah pada penentuan tujuan pelaporan keuangan yang ingin dicapai dan implikasi akhirnya akan mempengaruhi praktek akuntansi yang berlaku.

Konsep ekuitas mempengaruhi sudut pandang yang dipakai dalam suatu proses akuntansi. Pemilihan konsep ekuitas yang dipakai tergantung kepada siapa pertanggungjawaban tersebut ditujukan. Ada enam teori sudut pandang akuntansi (Kam, 1990: 303-315), yaitu: 1) teori kepemilikan (*proprietary theory*), 2) teori kesatuan usaha (*entity theory*), 3) teori dana (*fund theory*), 4) *commander theory*, 5) teori perusahaan (*enterprise theory*).

1) *Proprietary theory*

Menurut teori kepemilikan (*proprietary theory*), entitas adalah "agen, perwakilan, atau pengaturan dimana wirausahawan individual atau pemegang saham beroperasi". Sudut pandang dari kelompok pemilik sebagai pusat kepentingan dicerminkan dalam cara-cara di mana catatan-catatan akuntansi disimpan dan laporan keuangan disusun. Seluruh konsep, prosedur dan peraturan akuntansi dibuat berdasarkan kepentingan pemilik. Tujuan utama dari teori kepemilikan adalah penentuan dan analisis dari "kekayaan bersih" (*net worth*) pemilik. Oleh karena itu, persamaan akuntansinya adalah:

$$\text{Aktiva} - \text{Liabilities} = \text{Proprietorship}$$

P, *proprietorship* menunjukkan kekayaan bersih pemilik pada perusahaan.

Harta adalah milik pemilik perusahaan dan kewajiban adalah utang pemilik. Jika kewajiban dapat dianggap sebagai aktiva negatif, teori kepemilikan dapat dikatakan sebagai berpusat pada aktiva dan sebagai akibatnya, berorientasi

pada neraca. Aktiva dinilai dan neraca disusun untuk mengukur perubahan dalam kepentingan atau kekayaan si pemilik

Pendapatan dan beban masing-masing dianggap sebagai kenaikan atau penurunan dalam kepemilikan yang tidak berasal dari investasi atau penarikan modal oleh pemilik. Dengan demikian, laba bersih atau utang dan pajak penghasilan perusahaan adalah beban; dividen adalah penarikan modal.

Meskipun teori kepemilikan pada umumnya dipandang sesuai terutama untuk korporasi yang kepemilikannya bersifat tertutup seperti perusahaan perseorangan dan firma, pengaruh dari teori kepemilikan dapat ditemukan dalam beberapa teknik dan terminologi akuntansi yang digunakan oleh korporasi yang kepemilikannya bersifat terbuka. Misalnya saja, konsep laba perusahaan, yang diperoleh setelah memperlakukan bunga dan pajak penghasilan sebagai beban, mewakili laba bersih bagi pemegang saham dan bukannya sebagai laba bersih untuk seluruh penyedia modal. Secara serupa, istilah-istilah seperti "laba per saham" dan "dividen per saham" memiliki penekanan pada kepemilikan. Metode ekuitas akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan merekomendasikan bahwa bagian perusahaan tersebut atas laba bersih anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan dimasukkan dalam laba bersih. Dengan demikian, praktik juga menggunakan konsep kepemilikan.

Akuntansi dilihat dari sudut pandang pemilik muncul ketika perusahaan bisnis masih kecil dan umumnya bersifat perseorangan dan

persekutuan, tetapi dengan semakin berkembangnya perusahaan teori tersebut tidak memadai sebagai dasar untuk menjelaskan akuntansi perseroan.

2) *Entity Theory*

Teori entitas memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari mereka yang menyediakan modal bagi entitas tersebut. Sederhananya, unit bisnis dan bukannya pemilik, yang menjadi pusat dari kepentingan akuntansi. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab baik atas klaim pemilik maupun klaim kreditor. Oleh karena itu, persamaan akuntansinya adalah:

$$\text{Aktiva} = \text{Ekuitas}$$

Aktiva adalah hak yang menjadi milik entitas tersebut, ekuitas mencerminkan sumber daya dari aktiva dan terdiri atas kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Baik kreditor maupun pemegang saham adalah pemilik ekuitas, meskipun mereka memiliki hak yang berbeda dalam hal laba, pengendalian risiko dan likuidasi. Dengan demikian, laba yang diperoleh adalah milik dari entitas tersebut sampai laba tersebut didistribusikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Karena unit bisnis tersebut dianggap bertanggung jawab untuk memenuhi klaim dari pemegang ekuitas, maka teori entitas dikatakan sebagai "berpusat pada laba" dan konsekuensinya berorientasi pada laporan laba rugi. Akuntabilitas kepada pemegang ekuitas dicapai dengan cara mengukur kinerja operasi dan keuangan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laba adalah peningkatan dalam ekuitas pemegang

saham setelah klaim dari pemilik ekuitas lainnya (misalnya, bunga atas pinjaman jangka panjang dan pajak penghasilan) dipenuhi.

Dalam praktik terjadi inkonsistensi dalam mengikuti apakah teori kepemilikan atau teori entitas. Pengaruh keduanya muncul bersama-sama. Teori akuntansi konvensional didasari oleh teori entitas, sementara teori kepemilikan kelihatannya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap prosedur yang digunakan sekarang.

3) Fund Theory

Dalam teori dana, dasar akuntansi bukanlah pemilik maupun entitas, melainkan sekelompok aktiva dan kewajiban serta pembatasan yang terkait, yang disebut dana, yang mengatur penggunaan aktiva tersebut. Dengan demikian, teori dana memandang unit bisnis sebagai unit yang terdiri atas sumber daya (dana) ekonomi dan kewajiban serta pembatasan yang terkait dengan penggunaan dari sumber daya ini. Persamaan akuntansinya adalah:

$$\text{Aktiva} = \text{Pembatasan Aktiva}$$

Setiap dana ditujukan untuk memenuhi beberapa tujuan; dan jasa yang menjadi bagian dari aktiva merupakan alat utama untuk mencapai tujuan tersebut. Kewajiban mewakili pembayaran masa depan dan bukan klaim saat ini terhadap aktiva. Oleh karena itu, kewajiban berarti pembatasan yang mereka berikan pada aktiva yang didanai, tanda untuk bagian tertentu dari total aktiva yang digunakan untuk pembayaran. Ekuiti residual atau ekuitas

pemilik, menunjukkan pembatasan terakhir terhadap aktiva dan menetapkan keseimbangan antara aktiva dan ekuitas.

Pendapatan menunjukkan peningkatan aktiva ke dalam dana sepenuhnya bebas dari pembatasan ekuitas, serta pembatasan terakhir yang diberikan oleh ekuitas residual. Beban menunjukkan pelepasan jasa untuk tujuan yang telah ditetapkan yang ditentukan dalam tujuan penggunaan dana. Teori dana adalah "berpusat pada aktiva" dalam hal bahwa fokus utamanya adalah pada administrasi dan penggunaan yang sesuai atas aktiva. Bukannya neraca atau laporan keuangan, melainkan laporan sumber dan penggunaan danalah yang merupakan tujuan utama dari pelaporan keuangan. Laporan ini mencerminkan pelaksanaan operasi perusahaan dalam hal sumber dan penggunaan dana.

4) *Commander Theory*

Goldberg menyatakan bahwa baik teori kepemilikan dan teori entitas berdasar pada pemikiran mengenai kepemilikan, yang merupakan konsep yang sulit untuk didefinisikan dan dianalisa. Perhatian diarahkan pada fungsi kontrol, dan fungsi ini hanya dapat dilakukan oleh manusia. Unit pengalaman dan cara pandang yang dipakai seharusnya adalah manusia, sekelompok manusia yang memiliki kekuatan untuk menggunakan sumber daya. Menurut Goldberg, orang yang memiliki kekuatan seperti itu disebut sebagai "*commander*". Menurut pandangan Goldberg, fungsi akuntansi dilaksanakan untuk dan berdasarkan pada kepentingan *commander*. Laporan



keuangan adalah laporan dari *commander* dan untuk *commander*. Neraca dilihat sebagai laporan pertanggungjawaban bukan sebagai laporan kepemilikan. Neraca adalah laporan yang menunjukkan sumber daya yang dipercayakan dan dikendalikan oleh *commander*, tetapi belum tentu dimilikinya. Laporan laba rugi adalah penjelasan mengenai hasil dari aktivitas pada suatu periode yang dilakukan oleh *commander* dan timnya. Teori *commander* tidak memiliki dampak langsung dalam praktik akuntansi.

5) *Investor Theory*

Didasari oleh tujuan akuntansi untuk menyediakan informasi kepada pemberi modal, Staubus berpendapat bahwa fungsi akuntansi dan laporan keuangan harus menggunakan sudut pandang investor. Investor adalah para pemegang saham dan kreditor. Teori investor merupakan teori yang mendasari munculnya laporan arus kas. Persamaan akuntansinya adalah:

$$\text{Aktiva} = \text{Ekuitas Spesifik} + \text{Ekuitas Residual}$$

Ekuitas spesifik adalah kewajiban dan saham preferen. Dalam kebanyakan kasus untuk perusahaan besar, ekuitas residual adalah ekuivalen dari ekuitas saham biasa.

Investor menginginkan informasi untuk memprediksi penerimaan kas masa depan sebagai hasil dari hubungannya dengan suatu perusahaan. Staubus menyatakan bahwa penerimaan kas masa depan dari investor bergantung pada: (1) kapasitas moneter perusahaan untuk menghasilkan kas, (2) keinginan manajemen untuk membayar investor, dan (3) prioritas hukum

terhadap klaim investor. Laporan keuangan dapat membantu investor menentukan keinginan untuk membayar mereka.

6) *Enterprise Theory*

Menurut Alhashim (dalam Tuanakotta, 1985: 339), *Enterprise theory* adalah salah satu teori merangkul *socio-economic philosophy*. Dimana *socio-economic accounting* didasarkan pada tesis berikut:

Teknologi suatu sistem perekonomian meletakkan suatu struktur pada masyarakatnya yang tidak hanya menentukan aktivitas ekonominya tetapi juga mempengaruhi hubungan sosialnya dan kesejahteraannya. Oleh karenanya, suatu pengukuran yang terbatas pada konsekuensi ekonomi saja tidaklah memadai sebagai suatu penaksir hubungan sebab-akibat sistem semesta; pengukuran ini mengabaikan pengaruh (akibat) sosial.

Oleh sebab itu, akuntansi *socio-economic* adalah proses pengurutan, pengukuran, dan pengungkapan pengaruh yang kuat dari pertukaran antara suatu perusahaan dan lingkungan sosialnya.

Sudut pandang *enterprise theory* mulai dilontarkan oleh Suojanen sekitar tahun 1954. Pola pikir ini banyak dipengaruhi oleh Petter Drucker yang mengatakan bahwa perusahaan besar adalah suatu institusi sosial yang memiliki tanggung jawab sosial, maka Suojanen memformulasikan *enterprise theory* (Suojanen, 1997: 84).

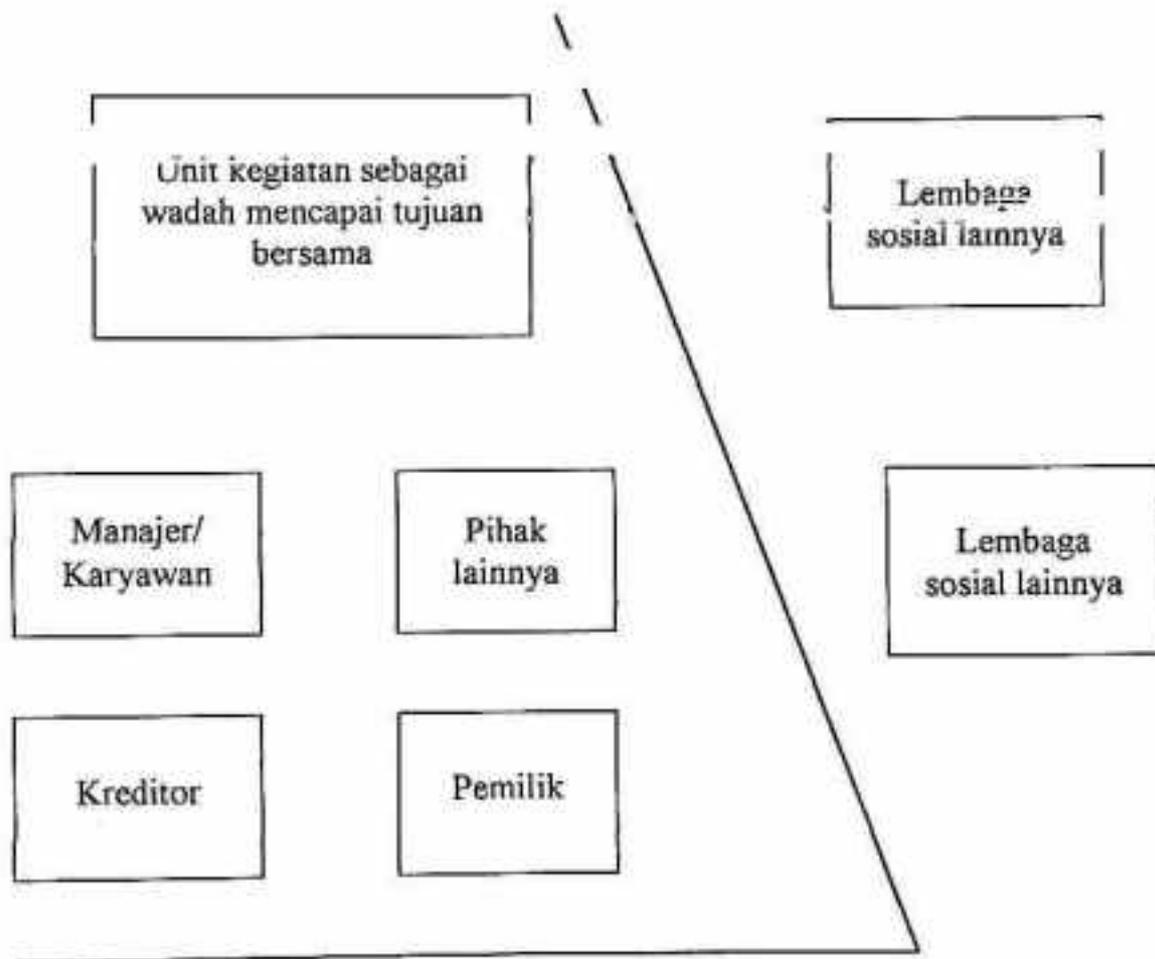
Dalam pandangan Suojanen bahwa struktur dan perilaku perusahaan di Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya terhadap masyarakat yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban sosial (*social responsibility*) bagi perusahaan. Karena disatu pihak perusahaan sangat bergantung pada dan

terkena dampak perilaku perusahaan. Pada keadaan seperti ini pertanggungjawaban kepada pemilik dan kreditur saja tidak cukup. Idealnya perusahaan juga harus bertanggung jawab kepada publik (Bambang Sudibyo, 1987: 31). Karena itu laporan keuangan seharusnya menggunakan sudut pandang yang merangkul semua pihak tersebut.

Teori *enterprise* melihat perusahaan sebagai sebuah institusi sosial dimana keputusan dibuat untuk mempengaruhi sejumlah pihak yang berkepentingan. Mereka adalah pemegang saham, karyawan, kreditor, pelanggan, pemerintah dan masyarakat (Kam, 1990: 314).

Adanya pandangan bahwa perusahaan sebagai lembaga sosial, bukan berarti bahwa fungsi perusahaan sebagai kesatuan ekonomi yang mampu mempertahankan dan mengembangkan kontinuitas usahanya diabaikan. Bagaimanapun juga setiap perusahaan atau badan usaha dalam rangka mempertahankan dan keberlanjutan usahanya haruslah berpijak pada dasar kemandiriannya, yaitu dengan cara memperoleh laba karena jika tidak demikian maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya diskontinuitas (Atma Hayat, 1989: 80).

Sudut Pandang *Enterprise Theory*



Sumber: Suwardjono, Seri Teori Akuntansi: *Perekayasaan Akuntansi Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1980), hal.87

3.4.2 Konsep Laba

Salah satu fungsi akuntansi adalah melakukan pengukuran termasuk pengukuran prestasi, hasil usaha, laba maupun posisi keuangan. Salah satu isu berat dalam pengukuran itu adalah pengukuran laba. Pengukuran laba bukan saja penting untuk menentukan prestasi perusahaan tetapi juga penting sebagai informasi bagi pembagian laba, penentuan kebijakan investasi, dan pembagian hasil. Dalam SFAC No. 1 disebutkan bahwa: *The primary focus of financial*

reporting is information about an enterprises performance provided by measures of earnings and its component. Diterjemahkan bahwa di dalam pelaporan keuangan, pengukuran laba sebagai indikator kinerja perusahaan merupakan fokus utama.

Menurut Hendriksen (1992: 338), tujuan khusus pelaporan laba adalah:

1. Sebagai ukuran efisiensi manajemen;
2. Membantu dalam memprediksi keadaan perusahaan atau distribusi dividen;
3. Sebagai pengukur pelaksanaan keputusan manajerial dan sebagai acuan dalam keputusan manajerial di masa yang akan datang.

Laba juga dipakai dalam penentuan pajak dan mengevaluasi alokasi sumber daya oleh para ekonom.

Kebaikan dan Kelemahan Laba Akuntansi

Kebaikan dan Kelemahan konsep laba akuntansi (Harahap, 2005: 274) adalah:

Kebaikannya antara lain:

1. Dapat terus menerus ditelusuri dan diuji.
2. Karena perhitungannya didasarkan pada kenyataan yang terjadi (fakta) dan dilaporkan secara objektif, perhitungan laba ini dapat diperiksa (*verifiability*).
3. Memenuhi prinsip *conservatisme*, karena yang diakui hanya laba yang direalisasi dan tidak memperhatikan perubahan nilai.

4. Dapat dijadikan sebagai alat kontrol oleh manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

Kelemahan yang terkandung di dalamnya adalah:

1. Tidak dapat menunjukkan laba yang belum direalisasi yang timbul dari kenaikan nilai. Kenaikan ini ada, namun belum direalisasi.
2. Sulit mengakui kebenaran jika dilakukan perbandingan. Hal ini timbul karena perbedaan dalam metode menghitung *cost*, perbedaan waktu antara realisasi hasil dan biaya.
3. Penerapan prinsip realisasi, *historical cost* dan *conservatisme* dapat menimbulkan salah pengertian terhadap data yang disajikan.

Menurut Hendriksen (1992) dan Most (1982) kelemahan laba akuntansi (dalam Harahap, 2005: 275) adalah:

1. Konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas dalam teori akuntansi, akuntansi dinilai:
 - a. Belum mampu memberikan ukuran terbaik untuk menentukan nilai arus jasa dan perubahan nilainya.
 - b. Belum sepakat mana yang masuk dan tidak masuk dalam perhitungan laba.
 - c. Ketidaksepakatan antara berbagai pihak siapa yang menjadi pemakai informasi *net income* ini.

2. Standar akuntansi yang diterima umum masih mengandung berbagai cara yang berbeda-beda dan mengandung ketidakkonsistenan baik antar perusahaan maupun dalam suatu periode tertentu.
3. Perubahan tingkat harga telah mengubah arti laba yang diukur berdasarkan nilai historis, sehingga perubahan nilai uang atau tingkat inflasi belum diperhitungkan dalam laporan keuangan.
4. Kurang bermanfaat untuk keputusan jangka pendek.
5. Informasi lainnya di luar data historis dinilai lebih bermanfaat bagi investor dalam pengambilan keputusan.
6. Kurangnya informasi fisik dan perilaku yang membuat informasi laba semakin bermanfaat.

Berbagai hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan konsep laba (Hendriksen, 1992: 340) adalah:

1. Apakah tujuan utama pelaporan keuangan;
2. Apakah elemen dasar dari setiap konsep laba dan bagaimana hubungannya dengan tujuan tersebut;
3. Jenis-jenis perubahan apa yang harus dimasukkan atau dikeluarkan dari perhitungan laba bersih; dan
4. Siapakah penerima laba utama perusahaan.

Ikhtisar Pengelompokan Laba Berdasarkan Penerima

Konsep Laba	Laba	Penerima Laba
Nilai Tambah	Harga jual produk dikurangi harga perolehan barang dan jasa yang ditransfer dari perusahaan lain	Semua karyawan, pemilik, kreditur dan pemerintah
Laba bersih perusahaan	Selisih lebih pendapatan terhadap biaya, semua laba dan rugi. Biaya tidak termasuk beban bunga, pajak pendapatan dan distribusi pembagian laba sesungguhnya	Pemegang saham, pemegang obligasi dan pemerintah
Laba bersih investor	Sama dengan laba bersih perusahaan, tetapi setelah dikurangi dengan pajak penghasilan	Pemegang saham dan pemegang obligasi
Laba bersih pemegang saham	Laba bersih investor dikurangi beban bunga dan distribusi pembagian laba	Pemegang saham (preferen dan biasa)
Laba bersih pemegang saham	Laba bersih pemegang saham dikurangi dividen saham preferen	Pemegang saham biasa potensial dan yang sedang berjalan, kecuali jika pembayaran prioritas tidak dapat dipenuhi

Sumber: Hendriksen, *Accounting Theory*, hal. 338 (terjemahan)

3.5 Value Added Statement (Laporan Nilai Tambah)

3.5.1 Definisi Value Added

Value added adalah ukuran kinerja, ukuran nilai atau kekayaan yang dibuat oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu atau nilai tambah merupakan ukuran prestasi para kontributor dalam perusahaan, yaitu karyawan, pemilik modal, pemerintah, dan pihak manajemen yang bekerja sama untuk menciptakan tambahan kemakmuran (Kam, 1990: 315).



Hendriksen (1992: 775) mendefinisikan nilai tambah sebagai berikut:

Value added is the market value of the goods and services produced by the firm less the value of the goods and services acquired by transfer from other firm.

Menurut Choi (Choi & Mueller, 1992) nilai tambah didefinisikan sebagai beda antara nilai output perusahaan dengan nilai input perusahaan. Nilai tambah dapat juga diartikan sebagai pertambahan kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan produktif sumber daya perusahaan sebelum dialokasikan kepada pemegang saham, pemegang obligasi, kreditor, pekerja dan pemerintah.

Harahap (2005: 449) mendefinisikan nilai tambah sebagai berikut:

Value added adalah kenaikan nilai kekayaan yang di-generate atau dihasilkan dengan penggunaan yang produktif dari seluruh sumber kekayaan perusahaan oleh seluruh tim yang ada termasuk pemilik modal, karyawan, kreditor, dan pemerintah.

Pendekatan *value added* memandang pendapatan sebagai hasil dari usaha bersama dari sejumlah pihak. Pemegang saham menjadi kurang berkuasa dan pemerintah serta organisasi pekerja menjadi lebih kuat.

3.5.2 Sejarah dan Perkembangan *Value Added Statement*

Keberadaan *value added statement* berawal dari abad ke 18 di *United States Treasury*. Sejak itu keberadaannya menjadi topik debat apakah dapat dimasukkan sebagai laporan standar akuntansi keuangan atau hanya merupakan pilihan manajemen untuk mengungkapkannya. Pada akhir 1970

konsep nilai tambah ini mulai mendapat perhatian serius di beberapa negara Eropa. Pengenalan dan penerapan pajak pertambahan nilai (*value added tax*) di negara Eropa tersebut menjadi pemicu bagi penggunaan laporan nilai tambah, walaupun pada dasarnya penghitungan pajak pertambahan nilai tersebut tidak membutuhkan laporan nilai tambah.

Di Inggris konsep ini mencapai kepopulerannya dengan adanya publikasi *Corporate Report*, sebuah *paper* diskusi yang disusun oleh panitia kerja dari badan akuntansi Inggris. *Paper* ini dipublikasikan pada bulan Agustus tahun 1975 oleh Accounting Standards Steering Committee (sekarang Accounting Standards Committee).

The Corporate Report adalah sebuah *discussion paper* yang merupakan langkah awal dalam menelaah pemakaian, tujuan, dan metode pelaporan keuangan modern di Inggris. Studi yang dilakukan oleh ASSC memiliki tujuan untuk meninjau kembali lingkup dan arah laporan keuangan yang dipublikasikan ditinjau dari kebutuhan informasi para pemakai.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan yang luas, maka *The Corporate Report* merekomendasikan perluasan pelaporan keuangan oleh perusahaan di Inggris yang meliputi beberapa bentuk laporan (dalam Belkaoui, 1981: 75) yaitu: (a) *A Statement of Value Added*, (b) *An Employment Report*, (c) *A Statement of Money Exchange with Government*, (d) *A Statement of Transaction in Foreign Currency*, (e) *A Statement of Corporate Objectives*.

Salah satu usulan yang terdapat dalam *The Corporate Report* adalah dipublikasikannya laporan nilai tambah. Alasan diusulkannya laporan tersebut (Gary & Gray, 1988: 73) adalah:

The simplest and most immediate way of putting profit into proper perspective vis-à-vis the whole enterprise as a collective effort by capital, management and employees is sales income less materials and services purchased. Value added is the wealth the reporting entity has been able to create by its own and its employees efforts. This statement would show how value added has been used to pay those contributing to its creation. It usefully elaborates on the profit and loss account and in time may come to be regarded as a preferable way of describing performance.

Laporan nilai tambah merupakan cara yang paling tepat untuk menyajikan laba sebagai hasil usaha kolektif antara karyawan, penyedia modal dan manajemen. Menurut ASSC, laporan nilai tambah merupakan laporan pelengkap, bukan pengganti laporan laba rugi.

Pemerintah Inggris kemudian mempublikasikan *green paper* yang merupakan publikasi pemerintah, dalam hal ini departemen perdagangan, tentang hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. *Green paper* ini antara lain mengandung usulan yang mengharuskan perusahaan-perusahaan menerbitkan laporan nilai tambah melalui adanya persyaratan legislatif.

Setelah *green paper* pertama kemudian diterbitkan *green paper* berikutnya dengan judul "*Company Accounting and Disclosure*". *Green paper* ini antara lain mengelompokkan perusahaan ke dalam tiga tingkatan, dimana disarankan pengungkapan yang berlainan untuk ketiga tingkatan

tersebut. Kesimpulan yang kemudian berhasil dirumuskan (Lewis & Pendril, 1989: 54) menyatakan:

The government believed that the presentation of value added statement was a matter which should be the subject of accounting standard or recommendation rather than the law.

Pada survei yang dilakukan untuk mengetahui banyaknya perusahaan yang memakai *value added statement* ini, pada tahun 1980 lebih 20% perusahaan terbesar di UK sudah membuat *value added statement*. Perkembangan ini didorong oleh desakan dari serikat buruh yang dikenal sangat kuat di Eropa. Bahkan sekarang dikenal VAIPS (*Value Added Incentive Payment Scheme*) dimana dasar pemberian intensif didasarkan pada pertambahan nilai (Harahap, 2005: 449-450).

3.5.3 Perhitungan Nilai Tambah

Saat ini belum ada standar yang diterima secara umum yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan laporan nilai tambah, baik di dalam bidang teori maupun dalam bidang praktek yang ada. Terdapat perbedaan pandangan antara ahli ekonomi dengan akuntan mengenai perhitungan nilai tambah. Ahli ekonomi memandang nilai tambah sebagai ukuran pendapatan nasional. Mereka menghitung nilai tambah berdasarkan nilai pasar output perusahaan, sedangkan akuntan menggunakan hasil penjualan yang menunjukkan nilai yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk output perusahaan.

Pada dasarnya laporan nilai tambah merupakan modifikasi laporan laba rugi. Laporan laba rugi menghitung laba ditahan (*retained earnings*) sebagai selisih antara penjualan (*sales*) yang dikurangi biaya, pajak dan dividen (Belkaoui, 1995: 452).

$$R = S - B - DP - W - I - DD - T \quad (1)$$

Dimana:	R	=	Retained earnings
	S	=	Sales revenue
	B	=	Bought-in materials and services
	DP	=	Depreciation
	W	=	Wages
	I	=	Interest
	DD	=	Dividends
	T	=	Taxes

Persamaan nilai tambah didapat dengan menyusun kembali persamaan laba ditahan menjadi

$$S - B = W + I + DP + DD + T + R \quad (2)$$

atau

$$S - B - DP = W + I + DD + T + R \quad (3)$$

Persamaan (2) merupakan format nilai tambah bruto sedangkan persamaan (3) merupakan format nilai tambah neto.

Sisi kiri persamaan (2) dan (3) merupakan nilai tambah, sedangkan sisi kanannya merupakan alokasi nilai tambah diantara partner kerja

perusahaan yang terdiri dari kelompok pekerja, kelompok pemegang saham, kelompok pemegang obligasi dan kreditor serta pemerintah.

Keunggulan format nilai tambah bruto yang dikemukakan Morley (1979):

1. Nilai tambah akan lebih obyektif bila menyertakan penyusutan dalam perhitungannya. Obyektifitas ini memberikan keyakinan bagi para pekerja akan validitas laporan nilai tambah untuk menghitung bonus produktivitas, ini dikarenakan para pekerja menilai format bruto mempersempit ruang bagi tindakan manipulasi ataupun normalisasi;
2. Format bruto memberi kemungkinan untuk melihat nilai reinvestasi yang tergambar pada pos penyusutan dan laba ditahan. Dengan demikian format bruto lebih bersifat pengungkapan penuh (*full disclosure*); dan
3. Format bruto memiliki visi dan preferensi yang sama dengan yang dimiliki oleh para ekonom dalam hal penghitungan pendapatan nasional bruto.

Dilain pihak, format nilai tambah neto juga mempunyai kelebihan yang patut dipertimbangkan, yakni:

1. Format neto mempunyai definisi yang relatif lebih baik bagi pengertian nilai tambah yang akan didistribusikan dibanding format bruto. Format bruto menghasilkan nilai tambah yang ditetapkan lebih tinggi (*overstated*) karena melibatkan unsur Penyusutan;
2. Format neto sesuai dengan prinsip *matching cost against revenue* dalam akuntansi;

3. Format neto mengeliminasi perhitungan ganda (*double accounting*) yang terjadi bila ada pertukaran aktiva tetap antar dua perusahaan; dan
4. Format neto sesuai dengan konsepsi “distribusi keuangan kepada kelompok pekerja, pemilik modal dan pemerintah”.

Perlakuan Pos-pos Tertentu

1. *Non-Trading Credits*

Non-trading credits didefinisikan sebagai penerimaan yang didapat bukan dari aktivitas normal perusahaan di bidang jasa, perdagangan atau manufaktur. Contoh *non-trading credits* adalah: penjualan sekuritas; penjualan aktiva yang bukan merupakan persediaan; laba selisih kurs; uang muka dari pemegang saham, direksi, pegawai, perusahaan afiliasi, kreditor, agen, kontrak pembelian; jaminan pelaksanaan kontrak; klaim kerugian dan kerusakan; klaim rabat; klaim restitusi pajak; cicilan pembelian saham; piutang bunga dan pendapatan dividen.

Jadi, pos *non-trading credits* ini bukan merupakan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan demikian jumlah *non-trading credits* akan dikoreksi terhadap jumlah laba ditahan.

2. *Pos Luar Biasa (Extraordinary Gains and Losses)*

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia pada PSAK No.25 yang termasuk sebagai pos luar biasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan normal perusahaan.
- b. Tidak sering terjadi dalam kegiatan normal perusahaan.

Kedua kriteria tersebut harus selalu dihubungkan dengan sifat dan karakteristik dari kegiatan perusahaan serta faktor geografis perusahaan. Bila hanya salah satu kriteria terpenuhi, maka transaksinya dikelompokkan sebagai penghasilan atau beban lain-lain.

PSAK No.25 menyatakan bahwa pos luar biasa harus disajikan setelah laba yang berasal dari kegiatan normal perusahaan, dengan demikian pengguna laporan keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan yang berasal dari kegiatan normal sekaligus juga melihat pengaruh dari pos luar biasa tersebut terhadap perhitungan laba rugi perusahaan. Dalam perhitungan nilai tambah perlakuan pos luar biasa dapat dianalogikan sama dengan pos *non-trading credits* jadi bukan merupakan nilai tambah. Dengan demikian nilainya merupakan koreksi terhadap laba ditahan.

3.5.4 Value Added Statement sebagai alat ukur kinerja keuangan

Laporan nilai tambah digunakan untuk mengukur produktivitas dan efisiensi perusahaan. Pengukuran dilakukan melalui perhitungan ratio-ratio yang relevan.

Menurut Morley (1979) ratio-ratio nilai tambah seperti ratio **nilai tambah/upah**, selain untuk mengukur kontribusi pekerja terhadap nilai

tambah yang terjadi, dapat juga digunakan untuk meramalkan kecenderungan dalam biaya tenaga kerja, selain itu juga dapat digunakan dalam negosiasi gaji. Ratio **pajak/nilai tambah** sebagai indikator peran pemerintah dalam perusahaan. Ratio **nilai tambah/penjualan** selain untuk mengukur pengaruh penjualan terhadap nilai tambah juga dapat digunakan untuk menentukan derajat integrasi vertikal pada suatu grup perusahaan. Ratio ini juga dapat dijadikan sebagai indeks daya tahan perusahaan terhadap perubahan pasokan bahan dan jasa. Ratio **nilai tambah/capital employed** dapat digunakan untuk mengukur produktivitas modal yang digunakan dalam perusahaan (Cox, 1978). Ratio **nilai tambah/operating assets** untuk mengukur produktivitas aset operasional. Ratio **nilai tambah/penyusutan** sebagai ukuran produktivitas aktiva berwujud. Ratio **laba operasional/nilai tambah** sebagai ukuran kontribusi profit terhadap nilai tambah.

Menurut Bambang Sudibyo (1986: 18), untuk mengetahui alokasi sumber-sumber daya yang ada dalam masyarakat maka diperlukan indeks efisiensi usaha. Nilai tambah merupakan indeks yang lebih baik daripada laba pemilik terlalu bias pada kepentingan pemilik. Dengan nilai tambah sebagai indeks, efisiensi akan diukur dari sudut pandang makro mengenai sumbangan perusahaan terhadap pendapatan nasional per satuan input.

3.5.5 Kelebihan dan Kelemahan *Value Added Statement*

3.5.5.1 Kelebihan Laporan Nilai Tambah

Meskipun konsep nilai tambah belum mencapai tingkat penggunaan yang meluas dikarenakan belum adanya model laporan yang konvensional, namun beberapa penulis telah menguji beberapa kelebihan dan keterbatasan yang berhubungan dengan laporan nilai tambah. Kelebihan utama laporan nilai tambah terletak pada cakupan teknis multidimensional-nya dibanding model laporan keuangan konvensional. Berikut ini beberapa kelebihan yang dimiliki oleh laporan nilai tambah, yaitu:

1. Memberikan iklim organisasi yang kondusif bagi pekerja.
2. Alat prediksi yang andal. Ratio yang dibuat berdasarkan nilai tambah dapat digunakan untuk memprediksi dan mendeteksi keadaan ekonomi untuk kepentingan perusahaan.
3. Laporan nilai tambah dapat juga berfungsi sebagai alat ukur untuk menentukan signifikansi sebuah perusahaan dalam suatu perekonomian. Jumlah nilai tambah yang diciptakan perusahaan merupakan tolok ukur yang lebih baik jika dibandingkan dengan penjualan atau modal karena penggunaan kedua pos tersebut dapat menimbulkan misinterpretasi.
4. Konsep laporan nilai tambah kurang lebih sama dengan konsep yang digunakan para ekonom untuk menghitung pendapatan



nasional. Seperti yang diketahui untuk menghitung pendapatan nasional salah satu langkahnya adalah dengan menjumlahkan nilai tambah perusahaan-perusahaan.

3.5.5.2 Kelemahan Laporan Nilai Tambah

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki laporan nilai tambah, yaitu:

1. Laporan nilai tambah bersandar pada konsepsi yang mungkin saja keliru mengenai perusahaan, yaitu memandang sebuah perusahaan bukan sebagai entitas tapi merupakan kelompok-kelompok partner yang bekerja sama. Faktanya kelompok-kelompok tersebut mempunyai hubungan yang bersifat konflik dalam mengelola sumber daya perusahaan. Manajer akan selalu berusaha memperbesar keuntungan dengan memperkecil biaya (antara lain upah) yang sangat bertentangan dengan kepentingan pekerja yang ingin mendapatkan upah yang sebesar-besarnya. Dipertanyakan pula mengenai kewajaran mengikutsertakan pemerintah sebagai partner kerja, walaupun hal ini dapat saja dijustifikasi.
2. Laporan nilai tambah berpotensi menimbulkan mispersepsi dalam kasus apabila nilai tambah meningkat tetapi *earning per share* (EPS) menurun. Dalam hal ini pemegang saham sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap EPS seharusnya memandang

bahwa laporan nilai tambah bukan merupakan laporan kepada pemegang saham.

3. Keberadaan laporan nilai tambah berpotensi mengarahkan manajemen pada tujuan yang salah yakni memaksimalkan nilai tambah perusahaan.

Keunggulan dan keterbatasan *value added statement/reporting* menurut Harahap (2005: 452-454), diantaranya adalah:

- **Keunggulan laporan nilai tambah, yaitu:**
 1. Konsep ini dinilai objektif sehingga dianggap sebagai informasi yang absah sebagai dasar perhitungan *reward*.
 2. Nilai tambah kotor merupakan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui angka reinvestasi (laba ditahan dan penyusutan).
 3. Laporan ini dianggap dapat menjembatani kepentingan akuntansi dan ekonomi dengan mengungkapkan jumlah kekayaan dalam pengukuran pendapatan nasional.
 4. Nilai tambah bersih bisa menjadi dasar distribusi kekayaan bukan nilai tambah kotor:
 - a. Nilai tambah bersih sangat cocok menjadi dasar perhitungan bonus produktivitas tenaga kerja dengan memberikan penyisihan pada perubahan modal.

- b. Dengan mengurangi biaya penyusutan akan menghindari *double accounting* yang bisa terjadi jika ada pertukaran aktiva antara dua perusahaan.
 - c. Nilai tambah bersih sangat menguntungkan bagi konsep laba untuk semua. Ini akan mendorong *spirit team* atau *sense of belonging* dalam perusahaan. Masing-masing pihak mengetahui kontribusinya dalam proses peningkatan kekayaan perusahaan.
 - d. Mestinya remunerasi karyawan tidak hanya berasal dari gaji, tetapi juga kenaikan kekayaan, ini konsep baru dalam dunia bisnis modern. Informasi untuk kepentingan ini di-*supply* oleh Laporan Nilai Tambah.
 - e. Dapat menjadi media peramalan yang baik bagi peristiwa ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan perusahaan.
 - f. Sangat cocok untuk ekonom dalam perhitungan pendapatan nasional.
- **Keterbatasan laporan nilai tambah, yaitu:**
 1. Tidak semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan nilai tambah itu merasa senang bekerja sama dengan yang lain. Tidak jarang justru ada konflik, sehingga laporan ini justru bisa menimbulkan atau mempertajam konflik.

2. Ada kemungkinan dengan adanya laporan nilai tambah ini manajemen salah tanggap seolah ingin memaksimalkan pertambahan nilai. Padahal sikap ini bisa menimbulkan inefisiensi.
3. Kesalahan penafsiran terhadap nilai tambah dapat menimbulkan kepalsuan pendapat seperti:
 - a. Kenaikan nilai tambah dianggap kenaikan laba.
 - b. Kenaikan nilai tambah per unit dianggap otomatis bermanfaat bagi pemegang saham.
 - c. Seolah dianggap bisa mengidentifikasi distribusi yang adil atas perubahan nilai tambah.
 - d. Nilai tambah yang tinggi untuk tenaga kerja per unit dianggap merupakan prestasi ekonomi yang baik.
 - e. *Share* tenaga kerja yang besar atas nilai tambah tidak berhak mendapatkan gaji yang tinggi.

3.5.6 Penerapan Laporan Nilai Tambah Pada BUMN

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu cabang dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV yang membawahi beberapa cabang pada kawasan Indonesia Bagian Timur, Maluku, dan Irian Jaya. BUMN memiliki dua peranan utama dalam kegiatan usahanya (Sarga, 1992: 52), yaitu:

- 1) Melaksanakan fungsi komersil. Dalam hal ini BUMN sebagai unit ekonomi (*business entity*) harus mampu memupuk dana untuk membiayai aktivitasnya baik yang bersifat rutin maupun pengembangan. Oleh karena itu, dalam kegiatannya harus memperoleh laba sehingga dapat dijaga kelangsungan hidupnya.
- 2) Melaksanakan fungsi non komersil. Dalam hal ini BUMN sebagai aparatur negara bertindak sebagai wahana pembangunan yang diembankan oleh pemerintah meliputi antara lain: tugas-tugas perintis dan mendorong perkembangan usaha swasta dan koperasi.

Berdasarkan kedua peran BUMN tersebut maka pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya terbatas kepada *shareholders*, tapi perusahaan juga harus bertanggung jawab kepada *stakeholders*, seperti yang dikatakan oleh Bambang Sudibyo (1990:31) bahwa "Semakin besar skala ukuran perusahaan, semakin banyak pihak yang terlibat di dalamnya, yang berkepentingan terhadapnya dan yang terkena dampak perilakunya", sehingga timbulah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dampak kegiatannya tersebut kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu, dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada masyarakat, maka konsep sudut pandang yang cocok untuk BUMN adalah *enterprise theory*. Sesuai dengan sudut pandang *enterprise theory* maka dalam penerapan laporan keuangan, konsep labanya akan disajikan dalam bentuk laporan nilai tambah. Dari laporan nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan menunjukkan efisiensi perusahaan dalam rangka pengalokasian sumber-sumber ekonomi. Di samping itu,

laporan nilai tambah mencerminkan juga kebersamaan semua pihak (*stakeholders*) dalam upaya menciptakan laba perusahaan (Bambang Agus P, 1989: 86).

Kesadaran akan pentingnya *value added statement* sejalan dengan peralihan penekanan tujuan manajemen dari yang pertama-tama memaksimalkan *profit* kepada pemilik modal (*shareholders*), ke memaksimalkan nilai tambah kepada *stakeholders*. Dengan menggunakan *value added statement* dianggap lebih adil dan demokratis, sehingga hubungan antara masing-masing pihak yang bekerja dalam satu tim lebih harmonis karena masing-masing nilai tambah yang diberikannya diukur.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu cabang dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV yang membawahi beberapa cabang pada kawasan Indonesia Bagian Timur, Maluku, dan Irian Jaya. Seluruhnya terdiri atas 23 cabang Pelabuhan dengan berkantor pusat di Makassar.

Asal mula berdirinya perusahaan ini adalah pada abad ke XIV dimana pada waktu itu pelabuhan telah dikenal dalam perdagangan internasional dengan nama Pelabuhan Makassar.

Pada tahun 1917 Belanda mulai membangun pelabuhan ini dengan segala fasilitas-fasilitasnya yang ditujukan untuk melayani kebutuhan kapal-kapalnya. Pada waktu itu, Pelabuhan Makassar menjadi pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Batavia (Jakarta) dengan nama *Haven Diicsi*.

Menurut *Zeehaven Regime Indonesia*, yang didasarkan atas *Indische Scheepvaartwet* 1936, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dibedakan atas pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan pelabuhan pantai yang terbuka untuk pelayaran pantai/antar pulau.

Pada tahun 1957-1960 pada masa awal kemerdekaan, pengelolaan pelabuhan berada di bawah koordinasi Djawatan Pelabuhan. Seiring dengan adanya

nasionalisasi terhadap perusahaan milik Belanda dan dengan dikeluarkannya PP No.19/1960, maka status pengelolaan pelabuhan dialihkan dari Djawatan Pelabuhan bentuk badan hukum yang disebut Perusahaan Negara (PN).

Pada tahun 1964-1969 pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan PP 19/1969 yang melikuidasi PN Pelabuhan menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) yang dipimpin oleh Administrator Pelabuhan sebagai penanggung jawab tunggal dan umum di pelabuhan. Dengan kata lain, aspek komersial tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan, tetapi kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh Lembaga Pemerintah yang disebut *Port Authority*.

Kemudian pada tahun 1969-1983, pengelolaan pelabuhan dalam likuidasi dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan PP 1/1969 dan PP 18/1969. Dengan adanya penetapan itu, pelabuhan dibubarkan dan *Port Authority* diganti oleh BPP. Status pelabuhan dalam likuidasi yang dikenal dengan BPP berakhir dengan keluarnya PP 11/1983 dan PP 17/1983 yang menetapkan bahwa pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh satu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum).

Tahun 1992-sekarang, dilandasi oleh pertimbangan peningkatan efisiensi dan efektifitas perusahaan serta dengan melihat perkembangan yang dicapai oleh Perum Pelabuhan IV, pemerintah menetapkan melalui PP 59/1991 bahwa pengelolaan pelabuhan di wilayah Perum Pelabuhan IV dialihkan ke Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero. Persero ini didirikan pada tanggal 1 Desember 1992 berdasarkan akta Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta.

Kedua akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-13446. HT.01.01 Thn 1993 tanggal 10 Desember 1993. Sebagai Persero, pemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia IV yang berkantor pusat di jalan Soekarno No. 1 Makassar sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Adapun jasa kepelabuhanan yang ditawarkan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan serta untuk memupuk keuntungan bagi perusahaan yaitu:

- a. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal;
- b. Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik turunnya penumpang;
- c. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal dan penundaan kapal;
- d. Gudang-gudang dari tempat penimbunan barang-barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- e. Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan industri, gudang-gudang bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan;
- f. Penyediaan listrik, air minum, dan instalasi limbah pembuangan;
- g. Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
- h. Jasa konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
- i. Rupa-rupa usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perseroan.

Demikian gambaran singkat mengenai sejarah berdirinya PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, dimana sampai sekarang masih menjadi salah satu pintu gerbang perhubungan laut khususnya di Indonesia Bagian Timur.

4.2 Struktur Organisasi

Perusahaan sebagai suatu jaringan hubungan beberapa fungsi hanya dapat bekerja dengan baik apabila terdapat suatu pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang dinyatakan dengan jelas dan dapat mengikuti perkembangan perusahaan tanpa perombakan yang cukup berarti terhadap struktur organisasi yang telah ada.

Dalam organisasi yang baik, harus terdapat pemisahan tanggung jawab antar departemen yang ada di dalamnya dan adanya kebebasan yang dimiliki oleh tiap-tiap bagian dalam melaksanakan fungsinya. Demikian pula dengan struktur organisasi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar, yang memisahkan tanggung jawab dan fungsi-fungsi organisasinya.

Direktorat Keuangan

Direktorat Keuangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melakukan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan Perseroan meliputi akuntansi manajemen, perbendaharaan serta kemitraan dan bina lingkungan, dan akuntansi keuangan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Direktorat Keuangan terdiri dari:

1. Sub Direktorat Akuntansi Manajemen

Sub Direktorat Akuntansi Manajemen dipimpin oleh Senior Manajer Akuntansi Manajemen, dimana memiliki fungsi dan tugas pokoknya adalah penanggung jawab program kerja bidang perencanaan dan penetapan anggaran, akuntansi biaya dan penentuan tarif yang dijabarkan dari strategi dan kebijakan perusahaan.

Senior Manajer Akuntansi Manajemen dibantu oleh dua orang Asisten Senior Manajer (ASM) sebagai berikut:

1) ASM Anggaran

Fungsi dan tugas pokoknya adalah membantu senior manajer Akuntansi Manajemen dalam menyusun program yang telah ditetapkan dalam kegiatan pengelolaan anggaran.

2) ASM Akuntansi Biaya dan Penentuan Tarif

Membantu Senior Manajer Akuntansi Manajemen dalam penjabaran program yang telah ditetapkan ke dalam kebijakan pengelolaan akuntansi biaya dan pentaripan.

2. Sub Direktorat Akuntansi Keuangan

Sub Direktorat Akuntansi Keuangan dipimpin oleh Senior Manajer Akuntansi Keuangan mempunyai fungsi dan tugas pokok penanggung jawab program kerja bidang akuntansi keuangan dan perpajakan telah ditetapkan dalam strategi dan kebijakan perusahaan.

Senior Manajer Akuntansi Keuangan dibantu oleh dua orang Asisten Senior Manajer (ASM) sebagai berikut:

1) ASM Akuntansi Keuangan

Mempunyai fungsi dan tugas pokok yaitu mengembangkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut bidang laporan akuntansi perusahaan, menyelenggarakan akuntansi pada Kantor Pusat Perusahaan, melakukan analisis atas laporan keuangan Kantor Pusat dan Cabang Akuntansi Keuangan serta *corporate* secara periodik, menyusun laporan keuangan perusahaan tahunan baik kompilasi antar cabang dan Kantor Pusat serta menyusun rencana dan mengusulkan penghapusan aktiva tidak produktif baik cabang dan Kantor Pusat.

2) ASM akuntansi Perpajakan

Mempunyai fungsi dan tugas pokok yaitu melakukan pembinaan pelabuhan cabang dalam hal pelaksanaan dan peraturan perpajakan yang berlaku, menyelenggarakan administrasi perpajakan secara tertib, melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku dan membuat perencanaan kewajiban perpajakan perusahaan.

3. Sub Direktorat Perbendaharaan

Sub Direktorat Perbendaharaan dipimpin oleh Senior Manajer Perbendaharaan yang mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai penanggung jawab program kerja bidang pembinaan dan pelaksanaan transaksi keuangan, pengaturan lalulintas keuangan termasuk manajemen kas dan pendanaan, hutang piutang

serta program kemitraan dan bina lingkungan yang dijabarkan dari strategi dan kebijakan perusahaan.

Senior Manajer Perbendaharaan dibantu oleh tiga orang Asisten Senior Manajer (ASM) sebagai berikut:

1) ASM Hutang Piutang

Mempunyai fungsi dan tugas pokok yaitu penanggung jawab program kerja bidang pembinaan dan pelaksanaan transaksi hutang piutang yang dijabarkan dari strategi dan kebijakan perusahaan.

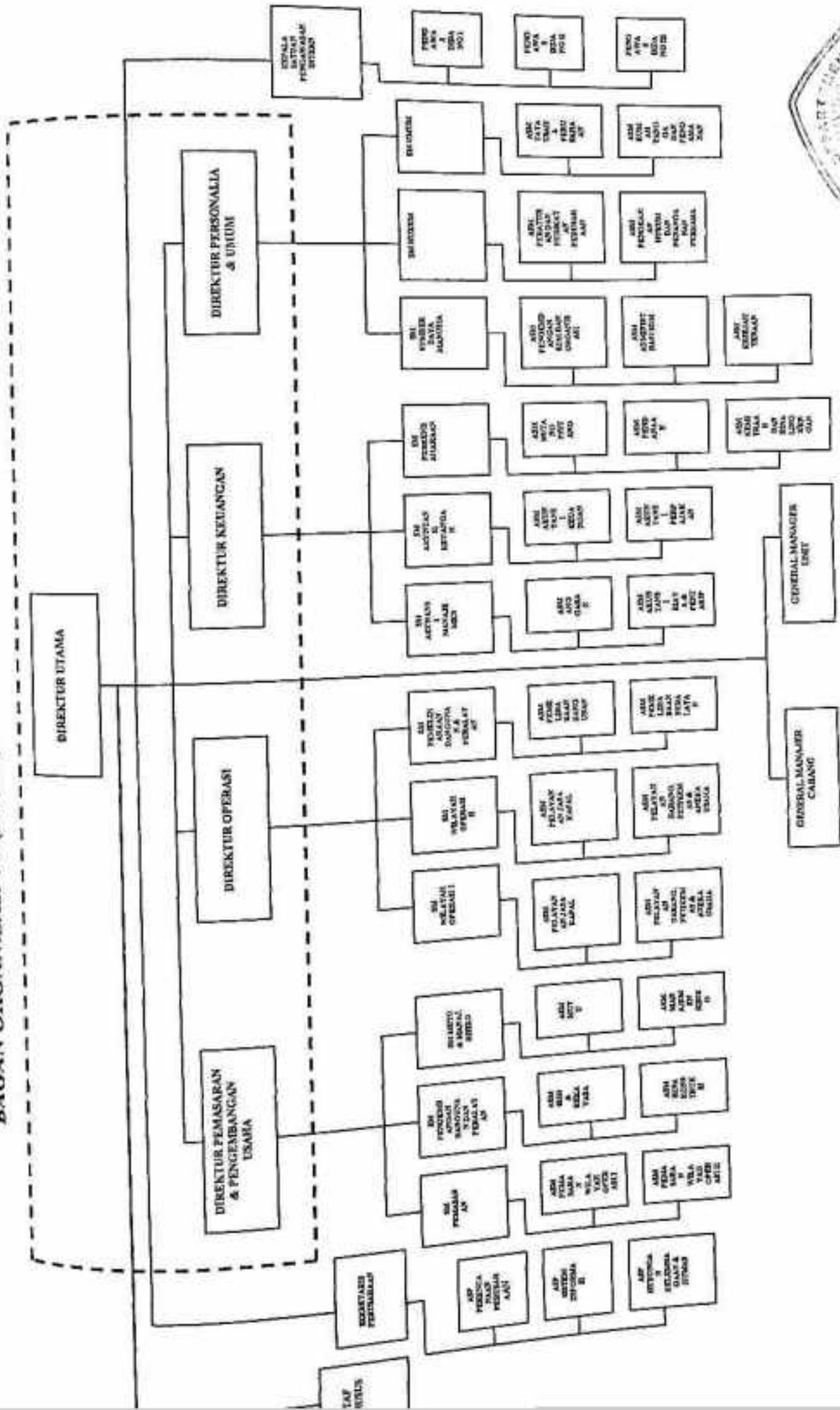
2) ASM Pendanaan

Mempunyai fungsi dan tugas pokok yaitu penanggung jawab program kerja bidang pembinaan dan pelaksanaan transaksi keuangan, pengaturan lalulintas keuangan termasuk manajemen kas dan pendanaan, hutang piutang serta program kemitraan dan bina lingkungan yang dijabarkan dari strategi dan kebijakan perusahaan.

3) ASM Kemitraan dan Bina Lingkungan

Mempunyai fungsi dan tugas pokok yaitu penanggung jawab program kerja bidang kemitraan dan bina lingkungan yang dijabarkan dari strategi dan kebijakan perusahaan.

BAGAN ORGANISASI PT (Persero) PELABUHAN INDONESIA IV MAKASSAR



Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar

4.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi perusahaan pelabuhan yang sehat dan dapat memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan yang tertib, lancar, aman, dengan biaya yang kompetitif dalam rangka mendukung percepatan pengembangan dan kesetaraan wilayah.

Misi

- a. Memupuk pendapatan yang dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham;
- b. Memberikan pelayanan yang efisien dan optimal kepada pengguna jasa dengan biaya kompetitif;
- c. Memberikan kontribusi keuangan kepada negara;
- d. Pengembangan usaha melalui sinergi dengan pemerintah daerah mitra kerja dan masyarakat sekitar guna mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan wilayah;
- e. Sebagai wahana untuk pengabdian dan pengembangan karier bagi pelaku perusahaan (karyawan) dengan memberikan imbalan jasa yang layak.

4.4 Komitmen Perusahaan

Dalam mencapai misinya perusahaan memiliki komitmen sebagai berikut:

- a. Kepada pengguna jasa: menyediakan jasa pelabuhan dengan kualitas pelayanan kelas dunia yang memuaskan pelanggan.

- b. Kepada pemegang saham: meningkatkan kinerja finansial sehingga mampu memberikan kontribusi kepada pemegang saham dalam bentuk deviden yang optimal.
- c. Kepada kepentingan nasional: menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.
- d. Kepada masyarakat pelabuhan: mendorong terbentuknya masyarakat pelabuhan yang kooperatif, memiliki rasa memiliki dan profesionalisme.
- e. Kepada pegawai: mampu memberikan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai, menciptakan manusia, berdedikasi yang memiliki keterampilan, pengalaman dan kemampuan melayani serta berpandangan luas, yang merasa bangga pada perusahaan dan budaya kerjanya.

4.5 Sasaran Perusahaan

- a. Menciptakan pelabuhan yang dapat ikut serta dalam jaringan sistem transportasi global dalam rangka mendukung ekspor khususnya bagi kawasan Timur Indonesia;
- b. Pertumbuhan keuntungan berkelanjutan dengan menjadikan kegiatan usaha pelayanan petikemas menjadi segmen usaha andalan;
- c. Peningkatan kondisi keuangan, khususnya arus kas sehingga mampu mendorong kapasitas investasi;
- d. Menciptakan sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka menghadapi berbagai aspirasi dan tuntutan pemerintah daerah dengan mengembangkan kerjasama dalam suatu skema bisnis yang layak.

BAB V

PENERAPAN *VALUE ADDED STATEMENT* SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PT (Persero) PELABUHAN INDONESIA IV MAKASSAR

5.1 Penerapan Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar

Laporan nilai tambah harus menggambarkan atau menyajikan jumlah kekayaan yang diciptakan secara bersama-sama oleh kelompok-kelompok yang terlibat di dalam kegiatan perusahaan selama periode tertentu. Laporan nilai tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar dibagi dalam dua kelompok besar, yang pertama, yaitu perhitungan nilai tambah dan yang kedua adalah distribusi nilai tambah kepada *stakeholders*.

Pada bagian pertama, yaitu perhitungan nilai tambah, dihitung berdasarkan total pendapatan yang diperoleh selama satu periode dikurang dengan total reduksi pendapatan dan beban-beban yang dikeluarkan. Kemudian ditambah dengan nilai pendapatan di luar usaha yang diperoleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar selama periode akuntansi yang berlaku.

Total nilai tambah yang telah diperoleh kemudian dibagikan (didistribusikan) kepada para partisipan (*stakeholders*) yang telah secara bersama-sama berpartisipasi dalam menciptakan nilai tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar.

Dalam penyajian laporan nilai tambah untuk PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar, penulis menggunakan pendekatan nilai tambah bersih (*Net*

Value Added), yaitu nilai tambah setelah dikurangi depresiasi yang dalam hal ini diperlakukan sama dengan beban operasi.



Penerapan *value added statement* sebagai alat ukur kinerja keuangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar, karena jika pengukuran dengan menggunakan nilai tambah diyakini dapat dijadikan ukuran yang baik mengenai besar dan pentingnya perusahaan. Selain itu juga, ratio-ratio nilai tambah dapat lebih dipahami dan mempunyai nilai prediktif mengenai kemampuan perusahaan dibandingkan dengan ratio konvensional (Belkaoui, 1993: 153).

5.2 Penyusunan Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan serta untuk memupuk keuntungan bagi perusahaan dengan menyelenggarakan usaha jasa kepelabuhanan dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha tersebut. Jadi, perusahaan didirikan bukan semata-mata untuk mencari laba saja tetapi juga mempunyai misi sosial.

Dalam menyelenggarakan peran ganda tersebut PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar sangat bergantung pada sumber daya yang ada dalam masyarakat di mana perusahaan membutuhkan tenaga kerja, bantuan dana dari kreditor, serta struktur dan infrastruktur dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar dapat dipandang sebagai institusi sosial yang melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Sumber data untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan selama ini adalah laporan keuangan konvensional. Laporan laba rugi yang disusun memberikan gambaran mengenai besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan ini hanya menggambarkan pertanggungjawaban perusahaan dalam menjalankan misinya untuk mencari laba. Selain itu, sasaran laporan keuangan konvensional hanyalah untuk *shareholders* saja, sehingga laporan ini belum dapat menggambarkan pertanggungjawaban perusahaan dalam menjalankan fungsi atau misi sosialnya.

Pelaporan keuangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV akan lebih relevan bila mampu menghasilkan informasi keuangan yang tidak hanya untuk pemegang saham, tetapi juga pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Penyajian laporan nilai tambah dalam pelaporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai laba yang diterima oleh kelompok yang lebih luas daripada hanya kepada *shareholders* saja.

Penerapan laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan perusahaan dapat memperluas lingkup pemakai informasi laporan keuangan. Dengan diterapkannya laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan konvensional, maka perusahaan dapat tetap mempertahankan orientasi utamanya yaitu menyajikan laporan keuangan untuk pemegang saham dan kepada kelompok pemakai lainnya.

Sesuai dengan sudut pandang teori *enterprise* dalam penyajian laporan laba rugi adalah laporan nilai tambah (*value added statement*). Sebelum menyusun laporan nilai tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar, terlebih dahulu diperhatikan pos-pos akun yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi laporan keuangan pada umumnya (khususnya laporan laba rugi). Untuk kepentingan tersebut maka disajikan Laporan Laba Rugi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar untuk periode 2006 yang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Selanjutnya penulis sajikan realisasi beban yang ada hubungannya dengan Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar seperti pada Tabel 5.3.

Tabel 5.2

LAPORAN LABA RUGI
PT (Persero) PELABUHAN INDONESIA IV MAKASSAR
 Periode 1 Januari – 31 Desember 2006

PENDAPATAN			
Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal	Rp	146.105.052.751,00	
Pendapatan Pelayanan Jasa Barang		38.049.482.716,00	
Pendapatan Pengusahaan Alat-alat		2.382.810.038,00	
Pendapatan Pelayanan Usaha Terminal		39.644.625.151,00	
Pendapatan Pelayanan Term. Peti Kemas		128.140.032.271,00	
Pendapatan Pengshn Tanah, Bangunan, Listrik (TBL)		10.152.904.118,00	
Pendapatan Kerja Sama Usaha (KSU)		10.030.642.049,00	
Pendapatan RS. Pelabuhan/Unit Kes.		146.722.342,00	
Pendapatan Pelsus/Dersus		75.750.152.107,00	
Pendapatan Rupa-rupa Usaha		29.985.439.992,00	
Jumlah Pendapatan Usaha Kotor			Rp 480.387.863.535,00
Dikurangi: Reduksi Pendapatan			57.873.744.439,00
Pendapatan Usaha Bersih			Rp 422.514.119.096,00
Pendapatan Di Luar Usaha			13.156.784.235,00
Jumlah Pendapatan			Rp 435.670.903.331,00
Dikurangi: BEBAN-BEBAN			
Beban Pegawai	Rp	80.166.961.732,00	
Beban Bahan		49.753.413.513,00	
Beban Pemeliharaan		38.253.863.401,00	
Beban Penyusutan dan Amortisasi		35.123.918.090,00	
Beban Asuransi		2.263.756.978,00	
Beban Sewa		22.205.813.559,00	
Beban Administrasi Kantor		5.156.147.059,00	
Beban Umum		96.915.022.993,00	
Beban Bunga Pinjaman Jk Panjang		2.782.726.922,00	
Beban Operasional Program Kemitraan		130.334.054,00	
Jumlah Beban			Rp 332.751.558.301,00
Laba Sebelum Pos Luar Biasa			Rp 102.919.345.030,00
PENDAPATAN DAN BEBAN POS LUAR BIASA			0,00
Pendapatan Pos Luar Biasa			0,00
Biaya Pos Luar Biasa			0,00
Selisih Pendapatan & Beban Pos Luar Biasa			Rp 102.919.345.030,00
Laba Sebelum Pajak			28.913.222.268,00
Dikurangi: TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			Rp 74.006.122.764,00
Laba Setelah Pajak			

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar, 2006

Tabel 5.3
DAFTAR RINCIAN BEBAN PER JENIS
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar
Periode 1 Januari - 31 Desember 2006 dan 2005

dalam Rupiah (Rp)

No	Uraian	Jumlah 2005	Jumlah 2006	Kontribusi Beban
1	BEBAN PEGAWAI			
101	Beban Gaji Direksi	4.126.480.476,00	3.666.761.858,00	Karyawan
102	Beban Gaji Pegawai	29.305.087.793,00	20.971.816.629,00	sda
103	Beban Tunjangan Prestasi	25.552.090.052,00	26.949.155.735,00	sda
104	Beban Tunjangan Khusus Pajak Penghasilan	0,00	0,00	sda
105	Beban Lembur	152.651.617,00	122.960.450,00	sda
107	Beban Tunjangan Air, Listrik dan Telpon	0,00	0,00	sda
108	Beban Tunjangan Jabatan	3.282.095.213,00	2.760.319.754,00	sda
109	Beban Bonus	17.250.000.000,00	14.740.000.000,00	sda
199	Beban Biaya Pegawai Lainnya	498.576.581,00	156.916.126,00	sda
2	BEBAN BAHAN			
201	Beban Bahan Bakar	19.879.239.164,00	10.095.443.691,00	Unit Ekonomi Lain
202	Beban Bahan Pelumas	982.828.631,00	885.583.807,00	sda
203	Beban Bahan Makanan	3.198.060.533,00	3.259.415.580,00	sda
204	Beban Air	10.757.331.348,00	8.323.972.217,00	sda
206	Beban Listrik	4.506.679.950,00	4.179.969.171,00	sda
208	Beban Telepon	1.215.801.628,00	1.247.270.088,00	sda
		0,00	0,00	sda
207	Beban Obat-obatan	15.056.225,00	15.270.555,00	sda
208	Beban Bahan Medis	347156.913,00	295.394.244,00	sda
209	Beban Bahan Pas Pelabuhan	177.463.300,00	93.035.492,00	sda
210	Beban Bahan Pemadam Kebakaran	2.837.369.853,00	2.682.629.453,00	sda
211	Beban Perlengkapan	50715518245,00	4.553.364.430,00	sda
213	Insentif Operasional	121.107.723,00	98.648.250,00	sda
299	Beban Bahan Lainnya			

Tabel 5.3 (Lanjutan)
DAFTAR RINCIAN BEBAN PER JENIS
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar
Periode 1 Januari - 31 Desember 2006 dan 2005

dalam Rupiah (Rp)

No	Uraian	Jumlah 2006	Jumlah 2005	Kontribusi Beban
3	BEBAN PEMELIHARAAN			
301	Beban Pemeliharaan Bangunan Fas. Pelabuhan	6.333.003.628,00	4.261.115.296,00	Unit Ekonomi Lain
302	Beban Pemeliharaan Kapal	8.896.202.442,00	8.747.464.405,00	sda
303	Beban Pemeliharaan Alat-alat Fas. Pelabuhan	8.354.191.618,00	8.253.901.511,00	sda
304	Beban Pemeliharaan Instalasi Fas. Pelabuhan	2.032.194.722,00	1.527.226.812,00	sda
305	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	38.212.000,00	sda
306	Beban Pemeliharaan Jalan dan Bangunan	8.175.020.703,00	6.913.123.990,00	sda
307	Beban Pemeliharaan Peralatan	1.717.366.339,00	1.501.209.590,00	sda
308	Beban Pemeliharaan Kendaraan	644.243.521,00	437.062.664,00	sda
309	Pemeliharaan Emplasemen	2.101.440.428,00	2.143.977.822,00	sda
4	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
401	Beban Penyusutan Bangunan Fas. Pelabuhan	10.143.042.614,00	9.718.243.690,00	sda
402	Beban Penyusutan Kapal	3.122.220.027,00	2.799.642.918,00	sda
403	Beban Penyusutan Alat-alat Fas. Pelabuhan	11.425.345.268,00	10.984.831.682,00	sda
404	Beban Penyusutan Instalasi Fas. Pelabuhan	1.664.768.993,00	1.231.530.416,00	sda
406	Beban Penyusutan Jalan dan Bangunan	2.137.487.294,00	2.266.635.462,00	sda
407	Beban Penyusutan Peralatan	595.058.698,00	538.597.919,00	sda
408	Beban Penyusutan Kendaraan	793.024.148,00	584.588.012,00	sda
409	Beban Penyusutan Emplasemen	620.257.090,00	619.368.083,00	sda
410	Beban Penyusutan Aktiva Tetap Penugasan	15.495.062,00	10.303.812,00	sda
411	Beban Amortisasi Survey Yang Ditangguhkan	457.438.714,00	313.071.713,00	sda
412	Beban Amortisasi Konsultan Yg Ditangguhkan	42.766.229,00	149.064.619,00	sda
413	Beban Amortisasi Yang Ditangguhkan	0,00	0,00	sda
414	Beban Amortisasi Pendidikan Yg Ditangguhkan	1.139.201.674,00	392.322.684,00	sda
415	Beban Amortisasi Pemeliharaan Yg Ditangguhkan	2.272.719.051,00	1.722.005.828,00	sda

Tabel 5.3 (Lanjutan)
DAFTAR RINCIAN BEBAN PER JENIS
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar
Periode 1 Januari - 31 Desember 2006 dan 2005

dalam Rupiah (Rp)

No	Uraian	Jumlah	Jumlah	Kontribusi
		2006	2005	Beban
416	Beban Amortisasi Akta Pendirian	18.354.104,00	276.203.719,00	Unit Ekonomi Lain
417	Beban Amortisasi P. Aplikasi Komputer	11.987.134,00	113.199.589,00	sda
418	Beban Amortisasi HPL Tanah	409.593.314,00	302.046.775,00	sda
419	Beban Amortisasi Rugi Kurs Yg Ditangguhkan	0,00	0,00	sda
425	Beban Amortisasi Monitoring Proyek	0,00	0,00	sda
429	Beban Amortisasi Aplikasi Tarif	34.960.357,00	6.842.395,00	sda
430	Beban Amortisasi Aplikasi Akuntansi Beban	20.178.319	25.305.835,00	sda
6	BEBAN ASURANSI			
501	Beban Asuransi Bangunan Fas. Pelabuhan	83.809.054,00	47.940.829,00	sda
502	Beban Asuransi Kapal	256.570.050,00	191.666.327,00	sda
503	Beban Asuransi Alat-alat Fas. Pelabuhan	968.333.016,00	865.841.355,00	sda
506	Beban Asuransi Jalan dan Bangunan	43.037.160,00	27.766.458,00	sda
507	Beban Asuransi Peralatan	170.000,00	148.049,00	sda
508	Beban Asuransi Kendaraan	73.383.901,00	47.959.657,00	sda
510	Beban Asuransi kecelakaan Kerja	352.642.720,00	429.202.948,00	Karyawan
599	Beban Asuransi Lainnya	485.811.077,00	237.665.902,00	Unit Ekonomi Lain
6	BEBAN SEWA			
601	Beban Sewa Bangunan Fas. Pelabuhan	6.150.000,00	682.966,00	Lessor
602	Beban Sewa Kapal	480.819.250,00	365.304.900,00	sda
603	Beban Sewa Alat-alat Fas. Pelabuhan	71.306.116,00	637.813.935,00	sda
606	Beban Sewa Jalan dan Bangunan	299.930.110,00	188.589.020,00	sda
607	Beban Sewa Peralatan	0,00	0,00	sda
608	Beban Sewa Kendaraan	222.639.000,00	197.722.500,00	sda
609	Beban Upah Buruh/Tenaga Kerja	20.402.998.500,00	18.817.301.347,00	Karyawan
699	Beban Sewa Lainnya	721.770.583,00	130.417.990,00	Lessor

Tabel 5.3 (Lanjutan)
DAFTAR RINCIAN BEBAN PER JENIS
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar
Periode 1 Januari - 31 Desember 2006 dan 2005

dalam Rupiah (Rp)

No	Uraian	Jumlah	Jumlah	Kontribusi Beban
		2006	2005	
7	BEBAN ADMINISTRASI KANTOR			
701	Beban Cetak dan Foto Copy	1.873.080.818,00	1.603.977.360,00	Unit Ekonomi Lain
702	Beban Kertas dan Alat Tulis	922.784.680,00	764.462.460,00	sda
703	Beban Pengiriman Surat dan Kawat	118.065.583,00	114.027.824,00	sda
704	Beban Surat Kabar Majalah dan Buletin	174.182.487,00	182.738.509,00	sda
705	Beban Rapat dan Jamuan	448.730.386,00	384.699.974,00	sda
706	Beban Rumah Tangga	1.086.081.738,00	814.211.867,00	sda
709	Beban Administrasi Bank	89.308.889,00	135.692.361,00	sda
799	Beban Administrasi Lainnya	443.922.478,00	554.244.798,00	sda
8	BEBAN UMUM			
801	Beban Perjalanan Dinas	8.335.432.187,00	7.044.578.336,00	Karyawan
802	Beban Penyisihan Piutang	13.123.711.956,00	379.543.011,00	Unit Ekonomi Lain
803	Beban Penagihan Piutang	227.130.206,00	204.356.021,00	sda
804	Beban Keamanan Pelabuhan	3.306.520.125,00	2.948.673.388,00	sda
805	Beban Survey	658.194.669,00	779.702.549,00	sda
806	Beban Promosi	2.075.797.275,00	1.910.410.759,00	sda
807	Beban Pajak Bumi dan Bangunan	4.726.366.891,00	4.174.614.923,00	Pemerintah
808	Beban Pajak Kendaraan	356.554.972,00	225.720.265,00	sda
809	Beban Pesangon Ganti Rugi	9.579.425.003,00	4.917.751.120,00	Karyawan
810	Beban Klaim	14.800.000,00	11.458.300,00	Unit Ekonomi Lain
811	Beban Konsultan	88.660.000,00	0,00	sda
812	Beban Olah Raga dan Kesenian	504.735.418,00	386.209.022,00	Karyawan
813	Beban Pakaian Dinas dan Kerja	1.012.769.239,00	944.308.827,00	sda
814	Beban Pendidikan dan Latihan	2.930.065.524,00	2.815.247.569,00	sda
815	Beban Bantuan Sosial	6.615.089.714,00	5.089.118.385,00	Masyarakat

Tabel 5.3 (Lanjutan)
DAFTAR RINCIAN BEBAN PER JENIS
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar
Periode 1 Januari - 31 Desember 2006 dan 2005

dalam Rupiah (Rp)

No	Uraian	Jumlah	Jumlah	Kontribusi Beban
		2006	2005	
816	Beban Iuran Dana Pensiun	7.524.825.079,00	13.219.127.794,00	Karyawan
817	Beban Dewan Komisaris	2.330.453.479,00	2.083.177.812,00	sda
818	Beban Perawatan Kesehatan	6.529.935.753,00	5.576.357.824,00	sda
819	Beban Penghapusan Aktiva Tetap	0,00	2.789.734.172,00	Unit Ekonomi Lain
820	Beban Pemasaran	4.197.331.172,00	4.430.874.828,00	sda
821	Beban Pemeriksaan	1.243.058.898,00	1.206.498.490,00	sda
823	Beban Penghapusan Barang Persediaan	5.324.136,00	10.722.581,00	sda
824	Beban Penghapusan Aktiva	1.027.874.188,00	13.295.128,00	sda
825	Beban Penanganan Kasus	330.912.600,00	212.344.950,00	sda
826	Beban Realokasi Aktiva Tetap	0,00	0,00	sda
827	Beban Rugi Kurs Pembukuan	5.484.479.470,00	7.407.654.814,00	sda
898	Koreksi Perhitungan L/R Tahun Lalu	0,00	0,00	sda
899	Beban Umum Lainnya	14.685.575.259,00	14.433.885.080,00	sda
10	Beban Bunga Pinjaman Jk. Panjang	2.782.726.922,00	5.533.840.144,00	Kreditor
11	Beban Operasional PKBL	130.334.054,00	107.814.095,00	Masyarakat

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar

5.2.1 Perhitungan Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar

Tabel 5.4

LAPORAN NILAI TAMBAH		
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar		
Periode 1 Januari – 31 Desember 2006		
PENDAPATAN		
Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal	Rp	146.105.052.751,00
Pendapatan Pelayanan Jasa Barang		38.049.482.716,00
Pendapatan Pengusahaan Alat-alat		2.382.810.038,00
Pendapatan Pelayanan Usaha Terminal		39.644.625.151,00
Pendapatan Pelayanan Term. Peti Kemas		128.140.032.271,00
Pendapatan Pengshn Tanah, Bangunan, Listrik (TBL)		10.152.904.118,00
Pendapatan Kerja Sama Usaha (KSU)		10.030.642.049,00
Pendapatan RS. Pelabuhan/Unit Kes.		146.722.342,00
Pendapatan Pelsus/Dersus		75.750.152.107,00
Pendapatan Rupa-rupa Usaha		<u>29.985.439.992,00</u>
Jumlah Pendapatan Usaha Kotor	Rp	480.387.863.535,00
Dikurangi: Reduksi Pendapatan		<u>57.873.744.439,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	422.514.119.096,00
Dikurangi: BEBAN-BEBAN		
Beban Bahan	Rp	49.753.413.513,00
Beban Pemeliharaan		38.253.663.401,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		35.123.918.090,00
Beban Asuransi		1.911.114.258,00
Beban Administrasi Kantor		5.156.147.059,00
Beban Umum		<u>46.469.369.754,00</u>
Jumlah Beban	Rp	176.667.626.075,00
NILAI TAMBAH	Rp	245.846.493.021,00
DISTRIBUSI NILAI TAMBAH		
	Jumlah	% thdp Nilai Tambah
Pegawai	Rp 139.670.244.614,00	56,81%
Kreditor	2.782.726.922,00	1,13%
Lessor	1.802.615.059,00	0,73%
Pemerintah	33.996.144.129,00	13,83%
Masyarakat	6.745.423.768,00	2,74%
Reinvestasi	74.006.122.764,00	30,10%
Koreksi Non-Trading Credit	13.156.784.235,00	-5,34%
Dikurangi: Pendapatan Di Luar Usaha	Rp 245.846.493.021,00	100,00%
Jumlah		

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar (data telah diolah)

Tabel 5.5

LAPORAN NILAI TAMBAH
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar
Periode 1 Januari – 31 Desember 2005

PENDAPATAN		
Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal	Rp	115.511.924.562,00
Pendapatan Pelayanan Jasa Barang		31.029.729.328,00
Pendapatan Pengusahaan Alat-alat		1.790.841.184,00
Pendapatan Pelayanan Usaha Terminal		38.190.217.124,00
Pendapatan Pelayanan Term. Peti Kemas		89.052.696.789,00
Pendapatan Pengshn Tanah, Bangunan, Listrik (TBL)		8.611.906.382,00
Pendapatan Kerja Sama Usaha (KSU)		8.831.383.895,00
Pendapatan RS. Pelabuhan/Unit Kes.		128.380.315,00
Pendapatan Pelsus/Dersus		70.312.085.474,00
Pendapatan Rupa-rupa Usaha		<u>27.507.038.157,00</u>
Jumlah Pendapatan Usaha Kotor	Rp	390.964.203.210,00
Dikurangi: Reduksi Pendapatan		<u>44.780.253.864,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	346.183.949.346,00
Dikurangi: BEBAN-BEBAN		
Beban Bahan	Rp	35.729.996.978,00
Beban Pemeliharaan		34.823.294.280,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		32.053.805.351,00
Beban Asuransi		1.418.989.577,00
Beban Administrasi Kantor		4.554.055.153,00
Beban Umum		<u>36.739.154.071,00</u>
Jumlah Beban	Rp	145.319.295.410,00
Nilai Tambah		
DISTRIBUSI NILAI TAMBAH		
	Jumlah	% thdp Nilai Tambah
Pegawai	Rp 125.621.191.151,00	82,54%
Kreditor	5.533.840.144,00	2,76%
Lessor	1.520.531.331,00	0,76%
Pemerintah	26.413.633.307,00	13,15%
Masyarakat	5.196.932.480,00	2,59%
Reinvestasi	58.793.780.806,00	29,27%
Koreksi Non-Trading Credit	22.215.255.283,00	-11,07%
Dikurangi: Pendapatan Di Luar Usaha	Rp 200.864.653.936,00	100,00%
Jumlah		

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar (data telah diolah)

Tabel 5.5

LAPORAN NILAI TAMBAH
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar
Periode 1 Januari – 31 Desember 2005

PENDAPATAN		
Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal	Rp	115.511.924.562,00
Pendapatan Pelayanan Jasa Barang		31.029.729.328,00
Pendapatan Pengusahaan Alat-alat		1.790.841.184,00
Pendapatan Pelayanan Usaha Terminal		38.190.217.124,00
Pendapatan Pelayanan Term. Peti Kemas		89.052.696.789,00
Pendapatan Pengshn Tanah, Bangunan, Listrik (TBL)		8.611.906.382,00
Pendapatan Kerja Sama Usaha (KSU)		8.831.383.895,00
Pendapatan R.S. Pelabuhan/Unit Kes.		128.380.315,00
Pendapatan Pelsus/Dersus		70.312.085.474,00
Pendapatan Rupa-rupa Usaha		<u>27.507.038.157,00</u>
Jumlah Pendapatan Usaha Kotor	Rp	390.984.203.210,00
Dikurangi: Reduksi Pendapatan		<u>44.780.253.884,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	346.183.949.346,00
Dikurangi: BEBAN-BEBAN		
Beban Bahan	Rp	35.729.996.978,00
Beban Pemeliharaan		34.823.294.280,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		32.053.805.351,00
Beban Asuransi		1.418.989.577,00
Beban Administrasi Kantor		4.554.055.153,00
Beban Umum		<u>36.739.154.071,00</u>
Jumlah Beban		145.319.295.410,00
Nilai Tambah	Rp	200.864.653.936,00
DISTRIBUSI NILAI TAMBAH		
	Jumlah	% thdp Nilai Tambah
Pegawai	Rp 125.621.191.151,00	62,54%
Kreditor	5.533.840.144,00	2,76%
Lessor	1.520.531.331,00	0,76%
Pemerintah	26.413.633.307,00	13,15%
Masyarakat	5.196.932.480,00	2,59%
Reinvestasi	58.793.780.805,00	29,27%
Koreksi Non-Trading Credit	22.215.255.283,00	-11,07%
Dikurangi: Pendapatan Di Luar Usaha	Rp 200.864.653.936,00	100,00%
Jumlah		

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar (data telah diolah)

5.2.2 Penjelasan Atas Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka berikut ini diuraikan elemen yang merupakan unsur Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar.

1. Pendapatan

Pendapatan selama periode Desember 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp480.387.863.535,00 dan Rp390.964.203.210,00. Uraian pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6
Akun Pendapatan

dalam Rupiah (Rp)

No.	Uraian	Jumlah 2006	Jumlah 2005
	PENDAPATAN		
701	Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal	146.105.052.751,00	115.511.624.562,00
702	Pendapatan Pelayanan Jasa Barang	38.049.482.716,00	31.029.729.328,00
703	Pendapatan Pengusahaan Alat-alat	2.382.810.038,00	1.790.841.184,00
704	Pendapatan Pelayanan Usaha Terminal	39.844.625.151,00	38.190.217.124,00
705	Pendapatan Pelayanan Term. Peti Kemas	128.140.032.271,00	89.052.696.789,00
706	Pendapatan Pengshn Tanah, Bangunan, Ustrik (TBL)	10.152.904.118,00	8.611.906.382,00
707	Pendapatan Pengshn Tanah, Bangunan, Ustrik (TBL)	10.030.642.049,00	8.831.383.895,00
708	Pendapatan Kerja Sama Usaha (KSU)	146.722.342,00	126.380.315,00
709	Pendapatan RS. Pelabuhan/Unit Kes.	75.750.152.107,00	70.312.085.474,00
710	Pendapatan Pelsus/Dersus	29.985.439.992,00	27.507.038.157,00
710	Pendapatan Rupa-rupa Usaha	480.387.863.535,00	390.964.203.210,00
	JUMLAH PENDAPATAN		

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar



2. Pengurang Pendapatan

Pengurang pendapatan adalah terdiri dari reduksi pendapatan dan beban-beban yang dikeluarkan dan bukan merupakan bagian tambahan kemakmuran yang diciptakan oleh perusahaan, karena disediakan oleh unit kegiatan lain dan harus dibayar oleh perusahaan. Dengan demikian maka reduksi pendapatan dan beban-beban yang dikeluarkan tersebut harus menjadi pengurang terhadap total pendapatan yang diperoleh untuk mendapatkan nilai tambah usaha. Uraian reduksi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7

Akun Reduksi Pendapatan

dalam Rupiah (Rp)

No	Uraian	Jumlah 2006	Jumlah 2005
	REDUKSI PENDAPATAN		
721	Reduksi Pelayanan jasa kapal	2.267.186.137,00	2.445.524.377,00
722	Reduksi Pelayanan Jasa Barang	540.376.515,00	329.062.172,00
723	Reduksi Pengusahaan Alat-alat	0,00	0,00
724	Reduksi Pelayanan Usaha Terminal	90.310.048,00	2.207.020.499,00
725	Reduksi Pelayanan Term. Peti Kemas	31.394.010.743,00	19.065.796.079,00
726	Reduksi Pengush. Tanah, Bangunan & Listrik	0,00	0,00
727	Reduksi Kerja Sama Usaha	2.365.909.514,00	1.375.447.180,00
728	Reduksi RS. Pelabuhan/Unit Kes.	0,00	0,00
729	Pelayanan Pelsus/Dersus	19.671.719.720,00	18.384.960.486,00
730	Reduksi Rupa-rupa Usaha	1.544.231.762,00	972.423.071,00
	JUMLAH REDUKSI PENDAPATAN	57.873.744.439,00	44.780.253.864,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar

Tabel 5.8
Daftar Rincian Beban-beban

dalam Rupiah (Rp)			
No.	Uraian	Jumlah 2006	Jumlah 2005
	BEBAN BAHAN		
201	Beban Bahan Bakar	19.879.239.164,00	10.095.443.691,00
202	Beban Bahan Pelumas	982.828.631,00	885.583.807,00
203	Beban Bahan Makanan	3.198.060.533,00	3.259.415.580,00
204	Beban Air	10.757.331.348,00	8.323.972.217,00
205	Beban Listrik	4.506.679.950,00	4.179.969.171,00
206	Beban Telepon	1.215.601.628,00	1.247.270.088,00
207	Beban Obat-obatan	0,00	0,00
208	Beban Bahan Medis	15.056.225,00	15.270.555,00
209	Beban Bahan Pas Pelabuhan	347.156.913,00	295.394.244,00
210	Beban Bahan Pemadam Kebakaran	177.463.300,00	93.035.492,00
211	Beban Perlengkapan	2.837.369.853,00	2.682.629.453,00
213	Insentif Operasional	5.715.518.245,00	4.553.364.430,00
299	Beban Bahan Lainnya	121.107.723,00	98.648.250,00
	JUMLAH	49.753.413.513,00	35.729.996.978,00
	BEBAN PEMELIHARAAN		
301	Beban Pemeliharaan Bangunan Fas. Pelabuhan	6.333.003.628,00	4.261.115.296,00
302	Beban Pemeliharaan Kapal	8.896.202.442,00	9.747.464.405,00
303	Beban Pemeliharaan Alat-alat Fas. Pelabuhan	8.354.191.618,00	8.253.901.511,00
304	Beban Pemeliharaan Instalasi Fas. Pelabuhan	2.032.194.722,00	1.527.226.812,00
305	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	38.212.000,00
306	Beban Pemeliharaan Jalan dan Bangunan	8.175.020.703,00	6.913.123.980,00
307	Beban Pemeliharaan Peralatan	1.717.366.339,00	1.501.209.590,00
308	Beban Pemeliharaan Kendaraan	644.243.521,00	437.062.864,00
309	Pemeliharaan Emplasemen	2.101.440.428,00	2.143.977.822,00
	JUMLAH	38.253.663.401,00	34.823.294.280,00

Tabel 5.8 (Lanjutan)
Daftar Rincian Beban-beban

dalam Rupiah (Rp)

No.	Uraian	Jumlah 2006	Jumlah 2005
	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
401	Beban Penyusutan Bangunan Fas. Pelabuhan	10.143.042.614,00	9.718.243.690,00
402	Beban Penyusutan Kapal	3.122.220.027,00	2.799.642.918,00
403	Beban Penyusutan Alat-alat Fas. Pelabuhan	11.425.345.268,00	10.984.831.682,00
404	Beban Penyusutan Instalasi Fas. Pelabuhan	1.664.788.993,00	1.231.530.416,00
406	Beban Penyusutan Jalan dan Bangunan	2.137.487.294,00	2.266.635.462,00
407	Beban Penyusutan Peralatan	595.058.698,00	538.597.919,00
408	Beban Penyusutan Kendaraan	793.024.148,00	584.588.012,00
409	Beban Penyusutan Emplasemen	820.257.090,00	619.368.083,00
410	Beban Penyusutan Aktiva Tetap Penugasan	15.495.062,00	10.303.812,00
411	Beban Amortisasi Survey Yang Ditangguhkan	457.438.714,00	313.071.713,00
412	Beban Amortisasi Konsultan Yg Ditangguhkan	42.766.229,00	149.064.819,00
413	Beban Amortisasi Yang Ditangguhkan	0,00	0,00
414	Beban Amortisasi Pendidikan Yg Ditangguhkan	1.139.201.674,00	392.322.684,00
415	Beban Amortisasi Pemeliharaan Yg Ditangguhkan	2.272.719.051,00	1.722.005.828,00
416	Beban Amortisasi Akta Pendirian	18.354.104,00	276.203.719,00
417	Beban Amortisasi P. Aplikasi Komputer	11.987.134,00	113.199.589,00
418	Beban Amortisasi HPL Tanah	409.593.314,00	302.046.775,00
419	Beban Amortisasi Rugi Kurs Yg Ditangguhkan	0,00	0,00
425	Beban Amortisasi Monitoring Proyek	0,00	0,00
429	Beban Amortisasi Aplikasi Tarif	34.980.357,00	6.842.395,00
430	Beban Amortisasi Aplikasi Akuntansi Beban	20.178.319,00	25.305.835,00
	JUMLAH	35.123.918.090,00	32.053.805.351,00

Tabel 5.8 (Lanjutan)
Daftar Rincian Beban-beban

dalam Rupiah (Rp)

No.	Uraian	Jumlah 2006	Jumlah 2005
	BEBAN ASURANSI		
501	Beban Asuransi Bangunan Fas. Pelabuhan	83.809.054,00	47.940.829,00
502	Beban Asuransi Kapal	256.570.050,00	191.666.327,00
503	Beban Asuransi Alat-alat Fas. Pelabuhan	968.333.016,00	865.841.355,00
506	Beban Asuransi Jalan dan Bangunan	43.037.160,00	27.766.458,00
507	Beban Asuransi Peralatan	170.000,00	149.049,00
508	Beban Asuransi Kendaraan	73.383.901,00	47.959.657,00
599	Beban Asuransi Lainnya	485.811.077,00	237.665.902,00
	JUMLAH	1.911.114.258,00	1.418.989.577,00
	BEBAN ADMINISTRASI KANTOR		
701	Beban Cetak dan Foto Copy	1.873.080.818,00	1.603.977.360,00
702	Beban Kertas dan Alat Tulis	922.784.680,00	764.462.460,00
703	Beban Pengiriman Surat dan Kawat	118.055.583,00	114.027.824,00
704	Beban Surat Kabar Majalah dan Buletin	174.182.487,00	182.738.509,00
705	Beban Rapat dan Jamuan	448.730.386,00	384.699.974,00
706	Beban Rumah Tangga	1.086.081.738,00	814.211.867,00
709	Beban Administrasi Bank	89.308.889,00	135.692.361,00
799	Beban Administrasi Lainnya	443.922.478,00	554.244.798,00
	JUMLAH	5.156.147.059,00	4.554.055.153,00
	BEBAN UMUM		
802	Beban Penyisihan Piutang	13.123.711.956,00	379.543.011,00
803	Beban Penagihan Piutang	227.130.206,00	204.356.021,00
804	Beban Keamanan Pelabuhan	3.306.520.125,00	2.948.673.388,00
805	Beban Survey	658.194.669,00	779.702.549,00

5.2.3 Distribusi Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar

Nilai tambah merupakan besarnya kekayaan yang diciptakan untuk *stakeholders*, yaitu mereka yang mempertahankan sumber daya dalam perusahaan agar perusahaan bisa melakukan kegiatan produksi dan distribusinya dengan baik. Karena para *stakeholders* telah berpartisipasi dalam penciptaan nilai tambah, maka mereka berhak memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dalam bentuk distribusi nilai tambah, diantaranya adalah:

a. Distribusi nilai tambah kepada pegawai

Distribusi nilai tambah kepada pegawai diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus dan lain-lain. Tabel di bawah ini menunjukkan besarnya distribusi nilai tambah untuk para pegawai tahun 2006 dan 2005.

Tabel 5.9

Akun Distribusi Nilai Tambah Kepada Pegawai

No.	Uraian	dalam Rupiah (Rp)	
		Jumlah 2006	Jumlah 2005
1	Beban Gaji Direksi	4.126.460.476,00	3.666.761.858,00
2	Beban Gaji Pegawai	29.305.087.793,00	20.971.816.629,00
3	Beban Tunjangan Prestasi	25.552.090.052,00	26.949.155.735,00
4	Beban Tunjangan Khusus Pajak Penghasilan	0,00	0,00
5	Beban Lembur	152.651.617,00	122.960.450,00
6	Beban Tunjangan Air, Listrik dan Telpon	0,00	0,00
7	Beban Tunjangan Jabatan	3.282.095.213,00	2.780.319.754,00
8	Beban Bonus	17.250.000.000,00	14.740.000.000,00
9	Beban Biaya Pegawai Lainnya	498.576.581,00	156.916.126,00
10	Beban Asuransi kecelakaan Kerja	352.642.720,00	429.202.948,00
11	Beban Upah Buruh/Tenaga Kerja	20.402.998.500,00	18.817.301.347,00
12	Beban Perjalanan Dinas	8.335.432.167,00	7.044.576.336,00
13	Beban Pesangon Ganti Rugi	9.579.425.003,00	4.917.751.120,00
14	Beban Olah Raga dan Kesenian	504.735.418,00	386.209.022,00
15	Beban Pakaian Dinas dan Kerja	1.012.769.239,00	944.308.827,00
16	Beban Pendidikan dan Latihan	2.930.065.624,00	2.815.247.569,00
17	Beban Iuran Dana Pensiun	7.524.825.079,00	13.219.127.794,00
18	Beban Dewan Komisaris	2.330.453.479,00	2.083.177.812,00
19	Beban Perawatan Kesehatan	6.529.935.753,00	5.576.357.824,00
	Jumlah	139.670.244.614,00	125.621.191.151,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar (data telah diolah)

b. Distribusi nilai tambah kepada penyedia dana

Distribusi nilai tambah kepada penyedia dana pada tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp2.782.726.922,00 dan Rp5.533.840.144,00.

c. Distribusi nilai tambah kepada Lessor

Distribusi nilai tambah kepada Lessor, dimana PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV harus membayar beban sewa bangunan Fas. Pelabuhan, sewa peralatan, sewa kapal dan lain-lain yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini

Tabel 5.10
Akun Distribusi Nilai Tambah Kepada Lessor

dalam Rupiah (Rp)

No.	Uraian	Jumlah 2006	Jumlah 2005
1	Beban Sewa Bangunan Fas. Pelabuhan	6.150.000,00	682.986,00
2	Beban Sewa Kapal	480.819.250,00	355.304.800,00
3	Beban Sewa Alat-alat Fas. Pelabuhan	71.306.116,00	637.813.935,00
4	Beban Sewa Jalan dan Bangunan	299.930.110,00	188.589.020,00
5	Beban Sewa Peralatan	0,00	0,00
6	Beban Sewa Kendaraan	222.639.000,00	197.722.500,00
7	Beban Sewa Lainnya	721.770.583,00	130.417.990,00
	Jumlah	1.802.615.059,00	1.520.531.331,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar (data telah diolah)

d. Distribusi nilai tambah kepada Pemerintah

Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah merupakan distribusi nilai tambah. Untuk tahun 2006 PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar memperoleh kenaikan tingkat laba, sehingga pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan tahun 2005.

Tabel 5.11
Akun Distribusi Nilai Tambah Kepada Pemerintah

No.	Uraian	dalam Rupiah (Rp)	
		Jumlah 2006	Jumlah 2005
1	Beban Pajak Bumi dan Bangunan	4.726.366.891,00	4.174.614.923,00
2	Beban Pajak Kendaraan	358.554.972,00	225.720.265,00
3	PPH Badan	28.813.222.266,00	22.013.298.119,00
	Jumlah	33.996.144.129,00	26.413.633.307,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar (data telah diolah)

e. Distribusi nilai tambah kepada Masyarakat

Distribusi nilai tambah kepada masyarakat pada tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp6.745.423.768,00 dan Rp5.196.932.480,00. Rinciannya adalah sebagai berikut

Tabel 5.12
Akun Distribusi Nilai Tambah Kepada Masyarakat

No.	Uraian	dalam Rupiah (Rp)	
		Jumlah 2006	Jumlah 2005
1	Beban Bantuan Sosial	6.615.089.714,00	5.089.118.385,00
2	Beban Operasional PKBL	130.334.054,00	107.814.095,00
	Jumlah	6.745.423.768,00	5.196.932.480,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar (data telah diolah)

f. Distribusi nilai tambah kepada perusahaan

Distribusi nilai tambah kepada perusahaan merupakan laba/rugi setelah pajak PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar pada tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp74.006.122.764,00 dan Rp58.793.780.806,00. Nilai tambah yang diterima oleh perusahaan untuk reinvestasi merupakan sumber dana untuk mempertahankan keberadaan perusahaan dan mengembangkan perusahaan.

5.2.4 Analisis Laporan Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar

Laporan keuangan yang disusun pada akhir periode akuntansi merupakan laporan pertanggungjawaban PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar kepada pemerintah. Laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban perusahaan dalam menjalankan misinya sebagai entitas ekonomi atau bisnis yang bertujuan untuk mencari laba yang identik dengan kepentingan *shareholders* saja.

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar merupakan BUMN yang menjalankan usahanya dibidang pelayanan jasa kepelabuhanan, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa BUMN memiliki dua peranan utama yaitu disatu sisi BUMN sebagai satu kesatuan usaha yang mengharuskannya untuk mempertahankan kelangsungan operasionalnya dan di sisi lain BUMN juga sebagai satu kesatuan usaha yang diharapkan oleh pemerintah dapat memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga laporan keuangannya tidak menggambarkan misi BUMN yang sebenarnya. Jasa kepelabuhanan yang ditawarkan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV

merupakan pelaksanaan dan penunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan serta untuk memupuk keuntungan bagi perusahaan. Jasa yang diberikan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat luas sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab sosial.

Laporan nilai tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV dapat memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban perusahaan dalam menjalankan misi sosialnya sebagai wahana pembangunan. Dalam laporan nilai tambah disajikan mengenai besarnya nilai tambah yang diciptakan dan bagaimana nilai tambah tersebut didistribusikan kepada para partisipan atau pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan nilai tambah.

5.2.5 Ratio-ratio Nilai Tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar

Pada umumnya pengukuran kinerja keuangan perusahaan dinyatakan dalam tingkat produktivitas dan efisiensi. Laporan keuangan konvensional merupakan sumber data utama untuk mengukur kinerja keuangan. Namun, jika pengukuran kinerja hanya berdasarkan pada laporan keuangan konvensional, umumnya masyarakat masih sulit dalam menentukan seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap para *stakeholders*-nya (pemegang saham, karyawan, pemerintah, pemasok & kreditor). Meskipun telah lama dan lazim digunakan namun bentuk laporan keuangan tersebut tidak dapat segera memberikan informasi mengenai distribusi

keuntungan terhadap kelompok-kelompok *stakeholders* yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam mengelola sumber daya perusahaan.

Kriteria produktivitas dan efisiensi hendaknya relevan dengan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Ratio yang digunakan BUMN sekarang dalam mengukur kinerja menggunakan *Return On Investment* (ROI). Efisiensi berdasarkan ROI ditentukan dari besarnya laba operasi dibagi dengan rata-rata aktiva operasional (Garrison & Noreen, 2000: 603).

Ratio-ratio nilai tambah sangat cocok digunakan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV sebagai BUMN dalam mengevaluasi kinerja dengan cara melakukan perbandingan dengan ratio tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai alat perencanaan untuk periode selanjutnya.

1. Ratio Distribusi Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam perusahaan, sehingga pihak-pihak tersebut mempunyai hak yang sama terhadap nilai tambah sesuai dengan kontribusi mereka.

Ratio Distribusi Nilai Tambah (Pegawai, Lessor, Pemerintah, Masyarakat, Kreditor dan Reinvestasi). Ratio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah Distribusi Nilai Tambah Yang Diterima}}{\text{Jumlah Nilai Tambah}}$$

Besarnya ratio distribusi nilai tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar untuk tahun 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut:

a. Ratio distribusi nilai tambah untuk Pegawai:

$$\text{Tahun 2006: } \frac{139.670.244.614,00}{245.846.493.021,00} = 56,81\%$$

$$\text{Tahun 2005: } \frac{125.621.191.151,00}{200.864.653.936,00} = 62,54\%$$

b. Ratio distribusi nilai tambah untuk Kreditor:

$$\text{Tahun 2006: } \frac{2.782.726.922,00}{245.846.493.021,00} = 1,13\%$$

$$\text{Tahun 2005: } \frac{5.533.840.144,00}{200.864.653.936,00} = 2,76\%$$

c. Ratio distribusi nilai tambah untuk Lessor:

$$\text{Tahun 2006: } \frac{1.802.615.059,00}{245.846.493.021,00} = 0,73\%$$

$$\text{Tahun 2005: } \frac{1.520.531.331,00}{200.864.653.936,00} = 0,76\%$$

d. Ratio distribusi nilai tambah untuk Pemerintah:

$$\text{Tahun 2006: } \frac{33.996.144.129,00}{245.846.493.021,00} = 13,83\%$$

$$\text{Tahun 2005: } \frac{26.413.633.307,00}{200.864.653.936,00} = 13,15\%$$

e. Ratio distribusi nilai tambah untuk Masyarakat:

$$\text{Tahun 2006: } \frac{6.745.423.768,00}{245.846.493.021,00} = 2,74\%$$

$$\text{Tahun 2005: } \frac{5.196.932.480,00}{200.864.653.936,00} = 2,59\%$$

f. Ratio distribusi nilai tambah untuk Reinvestasi:

$$\text{Tahun 2006: } \frac{74.006.122.764,00}{245.846.493.021,00} = 30,10\%$$

$$\text{Tahun 2005: } \frac{58.793.780.806,00}{200.864.653.936,00} = 29,27\%$$

Tabel 5.13
Ratio Distribusi Nilai Tambah
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar
Tahun 2006 dan 2005

	2006	2005	% Perubahan
Pegawai	56,81%	62,54%	5,73%
Kreditor	1,13%	2,76%	1,63%
Lessor	0,73%	0,76%	0,03%
Pemerintah	13,83%	13,15%	0,68%
Masyarakat	2,74%	2,59%	0,15%
Reinvestasi	30,10%	29,27%	0,83%

e. Ratio distribusi nilai tambah untuk Masyarakat:

$$\text{Tahun 2006: } \frac{6.745.423.768,00}{245.846.493.021,00} = 2,74\%$$

$$\text{Tahun 2005: } \frac{5.196.932.480,00}{200.864.653.936,00} = 2,59\%$$

f. Ratio distribusi nilai tambah untuk Reinvestasi:

$$\text{Tahun 2006: } \frac{74.006.122.764,00}{245.846.493.021,00} = 30,10\%$$

$$\text{Tahun 2005: } \frac{58.793.780.806,00}{200.864.653.936,00} = 29,27\%$$

Tabel 5.13

Ratio Distribusi Nilai Tambah

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar

Tahun 2006 dan 2005

	2006	2005	% Perubahan
Pegawai	56,81%	62,54%	5,73%
Kreditor	1,13%	2,76%	1,63%
Lessor	0,73%	0,76%	0,03%
Pemerintah	13,83%	13,15%	0,68%
Masyarakat	2,74%	2,59%	0,15%
Reinvestasi	30,10%	29,27%	0,83%

2. Ratio untuk mengukur kontribusi pekerja terhadap nilai tambah yang terjadi dan meramalkan kecenderungan dalam biaya tenaga kerja, serta digunakan dalam negosiasi gaji, yaitu:

$$= \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Upah}}$$

Ratio produktivitas tenaga kerja PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar untuk tahun 2006 dan 2005 adalah:

$$\text{Tahun 2006: } \frac{245.846.493.021,00}{80.166.961.732,00} = 306,67\%$$

$$\text{Tahun 2005: } \frac{200.864.653.936,00}{69.387.930.552,00} = 289,48\%$$

3. Ratio untuk menentukan derajat integrasi vertikal pada suatu kelompok perusahaan. Ratio ini juga dapat dijadikan sebagai indeks daya tahan perusahaan terhadap perubahan pasokan bahan dan jasa

$$= \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Penjualan}}$$

Perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2006: } \frac{245.846.493.021,00}{435.670.903.331,00} = 56,43\%$$

$$\text{Tahun 2005: } \frac{200.864.653.936,00}{368.399.204.629,00} = 54,52\%$$



4. Ratio Produktivitas Modal

$$= \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Modal}}$$

Perhitungannya sebagai berikut:

Tahun 2006:	$\frac{245.846.493.021,00}{817.271.793.424,00}$	= 30,08%
Tahun 2005:	$\frac{200.864.653.936,00}{704.101.509.860,00}$	= 28,53%

5. Ratio Produktivitas Aktiva

$$= \frac{\text{Nilai Tambah}}{\text{Aktiva}}$$

Perhitungannya sebagai berikut:

Tahun 2006:	$\frac{245.846.493.021,00}{971.316.509.726,00}$	= 25,31%
Tahun 2005:	$\frac{200.864.653.936,00}{832.867.397.859,00}$	= 24,12%

Tabel 5.14
Ratio Distribusi Nilai Tambah
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar
Tahun 2006 dan 2005

	2006	2005	% Perubahan
Nilai Tambah/Upah	306,67%	289,48%	17,19%
Nilai Tambah/Penjualan	56,43%	54,52%	1,91%
Nilai Tambah/Modal	30,08%	28,53%	1,55%
Nilai Tambah/Aktiva	25,31%	24,12%	1,19%

5.2.6 Pegukuran Kinerja Keuangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar Berdasarkan Laporan Nilai Tambah

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV pada tahun 2005 menghasilkan nilai tambah sebesar Rp200.864.653.936,00 atau sebesar 58,02% dari total pendapatan perusahaan sebesar Rp346.183.949.346,00, dari jumlah tersebut pegawai mendapat distribusi nilai tambah terbesar yaitu Rp125.621.191.151,00 atau 62,54%. Untuk penyedia dana dan Lessor masing-masing mendapat nilai tambah sebesar Rp5.533.840.144,00 (2,76%) dan Rp1.520.531.331,00 (0,76%), sedangkan pemerintah mendapat 13,15% dari total nilai tambah sebesar Rp26.413.633.307,00. Perusahaan mendapatkan nilai tambah sebesar 29,27% atau Rp58.793.780.806,00 dan masyarakat mendapat nilai tambah 2,59% atau sebesar Rp5.196.932.480,00.

Pada tahun 2006 PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV menghasilkan nilai tambah sebesar Rp245.846.493.021,00 atau sebesar 58,19% dari pendapatan perusahaan sebesar Rp422.514.119.096,00. Dari jumlah tersebut pegawai mendapat distribusi nilai tambah sebesar Rp139.670.244.614,00 atau 56,81%, jumlah tersebut menunjukkan besarnya nilai tambah yang diciptakan oleh pegawai, dengan adanya informasi yang jelas tentang pendistribusian atas penciptaan nilai tambah akan lebih memotivasi pegawai untuk bekerja lebih kooperatif dan lebih memahami perusahaan. Sedangkan untuk penyedia dana memperoleh nilai tambah sebesar Rp2.782.726.922,00 atau 1,13% dan untuk lessor 0,73% atau sebesar Rp1.802.615.059,00, jumlah tersebut menunjukkan bahwa manajemen perusahaan telah memenuhi kewajiban dan mendistribusikannya secara adil. Sedangkan

pemerintah dan perusahaan mendapatkan nilai tambah masing-masing sebesar Rp33.996.144.129,00 (13,83%) dan Rp74.006.122.764,00 (30,10%), jumlah tersebut dapat digunakan perusahaan untuk memprediksi dan mendeteksi keadaan ekonomi di masa yang akan datang yang dapat mempengaruhi kesehatan perusahaan sedangkan pemerintah dapat menggunakan nilai tambah tersebut untuk menambah penerimaan pemerintah. Distribusi nilai tambah kepada masyarakat sebesar Rp6.745.423.768,00 (2,74%), pendistribusian nilai tambah yang adil dan demokratis termasuk pendistribusian kepada masyarakat, dimana masyarakat juga berperan atas kelancaran dan keamanan usaha perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan tidak hanya menciptakan *social cost* tapi juga *social benefit* yang hasilnya adalah *socio-economic profit*.

Berdasarkan laporan nilai tambah tahun 2005 dan 2006, kinerja PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV secara umum menunjukkan peningkatan atau kenaikan. Nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp245.846.493.021,00 mengalami peningkatan/kenaikan sebesar Rp44.981.839.085,00 dibanding pada tahun 2005 sebesar Rp200.864.653.936,00.

Ratio nilai tambah untuk perusahaan pada tahun 2006 sebesar Rp74.006.122.764,00 (30,10%) meningkat sekitar 0,83% dibandingkan pada tahun 2005 sebesar Rp58.793.780.806,00 (29,27%). Peningkatan lain ditunjukkan pula pada ratio nilai tambah untuk Pemerintah dan Masyarakat yaitu; distribusi nilai

tambah untuk pemerintah meningkat sebesar 0,68% dan distribusi nilai tambah untuk masyarakat sebesar 0,15%.

Peningkatan distribusi nilai tambah tersebut masing-masing disebabkan karena, pertama, ratio pajak per nilai tambah yang mengukur peran pemerintah dalam perusahaan mengalami peningkatan akibat kenaikan keuntungan penjualan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar pada tahun 2006, dan yang kedua, distribusi nilai tambah untuk masyarakat meningkat karena nilai tambah yang didistribusikan dalam bentuk dana bantuan sosial dan dana operasional PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) bertambah.

Ratio distribusi nilai tambah untuk pegawai berupa gaji, tunjangan-tunjangan dan lain-lain mengalami penurunan sekitar 5,73% atau sebesar Rp14.049.053.463,00. Hal ini disebabkan karena peningkatan distribusi nilai tambah untuk pegawai yang diikuti dengan peningkatan pada nilai tambah itu sendiri.

Ratio distribusi nilai tambah untuk kreditor juga mengalami penurunan sekitar 1,63% atau sebesar Rp2.751.113.222,00. Hal ini disebabkan karena beban bunga pinjaman jangka panjang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar mengalami penurunan. Penurunan distribusi nilai tambah juga dialami oleh lessor, hal ini disebabkan karena peningkatan distribusi nilai tambah untuk lessor yang diikuti dengan peningkatan pada nilai tambah itu sendiri.

Ratio nilai tambah per upah yang tidak lain merupakan ratio produktivitas karyawan yang secara sederhana dapat diartikan sebagai banyaknya unit nilai tambah

yang dapat dihasilkan oleh setiap unit karyawan mengalami peningkatan sebesar 17,19% yaitu 289,48% pada tahun 2005 dan naik menjadi 306,67% pada tahun 2006.

Ratio nilai tambah per penjualan secara sederhana mengukur berapa nilai tambah yang dapat dihasilkan dari setiap penjualan dimana ratio ini digunakan untuk menentukan derajat integrasi vertikal pada suatu kelompok perusahaan. Selain itu, ratio ini juga dapat dijadikan sebagai indeks daya tahan perusahaan terhadap perubahan pasokan bahan dan jasa. Ratio ini juga mengalami peningkatan yang semula 54,52% pada tahun 2005 naik menjadi 56,43% pada tahun 2006. Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar.

Pada tahun 2006 produktivitas modal PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar mengalami peningkatan sekitar 1,55%, hal ini dikarenakan jumlah ekuitas dan cadangan mengalami kenaikan sebesar Rp113.170.283.564,00. Peningkatan lain juga ditunjukkan pada produktivitas aktiva dari 24,12% pada tahun 2005 menjadi 25,31% pada tahun 2006, peningkatan ini dikarenakan total aktiva pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp138.449.111.867,00.

BAB VI

PENUTUP

6.1 SIMPULAN

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan jasa yang berfungsi menyediakan, melaksanakan dan mengusahakan sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan. Adapun jasa kepelabuhanan yang ditawarkan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan serta untuk memupuk keuntungan bagi perusahaan, dalam penyajian laporan laba rugi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar menerapkan teori entitas yang merupakan bagian dari konsep ekuitas, informasi yang disajikan hanya terbatas untuk para pemegang saham dan kreditor saja sehingga pertanggungjawaban PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar sebagai BUMN hanya memenuhi satu peranannya saja yaitu melaksanakan fungsi komersil dengan memupuk keuntungan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sedangkan pertanggungjawaban pada peranannya sebagai BUMN lainnya tidak dilaksanakan yaitu fungsi non komersilnya, dalam hal ini BUMN bertindak sebagai wahana pembangunan. Dengan menerapkan *value added statement* sebagai pelengkap laporan keuangan perusahaan dapat memperluas lingkup informasi laporan keuangan. Sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya terbatas untuk *shareholders* tapi juga untuk *stakeholders*.

Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan *value added statement* dianggap lebih baik karena relevan dengan misi utama perusahaan sebagai BUMN. Ratio-ratio yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan dapat memperlihatkan total produktivitas dari perusahaan dan bagaimana efisiensi perusahaan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah.

Berdasarkan hasil analisis laporan nilai tambah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar untuk tahun 2005 dan 2006 dan hasil perhitungan ratio-ratio nilai tambah terlihat bahwa kinerja perusahaan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, walaupun ada beberapa yang mengalami penurunan yang ditunjukkan pada ratio distribusi nilai tambah untuk pegawai, kreditor dan lessor. Penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan distribusi nilai tambah yang diikuti dengan peningkatan pada nilai tambah itu sendiri, kecuali untuk kreditor.

Total nilai tambah pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp44.981.839.085,00 dari tahun 2005. Dimana peningkatan nilai tambah didistribusikan untuk pegawai sebesar Rp14.049.053.463,00, lessor sebesar Rp282.083.728,00, pemerintah sebesar Rp7.582.510.822,00, masyarakat sebesar Rp1.548.491.288,00 dan perusahaan sebesar Rp15.212.341.958,00. Dan untuk koreksi *non-trading credits* mengalami penurunan sebesar Rp9.058.471.048,00, dimana besarnya penurunan tersebut menambah besarnya nilai tambah. Sedangkan pendistribusian nilai tambah untuk kreditor mengalami penurunan disebabkan beban bunga pinjaman jangka panjang perusahaan mengalami penurunan sekitar 1,41%

atau sebesar Rp2.751.113.222,00 yang diikuti dengan peningkatan pada nilai tambah itu sendiri.

Terlepas dari adanya beberapa kelemahan *value added statement* dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional, namun *value added statement* cukup bermanfaat dalam menganalisis kontribusi perusahaan terhadap para *stakeholders* langsung maupun tidak langsung.

6.2 SARAN

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar sebaiknya menyajikan *value added statement* sebagai pelengkap laporan keuangan perusahaan. Dengan menyajikan *value added statement* maka perusahaan telah melaksanakan seluruh peranannya sebagai BUMN yaitu disatu sisi sebagai satu kesatuan usaha yang diharapkan oleh pemerintah dapat memenuhi hajat hidup orang banyak dan di sisi lain sebagai satu kesatuan usaha yang mengharuskannya untuk tetap mempertahankan kelangsungan usahanya. *Value added statement* memberikan informasi mengenai distribusi keuntungan dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap kelompok-kelompok *stakeholders* yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam mengelola sumber daya perusahaan. Selain itu, dengan menggunakan *value added statement* dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena dianggap lebih adil dan demokratis, sehingga hubungan antara masing-masing pihak yang bekerja dalam satu tim lebih harmonis karena masing-masing nilai tambah yang diberikannya diukur.

DAFTAR PUSTAKA



- Baso, Lucky. 2000. "Aplikasi Laporan Nilai Tambah Sebagai Alternatif Dasar Penilaian Kinerja BUMN: Studi Kasus Perum Pegadaian", *Skripsi* pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bawazier, Fuad. (Juli 1992). "Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Sumber Daya Manusia Pada Badan Usaha Milik Negara". *Usahawan* hal. 14-20.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 1995. *Accounting Theory*. Third Edition. New York: The Oryden Press.
- Choi, Frederik D. S. and Gerhard G. Mueller. 1992. "Financial Reporting and Disclosure". *International Accounting*. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Climo, Tom. (Februari 1976). "What's Happening in Britain?". *The Journal of Accountancy*.
- Garrison, Ray H. dan Noreen, Eric W. 2000. *Akuntansi Manajerial*. (Terjemahan A. Totok Budisantoso, Buku Satu). Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2005. *Teori Akuntansi*. Ed. Revisi, 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hayat, Atma. 1989. "Enterprise Concept Sebagai Alternatif Pengukuran Efisiensi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)". *isu-isu Temporer Akuntansi*. Editor Goedono. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hendriksen, Eldon S. and Michael F. Van Breda. 1992. *Accounting Theory*. Fifth Edition. Homewood, IL Illinois: Richard D. Irwin Inc.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kam, Vernon. 1990. *Accounting Theory*. Second Edition. New York: John Wiley and Sons.
- Morley, Michael F. (Juli 1979). "The Value Added Statement in Britain". *Accounting Review*.
- Sarga, Ida Bagus Putu. (September 1992). "Peran Kelembagaan BUMN Dalam Sistem Perekonomian Indonesia dan Prospeknya". *Usahawan*.

- Sudibyo, Bambang. 1990. "Kemungkinan Pengembangan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No. 1 Th. V, hal. 31.
- Suwaldiman. "Tujuan Pelaporan Keuangan". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, hal. 55-61. STIE YKPN.
- Suwardjono. 1989. *Seri Teori Akuntansi: Perencanaan Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- , 1992. *Gagasan Pengembangan Profesi dan Pendidikan Akuntansi di Indonesia: Kumpulan Artikel*. Yogyakarta: BPFE.
- Soemarso, SR. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Lima (Revisi), Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, Theodorus M. 1985. *Teori Akuntansi*. Buku Dua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

LAMPIRAN



8. Realisasi Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2006

a. Neraca

PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
NERACA KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005

(Dalam Rupiah)

AKUN	AKTIVA	PER 31/12/2006 (AUDITED)	PER 31/12/2005 (AUDITED)	AKUN	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	PER 31/12/2006 (AUDITED)	PER 31/12/2005 (AUDITED)
I	AKTIVA LANCAR			II	KEWAJIBAN LANCAR		
101	Kas dan setara kas	150.798.642,368	59.291.074,017	401	Hutang usaha	10.694.303,885	4.341.075,291
102	Kereta Berharga dan Deposito	45.100.000	49.130.000	402	Hutang reduksi pendapatan	6.058.579,225	6.661.769,634
103	Piutang usaha :			403	Uang pinjam	1.811.448,594	1.235.279,413
	- Piutang yang mempunyai hubungan istimewa - setelah dikurangi penyisihan piutang Rp.724.421.514,- dan Rp.683.789.120,- untuk tahun 2006 dan 2005.	8.025.267,286	6.638.487,185	404	Uang titipan	4.862.842,929	4.850.688,720
	- Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang Rp.4.984.145.932,- dan Rp.3.159.491.671 untuk tahun 2006 dan 2005.	33.566.097,658	19.909.821,018	405	Hutang J.Panjang yg akan tempo	3.510.545,801	3.433.493,576
105	Piutang lain-lain - bersih	4.010.015,174	15.814.419,142	408	Hutang pajak penghasilan badan	9.391.122,253	7.042.941,953
106	Uang muka	874.215,627	620.666,441	409	Hutang pajak lainnya	1.223.211,077	-
107	Persediaan - bersih	2.414.740,483	2.383.089,900	410	Hutang dana pensiun	0	0
108	Angguran pajak penghasilan badan	0	0	411	Beban yang masih harus dibayar	29.328.138,951	24.382.272,129
109	Pajak masukan	0	0	412	Pendapatan yang diterima dimaka	2.636.532,510	3.329.039,049
111	Beban dibayar dimaka	1.580.481,900	852.346,010	421	Hutang bunga pinjaman	0	0
112	Pendapatan yang masih akan diterima	8.268.038,263	5.736.949,894	443	Hutang lancar lainnya	5.764.049,134	4.717.717
	JUMLAH AKTIVA LANCAR	210.503.348,979	112.565.583,637		JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	86.910.884,439	52.684.259,492
B	AKTIVA TIDAK LANCAR			IV	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN		
A	AKTIVA TETAP			500	Kewajiban pajak tangguhan	21.043.611,855	20.214.847,438
201	Bangunan fasilitas pelabuhan	474.507.293,915	417.410.734,801		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
202	K e p a t	61.358.744,287	61.267.386,267	501	Kewajiban imbalan pasca kerja	24.995.986,732	19.126.337,887
203	Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	240.046.242,835	239.658.720,802	502	Hutang kepada pemerintah	20.519.260,931	24.023.806,726
204	Instalasi Fasilitas Pelabuhan	30.187.810,691	29.510.690,414	512	Prodapatan diterima dimaka jk panjang	5.519.950,384	6.461.440,456
211	T e n a h	45.632.291,233	43.968.073,158	513	Hutang wajo jaminan	49.100,000	49.100,000
212	Jalan dan Bangunan	57.969.046,135	59.651.975,629		JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	62.069.393,047	49.666.741,969
213	Peralatan	8.570.060,977	8.342.077,895	V	EKUITAS DAN CADANGAN		
221	Kendaraan	8.331.154,947	5.745.279,834	601	Modal :		
222	Emplasmen	21.382.669,827	21.173.568,156		Modal dasar sebanyak 522.000 lembar saham nominal Rp. 1.000.000,- per lembar yang seluruhnya merupakan saham biasa dan sebanyak 133.000 lembar telah ditempatkan dan dicatat penuh.	133.000.000,000	133.000.000,000
	HARGA PEROLEHAN AK PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	848.026.514,687	888.128.513,076	602	Cadangan modal	217.624.256,549	217.624.256,549
B	Aktiva Dalam Konstruksi	17.403.097,593	4.716.703,162	590	Bantuan Pemerintah Yang Belum Dibentuk Statusnya (BPYBOS)	252.523.701,100	200.629.540,300
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	749.006.884,816	794.291.382,648	621	Saldo laba yang dicadangkan	140.117.713,011	94.053.932,205
				632	Laba tahun berjalan	74.006.122,764	56.703.780,806
					JUMLAH EKUITAS DAN CADANGAN	817.271.792,424	704.191.509,860
C	AKTIVA LAIN-LAIN				TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	971.216.809,726	832.667.397,859
311	Seban yang ditanggungkan - bersih	11.829.262,117	12.375.767,296				
312	Aktiva tetap tak berfungsi - bersih	287.132,755	130.350,830				
313	Uang Jaminan	252.481,933	243.133,431				
315	Aktiva tetap penugasan - bersih	103.071,753	113.649,091				
316	Aktiva tetap belum berfungsi	41.721,684	41.731,684				
329	Aktiva lain-lain	76.574,690	3.110.018,267				
	JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	11.829.262,117	16.029.660,604				
	TOTAL AKTIVA	879.216.809,726	832.667.397,859				



b. Perhitungan Laba Rugi

PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
LAPORAN LABA - RUGI
PER PUSAT PELAYANAN
UNTUK PERIODE 12 (DUA BELAS) BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 DAN 2005

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2005 (AUDITED)	RKAP TAHUN 2006	TAHUN 2006 (AUDITED)	TREND %	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal	115,511,924,562	123,050,655,000	146,105,052,751	126.48	118.74
2	Pendapatan Pelayanan Jasa Barang	31,029,729,328	34,702,950,000	38,049,482,716	122.62	109.64
3	Pendapatan Pengusahaan Alat-alat	1,790,841,184	1,976,538,000	2,382,810,038	133.06	60.68
4	Pendapatan Pelayanan Usaha Terminal	38,190,217,124	34,905,770,000	39,644,625,151	103.81	113.58
5	Pendapatan Pelayanan Terminal Peti Kemas	89,052,656,769	88,657,177,000	128,140,032,271	143.89	144.53
6	Pendapatan Pengusahaan Tanah, Bangunan, Listrik (TBL)	8,611,906,382	9,767,974,000	10,152,904,118	117.89	109.61
7	Pendapatan Kerja Sama Usaha	8,831,383,895	8,932,719,000	10,030,542,049	113.58	112.29
8	Pendapatan Rumah Sakit Pelabuhan/Unit Kesehatan	126,380,315	115,446,000	146,722,342	116.10	127.09
9	Pendapatan Pelabuhan/Dermaga Khusus (Pelsus/Dermus)	70,312,085,474	76,188,795,000	75,750,152,107	107.73	99.42
10	Pendapatan Rupa-rupa Usaha	27,507,038,157	27,937,175,000	29,985,439,992	109.01	107.33
	Jumlah Pendapatan Usaha Kotor	(A) 390,964,203,210	407,680,199,000	480,387,863,535	122.87	117.83
11	Reduksi Pendapatan	(B) 44,780,253,864	47,021,586,000	57,873,744,419	129.24	123.08
	Jumlah Pendapatan Usaha Bersih	(A - B) = (C) 346,183,949,346	360,658,613,000	422,514,119,096	122.05	117.15
II	BEBAN USAHA					
1	Beban Operasi Langsung					
a.	Beban Pelayanan Jasa Kapal	51,793,915,671	59,465,884,000	62,863,087,008	121.37	105.71
b.	Beban Pelayanan Jasa Barang	16,696,851,760	17,783,307,000	16,189,135,496	96.96	91.04
c.	Beban Pengusahaan Alat-alat	2,896,491,368	2,963,259,000	3,320,967,490	114.66	112.07
d.	Beban Pelayanan Usaha Terminal	20,271,876,233	18,765,685,000	18,750,901,322	92.50	99.92
e.	Beban Pelayanan Terminal Peti Kemas	32,263,807,217	32,261,122,000	42,368,807,873	131.32	131.33
f.	Beban Pengusahaan Tanah, Bangunan, Listrik (TBL)	1,450,699,446	2,125,361,000	730,979,331	50.39	34.39
g.	Beban Kerja Sama Usaha	213,747,591	264,896,000	255,707,724	119.63	96.53
h.	Beban Rumah Sakit Pelabuhan / Unit Kesehatan	773,933,961	1,117,184,000	901,512,551	116.48	80.70
g.	Beban Pelabuhan/Dermaga Khusus (Pelsus/Dermus)	2,298,822,952	2,675,540,000	2,332,487,700	101.46	87.18
j.	Beban Rupa-rupa Usaha	10,899,697,110	13,124,247,000	12,239,078,714	112.29	93.26
	Jumlah Beban Operasi Langsung	(D) 139,559,834,309	150,546,494,000	159,852,665,209	114.61	106.25
2	Beban Operasi Tidak Langsung	(E) 17,740,685,441	17,845,619,000	20,182,668,056	113.76	113.10
3	Beban Penunjang Operasi	(F) 61,753,345,934	67,372,545,000	67,122,197,158	108.69	99.63
	Jumlah Beban Operasi	(D + E + F) = (G) 219,053,865,684	235,764,658,000	247,157,830,423	112.88	104.87
	Laba Kotor	(C - G) = (H) 127,130,083,662	124,893,955,000	175,356,288,673	137.86	140.32
4	Beban Pengkanaan Laba Usaha	(I) 43,715,398,930	43,867,238,000	53,393,761,130	122.14	121.72
		(H - I) = (J) 83,414,684,732	81,026,717,000	121,962,527,543	146.09	150.40
III	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN					
1	Pendapatan Di luar Usaha	(K) 22,215,255,283	35,141,018,000	13,156,784,235	59.22	37.44
2	Beban Di luar Usaha	(L) 24,822,861,090	34,622,815,000	32,899,966,748	129.32	92.71
	Selisih Pendapatan dan Beban Lain-lain Laba Sebelum Pos Luar Biasa	(K - L) = (M) (2,607,605,807)	518,203,000	(18,943,182,513)	726.46	(3,655.55)
		(J + M) = (N) 80,807,078,925	81,544,920,000	102,919,345,030	127.36	126.21
IV	PENDAPATAN DAN BEBAN POS LUAR BIASA					
1	Pendapatan Pos Luar Biasa	(O) -	-	-		
2	Beban Pos Luar Biasa	(P) -	-	-		
	Selisih Pendapatan dan Beban Pos Luar Biasa Laba Sebelum Pajak	(Q) -	-	-		
		(N + R) = (S) 80,807,078,925	81,544,920,000	102,919,345,030	127.36	126.21
		(T) 22,013,298,119	24,550,739,773	28,913,222,266	131.34	117.77
V	TAKSIKSIAN PAJAK PENGHASILAN Laba Setelah Pajak	(S - T) = (U) 58,793,780,806	56,994,180,227	74,006,122,764	125.87	129.85



PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
LAPORAN LABA - RUGI
PER JENIS BIAYA
UNTUK PERIODE 12 (DUA BELAS) BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 DAN 2005

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2005 (AUDITED)	RKAP TAHUN 2006	TAHUN 2006 (AUDITED)	TREND %		
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
I	PENDAPATAN						
1	Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal	115,511,924,562	123,050,655,000	146,105,052,751	126.48	118.74	
2	Pendapatan Pelayanan Jasa Barang	31,029,729,328	34,702,950,000	38,049,482,716	122.62	109.64	
3	Pendapatan Pengusahaan Alat-alat	1,790,841,184	3,926,538,000	2,382,810,018	133.06	60.68	
4	Pendapatan Pelayanan Usaha Terminal	36,190,217,124	34,905,770,000	39,644,625,151	103.81	113.58	
5	Pendapatan Pelayanan Terminal Peti Kemas	89,052,696,789	88,657,177,000	128,140,032,271	143.89	144.53	
6	Pendapatan Pengusahaan Tanah, Bangunan, Listrik(TBL)	8,611,906,382	9,262,974,000	10,152,904,118	117.89	109.61	
7	Pendapatan Rumah Sakit Pelabuhan/Unit Kesehatan	8,631,383,895	8,932,719,000	10,030,642,049	113.58	112.29	
8	Pendapatan Pelabuhan/Dermaga Khusus (Pokus/Dersus)	126,380,315	115,446,000	146,722,342	116.10	127.09	
9	Pendapatan Rupa-rupa Usaha	70,312,085,474	76,188,795,000	75,750,152,107	107.73	99.62	
10	Jumlah Pendapatan Usaha Kotor	27,507,038,157	27,937,175,000	29,985,439,992	109.01	107.33	
	(A)	390,964,203,210	407,680,199,000	480,387,863,535	122.87	117.83	
11	Reduksi Pendapatan	(B)	44,780,253,864	57,873,744,479	129.24	123.08	
	Pendapatan Usaha Bersih	(A - B) = (C)	346,183,949,346	360,658,613,000	422,514,119,056	122.05	117.15
12	Pendapatan Di luar Usaha	(D)	22,215,255,283	35,141,018,000	13,156,784,235	99.22	37.44
	JUMLAH PENDAPATAN	(C + D) = (E)	368,399,204,629	395,799,631,000	435,670,903,291	118.26	110.07
II	BEBAN						
1	Beban Pegawai	69,387,930,552	82,156,309,000	80,166,961,732	115.53	97.58	
2	Beban Bahan	35,729,996,978	48,465,655,000	49,753,413,513	139.25	102.66	
3	Beban Pemeliharaan	34,823,294,280	30,437,929,000	38,253,663,401	109.85	125.68	
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	32,053,805,351	37,077,585,000	35,123,918,090	109.58	94.73	
5	Beban Asuransi	1,848,192,525	2,924,826,000	2,263,756,978	122.48	77.40	
6	Beban Sewa	20,337,832,678	18,453,507,000	22,205,613,559	109.18	120.33	
7	Beban Administrasi Kantor	4,554,055,153	4,755,800,000	5,156,147,059	113.22	108.42	
8	Beban Umum	83,215,363,948	87,053,814,000	96,915,022,993	116.46	111.33	
9	Beban Bunga Pinjaman Jangka Panjang	5,533,840,144	2,786,986,000	2,782,726,922	50.29	99.85	
10	Beban Operasional/ Program Kemitraan	107,814,095	142,300,000	130,334,054	120.89	91.59	
	JUMLAH BEBAN	(F)	287,592,125,704	314,254,711,000	332,751,558,301	115.70	105.89
	Laba Sebelum Pos Luar Biasa	(E - F) = (G)	80,807,078,925	81,544,920,000	102,919,345,030	127.36	126.21
III	PENDAPATAN DAN BEBAN POS LUAR BIASA						
1	Pendapatan Pos Luar Biasa	(H)	-	-	-	-	
2	Biaya Pos Luar Biasa	(I)	-	-	-	-	
	Selisih Pendapatan & Beban Pos Luar Biasa: (H - I) = (J)		-	-	-	-	
	Laba Sebelum Pajak	(G + J) = (K)	80,807,078,925	81,544,920,000	102,919,345,030	127.36	126.21
IV	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	(L)	22,013,298,119	24,550,739,773	28,913,222,266	131.34	117.77
	Laba Setelah Pajak	(K - L) = (M)	58,793,780,806	56,994,180,227	74,006,122,764	125.87	129.85

c. Laporan Arus Kas

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)		LAPORAN ARUS KAS	
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2006 DAN 2005			
		TAHUN 2006	TAHUN 2005
		<u>AUDITED</u>	<u>AUDITED</u>
1	AKTIVITAS OPERASI		
	a. PENERIMAAN		
	1. Penerimaan kas dari pelanggan	Rp. 467,847,107,856	404,394,719,420
	Jumlah 1.a.	Rp. 467,847,107,856	404,394,719,420
	b. PENGELUARAN		
	1. Pembayaran kas kepada pemasok/pelanggan/karyawan	Rp. (385,080,338,829)	(265,318,131,152)
	2. Pembayaran bunga	Rp. (2,853,343,332)	(5,775,367,491)
	3. Pembayaran angsuran pajak penghasilan	Rp. (24,355,473,362)	(14,676,175,288)
	4. Penerimaan (pembayaran) hutang pajak lainnya	Rp. (2,193,846,611)	(2,489,648,425)
	5. Biaya operasional PKBL	Rp. (130,334,054)	(107,814,095)
	Jumlah 1.b.	Rp. (414,613,336,188)	(289,367,136,451)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1a-1b)	Rp. 53,233,771,668	115,027,582,969
2	AKTIVITAS INVESTASI		
	a. PENERIMAAN		
	1. Surat Berharga/ Deposito, Dll.	Rp. 73,298,000,000	14,926,500,000
	Jumlah 2.a	Rp. 73,298,000,000	14,926,500,000
	b. PENGELUARAN		
	1. Aktiva Tetap	Rp. (11,335,882,648)	(14,204,889,917)
	2. Uang Jaminan	Rp. 0	0
	3. Biaya hak pengelolaan tanah	Rp. 0	0
	Jumlah 2.b	Rp. (11,335,882,648)	(14,204,889,917)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (2a-2b)	Rp. 61,962,117,352	721,610,083
3	AKTIVITAS PENDANAAN		
	a. PENERIMAAN		
	1. Penerimaan hutang BIT	Rp. 0	0
	Jumlah 2.a	Rp. 0	0
	b. PENGELUARAN		
	1. Pembayaran hutang Bank Internasional Indonesia	Rp. 0	(74,320,000,000)
	2. Pembayaran hutang 4 SLA	Rp. (3,433,495,570)	(7,367,213,135)
	3. Pembayaran dividen	Rp. (8,819,000,000)	(6,452,599,000)
	4. Pembayaran tantiem	Rp. (1,398,000,000)	(1,290,520,000)
	5. Pembayaran PKBL	Rp. (2,513,000,000)	(2,150,867,000)
	5. Dana pensiun	Rp. (7,524,825,079)	(13,219,127,794)
	Jumlah 2.b	Rp. (23,688,320,649)	(104,800,326,929)
	Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan (2a-2b)	Rp. (23,688,320,649)	(104,800,326,929)
4	KENAIKAN / PENURUNAN KAS BERSIH (1+2+3)	Rp. 91,507,568,371	11,948,866,123
5	SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	Rp. 59,291,074,017	47,342,207,894
6	SALDO KAS AHIR PERIODE (5+4)	Rp. 150,798,642,388	59,291,074,017



d. Laporan Perubahan Ekuitas

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006**

(Dalam Ribuan)

No	Uraian	Modal	SPFRO	Modal Donor	Cadangan Modal	Cadangan Umum	Cadangan Lain-lain	Laba Yang Belum Dibagikan Atas Sah	Saldo Laba	
									Saldo Awal	Jumlah
1	Saldo Awal 1 Januari 1992	1.51.000.000.000								
2	Pembelian			121.514.534 151.981.000	104.501.362.198	1.000.000.000			51.941.621.346	261.510.738.078
3	Pembagian Laba Tahun 1996	1.51.000.000.000		293.501.534	104.501.362.198	1.000.000.000			52.272.282.878	293.125.644.600
4	Saldo Akhir per 31 Desember 1999			293.501.534	104.501.362.198	1.145.000.000			118.702.744.000	118.702.744.000
5	Saldo Awal per 1 Januari 2000	1.51.000.000.000		293.501.534	104.501.362.198	1.145.000.000			49.173.494.724	269.125.243.494
6	Pembelian			293.501.534	104.501.362.198	1.145.000.000			49.173.494.724	269.125.243.494
7	Pembelian				144.242.853.115				3.455.795.771	148.738.648.886
8	Pembelian									
9	Pembelian									
10	Pembelian									
11	Pembelian									
12	Pembelian									
13	Pembelian									
14	Pembelian									
15	Pembelian									
16	Pembelian									
17	Pembelian									
18	Pembelian									
19	Pembelian									
20	Pembelian									
21	Pembelian									
22	Pembelian									
23	Pembelian									
24	Pembelian									
25	Pembelian									
26	Pembelian									
27	Pembelian									
28	Pembelian									
29	Pembelian									
30	Pembelian									
31	Pembelian									
32	Pembelian									
33	Pembelian									
34	Pembelian									
35	Pembelian									
36	Pembelian									
37	Pembelian									
38	Pembelian									
39	Pembelian									
40	Pembelian									
41	Pembelian									
42	Pembelian									
43	Pembelian									
44	Pembelian									
45	Pembelian									
46	Pembelian									
47	Pembelian									
48	Pembelian									
49	Pembelian									
50	Pembelian									
51	Pembelian									
52	Pembelian									
53	Pembelian									
54	Pembelian									
55	Pembelian									
56	Pembelian									
57	Pembelian									
58	Pembelian									
59	Pembelian									
60	Pembelian									
61	Pembelian									
62	Pembelian									
63	Pembelian									
64	Pembelian									
65	Pembelian									
66	Pembelian									
67	Pembelian									
68	Pembelian									
69	Pembelian									
70	Pembelian									
71	Pembelian									
72	Pembelian									
73	Pembelian									
74	Pembelian									
75	Pembelian									
76	Pembelian									
77	Pembelian									
78	Pembelian									
79	Pembelian									
80	Pembelian									
81	Pembelian									
82	Pembelian									
83	Pembelian									
84	Pembelian									
85	Pembelian									
86	Pembelian									
87	Pembelian									
88	Pembelian									
89	Pembelian									
90	Pembelian									
91	Pembelian									
92	Pembelian									
93	Pembelian									
94	Pembelian									
95	Pembelian									
96	Pembelian									
97	Pembelian									
98	Pembelian									
99	Pembelian									
100	Pembelian									



DAFTAR RINCIAN PENDAPATAN
UNTUK PERIODE 12 (DUA BELAS) BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dalam Perbandingan)

Akun	Uraian	Realisasi Tahun 2005 (Audited)	Anggaran Tahun 2006	Realisasi Tahun 2006 (Audited)	(Dalam Rupiah)	
					Kecenderungan %	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
701	PENDAPATAN USAHA					
	PELAYANAN JASA KAPAL					
	01 Labuh	30,895,802,462	30,722,154,000	37,618,528,589	121.76	122.45
	02 Penambatan	16,798,184,852	17,314,764,000	18,613,865,373	110.81	107.50
	03 Pemanduan	19,311,594,463	21,476,472,000	24,318,699,368	125.93	113.23
	04 Penundaan	36,050,715,740	40,319,763,000	49,290,368,374	136.73	122.25
	05 Air Kapal	17,455,327,015	13,217,502,000	16,263,591,047	130.58	123.05
	JUMLAH 701	115,511,924,562	123,050,655,000	146,105,052,751	126.48	118.74
702	PELAYANAN JASA BARANG					
	01 Dermaga	18,105,830,307	20,720,311,000	21,543,794,173	118.99	103.97
	02 Gudang Penumpukan	1,874,798,274	2,498,485,000	2,660,329,576	141.90	106.48
	03 Lapangan Penumpukan	11,049,100,747	11,484,154,000	13,845,358,967	125.31	120.56
	JUMLAH 702	31,029,729,328	34,702,950,000	38,049,482,716	122.62	109.64
703	PENGUSAHAAN ALAT-ALAT					
	01 Kran Darat	1,323,765,680	1,471,254,000	1,615,710,810	122.05	109.82
	02 Kran Apung	0	0	0	0.00	0.00
	03 Forklift	185,465,002	183,887,000	466,516,039	251.54	253.70
	04 Head Truck	0	49,094,000	0	0.00	0.00
	05 Chasis	0	0	0	0.00	0.00
	05 Tongkang	0	0	0	0.00	0.00
	07 BKMP	0	0	0	0.00	0.00
	08 Towing Tractor	0	0	0	0.00	0.00
	09 Timbangan	33,869,352	38,247,000	42,824,363	126.44	111.97
	10 Alat Pemadam Kebakaran	108,857,340	108,920,000	170,363,792	156.50	156.41
	11 Mobil Tronton	0	0	0	0.00	0.00
	99 Alat-Alat lainnya	138,883,810	2,075,136,000	87,395,034	62.83	4.21
	JUMLAH 703	1,790,841,184	3,926,538,000	2,382,810,038	133.06	60.68
704	PELAYANAN USAHA TERMINAL					
	01 Stevedoring	9,623,292,761	11,245,639,000	5,755,065,083	59.80	51.18
	02 Cargodoring	969,149,560	0	5,202,798,953	536.84	0.00
	03 Overbrengean	0	0	0	0.00	0.00
	04 Delivery Charge	243,035,834	0	392,365,060	161.44	0.00
	05 B/M Peti Kemas	17,561,529,745	16,959,110,000	25,118,127,326	143.03	148.11
	06 Pengusahaan Alat-alat	3,584,593,282	0	2,294,889,369	63.18	0.00
	07 Mobil Tronton	0	0	0	0.00	0.00
	99 Terminal Lainnya	6,208,615,942	6,701,021,000	911,359,340	14.68	13.60
	JUMLAH 704	38,190,217,124	34,905,770,000	39,644,625,151	103.81	113.58
705	PELAYANAN TERM. PETI KEMAS					
	01 Operasi Kapal	0	0	0	0.00	0.00
	02 Paket	73,590,118,536	73,827,186,000	105,777,312,990	147.82	147.34
	03 Operasi Lapangan	7,728,239,550	8,922,528,000	10,259,044,726	132.75	114.98
	04 Operasi CFS	1,963,252,825	4,632,000	2,634,000,045	134.17	56,865.29
	05 Dermaga Peti Kemas	192,839,270	307,461,000	23,986,760	12.44	7.80
	06 Penumpukan Peti Kemas	4,834,417,020	4,770,892,000	5,444,465,275	112.62	114.12
	07 Pengusahaan Peti Kemas	0	0	0	0.00	0.00
	99 Operasi Lainnya	743,829,586	824,478,000	1,001,222,475	134.60	121.44
	JUMLAH 705	89,052,696,789	88,657,177,000	128,140,032,271	143.89	144.53
706	PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, LISTRIK (TBL)					
	01 Sewa Tanah	4,758,122,707	5,356,229,000	5,659,427,033	118.94	105.66
	02 Sewa Bangunan	1,584,902,950	1,694,504,000	1,907,775,275	120.37	112.59
	04 Fasilitas Listrik	2,268,880,725	2,212,241,000	2,585,701,810	113.96	116.88
	JUMLAH 706	8,611,906,382	9,262,974,000	10,152,904,118	117.89	109.61
707	KERJA SAMA USAHA (KSU)					
		8,831,383,895	8,932,719,000	10,030,642,049	113.58	112.29
708	RS. PELABUHAN/UNIT KES.					
		126,380,315	115,446,000	146,722,342	116.10	127.09



Akun	Uraian	Realisasi Tahun 2005 (Audited)	Anggaran Tahun 2006	Realisasi Tahun 2006 (Audited)	Kecenderungan %	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
709	PELY. PELSUS/DERSUS					
	01 Labuh	0	0	0	0.00	0.00
	02 Penambatan	13,413,724,006	15,594,613,000	15,510,579,886	115.63	99.46
	03 Dermaga	12,370,314,747	12,418,305,000	13,747,711,258	111.13	110.71
	04 Pemanduan	44,528,046,721	48,175,877,000	46,491,860,963	104.41	96.50
	05 Penundaan	0	0	0	0.00	0.00
	JUMLAH 709	70,312,085,474	76,188,795,000	75,750,152,107	107.73	99.42
710	RUPA-RUPA USAHA					
	01 Fasilitas Telepon	0	0	0	0.00	0.00
	02 Pas Pelabuhan	21,802,257,892	22,949,027,000	22,791,894,168	104.54	99.32
	03 Retribusi	926,440,059	1,154,005,000	1,110,393,478	119.86	96.22
	99 Rupa-rupa Usaha Lainnya	4,778,340,206	3,834,143,000	5,083,152,346	127.31	158.66
	JUMLAH 710	27,507,038,157	27,937,175,000	29,985,439,992	109.01	107.33
	JML. PENDAPATAN USAHA (A)	390,964,203,210	407,680,199,000	480,387,863,535	122.87	117.83
	REDUKSI PENDAPATAN					
721	Reduksi Pelayanan Jasa Kapal	2,445,524,377	3,715,519,000	2,267,186,137	92.71	61.02
722	Reduksi Pelayanan Jasa Barang	329,062,172	368,406,000	540,376,515	164.22	146.66
723	Reduksi Pengusahaan Alat-alat	0	0	0	0.00	0.00
724	Reduksi Pelayanan Usaha Terminal	2,207,020,499	594,846,000	90,310,048	4.09	15.18
725	Reduksi Pely. Terminal Peti Kemas	19,065,796,079	20,834,249,000	31,394,010,743	164.66	150.68
726	Reduksi Pengusahaan Tanah, bangunan, listrik	0	0	0	0.00	0.00
727	Reduksi Kerja Sama Usaha (KSU)	1,375,447,160	1,790,288,000	2,365,909,514	172.01	132.15
728	Reduksi R.S. Pelabuhan/Unit Kes.	0	0	0	0.00	0.00
729	Pelayanan Pelsus/ Dersus	18,384,980,485	19,611,063,000	19,671,719,720	107.00	100.31
730	Reduksi Rupa-rupa Usaha	972,423,071	107,155,000	1,544,231,762	158.80	1,441.12
	JML. REDUKSI PENDAPATAN (B)	44,780,253,864	47,021,586,000	57,873,744,439	129.24	123.08
	PENDP. USAHA BERSIH (A-B) = (C)	346,183,949,346	360,658,613,000	422,514,119,096	122.05	117.15
'91	PENDAPATAN DILUAR USAHA					
	01 Laba Selisih Kurs Pembukuan	5,945,797,365	0	1,580,907,677	26.59	0.00
	02 Laba Penjualan Kertas Berharga	0	0	0	0.00	0.00
	03 Pendapatan Denda	153,519,738	87,322,000	95,840,098	62.43	109.75
	04 Pendapatan Jasa Giro	468,593,234	445,733,000	580,497,404	123.88	130.23
	05 Pendapatan Iuran Kesehatan	0	7,700,000	689,119	0.00	8.94
	06 Pendapatan Iuran Kesehatan DP4	0	0	0	0.00	0.00
	07 Pendapatan Sewa Rumah	55,935,426	59,771,000	47,912,173	85.66	80.16
	08 Pendapatan Bunga Deposito	2,563,525,635	1,400,000,000	7,167,998,386	279.61	512.00
	09 Pendapatan Pembelian Dokumen	327,505,892	129,578,000	636,573,960	194.37	491.27
	10 Pendapatan Penj. Buku Formulir	89,776,025	93,195,000	106,563,440	118.70	114.34
	11 Pendapatan Meterai	258,082,877	284,549,000	306,296,566	118.68	107.64
	12 Laba Selisih Persediaan	0	0	0	0.00	0.00
	13 Laba Penjualan Aktiva Tetap	9,104,562,208	32,018,750,000	66,799,999	0.73	0.21
	14 Pendp. Lain-lain	0	0	0	0.00	0.00
	99 Pendp. Diluar Usaha Lainnya	3,247,956,883	614,420,000	2,566,706,413	79.03	417.74
	JML. PENDP. DILUAR USAHA = (D)	22,215,255,283	35,141,018,000	13,156,784,235	59.22	37.44
01	POS-POS LUAR BIASA					
	01 Laba Rugi Selisih Kurs	0	0	0	0.00	0.00
	JML. POS-POS LUAR BIASA = (E)	0	0	0	0.00	0.00
	JML. PENDAPATAN (C+D+E) = (F)	368,399,204,629	395,799,631,000	435,670,903,331	118.26	110.07

DAFTAR RINCIAN BEBAN PER PUSAT PELAYANAN
PERIODE 12 (DUA BELAS) BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dalam Perbandingan)

Akun	Uraian	Realisasi Tahun 2005 (Audited)	Anggaran Tahun 2006	Realisasi Tahun 2006 (Audited)	(Dalam Rupiah)	
					Kecenderungan %	
1	2	3	4	5	6	7
	BEBAN OPERASI					
1	BEBAN OPERASI LANGSUNG					
801	BEBAN PELAYANAN JASA KAPAL					
	01 Beban Labuh	1,363,770,835	1,709,436,000	1,368,455,515	100.34	80.05
	02 Beban Penambatan	5,475,006,900	6,241,641,000	6,624,039,339	120.99	106.13
	03 Beban Pemanduan	14,173,707,810	14,526,849,000	16,173,665,264	114.11	111.34
	04 Beban Penundaan	20,427,791,279	23,901,891,000	25,636,965,849	125.50	107.26
	05 Beban Air	10,353,639,847	13,086,067,000	13,059,961,042	126.14	99.00
	JUMLAH 1	51,793,916,671	59,465,884,000	62,863,087,008	121.37	105.71
802	BEBAN PELAYANAN JASA BARANG					
	01 Beban Dermaga	7,546,463,808	8,543,032,000	6,552,592,054	86.83	76.70
	02 Beban Gudang Penumpukan	3,499,337,664	3,449,306,000	3,223,589,782	92.38	93.46
	03 Beban Lapangan Penumpukan	5,661,050,198	5,790,959,000	6,412,953,660	112.28	110.74
	JUMLAH 2	16,696,851,760	17,783,307,000	16,189,135,496	96.96	91.04
803	BEBAN PENGUSAHAAN ALAT-ALAT					
	01 Beban Kran Darat	1,159,834,789	1,285,675,000	1,302,614,123	112.31	101.32
	02 Beban Kran Apung	0	0	0	0.00	0.00
	03 Beban Forklift	1,050,428,071	893,382,000	1,125,375,926	107.13	125.97
	04 Beban Head Truck	0	0	0	0.00	0.00
	05 Beban Chasis	0	0	0	0.00	0.00
	06 Beban Tongkang	6,787,079	23,837,000	76,836,105	1,132.09	322.34
	07 Beban BKMP	0	0	0	0.00	0.00
	08 Beban Towing Traktor	0	0	0	0.00	0.00
	09 Beban Timbangan	0	0	0	0.00	0.00
	10 Beban Alat PMK	344,571,288	353,577,000	377,931,437	109.68	106.89
	11 Beban Tronton	331,155,181	404,046,000	427,208,853	129.01	105.73
	23 Beban Spreader	0	0	0	0.00	0.00
	99 Beban Alat-alat lainnya	3,704,950	2,742,000	11,001,046	296.93	401.21
	JUMLAH 3	2,896,481,368	2,963,259,000	3,320,967,490	114.66	112.07
804	BEBAN PELAYANAN TERMINAL					
	01 Beban Stevedoring	8,166,323,107	10,011,020,000	10,548,694,782	129.17	105.37
	02 Beban Cargodoring	554,566,047	5,163,120,000	700,834,692	126.38	13.57
	03 Beban Overbrenge	0	0	0	0.00	0.00
	04 Beban Deliveri Charge	360,017,709	0	189,464,938	52.63	0.00
	05 Beban BM Peti Kemas	7,196,013,181	0	4,798,759,969	66.69	0.00
	06 Beban Pengusahaan Alat-alat	2,088,545,876	0	0	0.00	0.00
	07 Beban Tronton	0	0	0	0.00	0.00
	99 Beban Lain-Lain	1,906,410,313	3,591,545,000	2,513,146,941	131.83	69.97
	JUMLAH 4	20,271,876,233	18,765,685,000	18,750,901,322	92.50	99.92
805	BEBAN PELAYANAN TERMINAL PETI KEMAS					
	01 Beban Operasi Kapal	0	0	0	0.00	0.00
	02 Beban Operasi Lapangan	9,397,365,402	11,537,074,000	7,686,998,975	81.80	66.63
	03 Beban Operasi CFS	875,573,967	1,990,278,000	989,265,136	112.96	49.70
	04 Beban Dermaga Peti Kemas	69,667,738	66,871,000	402,841,823	578.23	602.42
	05 Beban Lapangan Penumpukan Peti Kemas	1,475,974,735	1,306,397,000	2,526,114,054	171.15	193.36
	06 Beban Pengusahaan Alat Peti Kemas	0	0	0	0.00	0.00
	07 Beban Pely. Petikemas Paket	19,712,919,548	16,505,658,000	29,241,303,359	148.34	177.16
	99 Beban Operasi Lainnya	732,303,827	854,844,000	1,522,284,527	207.88	178.06
	JUMLAH 5	32,263,807,217	32,261,122,000	42,368,807,873	131.32	131.33
806	BEBAN PENGUSAHAAN TBL					
	01 Beban Tanah	255,317,222	368,752,000	150,183,002	58.82	40.73
	02 Beban Bangunan Yang Disewakan	121,995,314	210,051,000	9,627,330	7.89	4.58
	04 Beban Fasilitas Listrik	1,073,386,910	1,546,558,000	571,168,999	53.21	36.93
	JUMLAH 6	1,450,699,446	2,125,361,000	730,979,331	50.39	34.39
807	BEBAN KERJA SAMA USAHA (KSU)					
	01 Beban Pelayanan Peti Kemas	85,775,066	264,896,000	184,919,091	215.59	69.81
	02 Beban Pelayanan Air Kapal	127,972,525	0	70,788,633	55.32	0.00
	04 Beban Terminal Konvensional	0	0	0	0.00	0.00
	JUMLAH 7	213,747,591	264,896,000	255,707,724	119.63	96.53



Akun	Uraian	Realisasi Tahun 2005 (Audited)	Anggaran Tahun 2006	Realisasi Tahun 2006 (Audited)	Kecenderungan %	
					5/3	5/4
1	2	5	4	5	6	7
808	RS.PELABUHAN/UNIT KESEHATAN	773,933,961	1,117,184,000	901,512,551	116.48	80.70
809	BEBAN PELAY.PELBUS/DERSUS		0			
	01 Beban Labuh	0	0	0	0.00	0.00
	02 Beban Penambatan	105,175,635	91,694,000	170,764,916	152.35	185.23
	03 Beban Dermaga	599,369,947	239,047,000	305,374,000	50.95	127.75
	04 Beban Pemanduan	1,594,277,370	2,344,808,000	1,856,348,704	116.44	79.17
	05 Beban Penundaan	0	0	0	0.00	0.00
	JUMLAH 9	2,298,822,852	2,675,549,000	2,332,487,700	101.46	87.18
810	BEBAN RUPA-RUPA USAHA					
	01 Beban Fasilitas Telepon	0	0	0	0.00	0.00
	02 Beban Pas Pelabuhan	10,654,764,857	12,230,717,000	11,964,853,247	110.23	97.83
	03 Beban Retribusi	1,818,182	39,976,000	1,675,467	92.15	4.19
	04 Beban Bengkol	0	0	0	0.00	0.00
	05 Beban Belai Pendidikan & Latihan	0	0	0	0.00	0.00
	99 Beban Rupa-Rupa Usaha Lain	43,114,071	853,554,000	272,550,000	632.16	31.93
	JUMLAH 10	10,899,697,110	13,124,247,000	12,239,078,714	112.29	93.76
	JUMLAH B.O.L. 801 s.d 810 A	139,559,834,309	150,546,494,000	159,952,665,209	114.61	106.25
2	BEBAN OPERASI TAK LANGSUNG					
821	BEBAN OTL DIVISI PELY. KAPAL					
	01 Beban Kadiv Pelayanan Kapal	2,573,350,094	3,523,885,000	3,820,721,490	148.47	108.42
	02 Beban Dinas Pemanduan, Tambatan	3,624,305,445	3,408,336,000	3,274,651,005	90.35	95.08
	03 Beban Dinas Armada dan Telekomunikasi	1,607,314,596	1,766,827,000	1,688,058,626	105.02	95.54
	JUMLAH 14	7,804,970,135	8,699,048,000	8,783,431,121	112.54	100.97
822	BEBAN OTL DIVISI PELY. MUATAN & ANEKA USK.					
	01 Beban Ka.Div. Pelayanan Muatan & Aneka Usaha	1,798,279,629	1,693,434,000	1,973,189,762	109.73	116.52
	02 Beban Dinas Muatan & Staff	2,436,133,569	2,418,962,000	2,499,922,396	102.62	103.35
	03 Beban Dinas Aneka Usaha & Staff	1,918,867,659	1,610,751,000	2,384,227,553	124.25	148.02
	JUMLAH 15	6,153,275,857	5,723,147,000	6,857,339,711	111.44	119.82
823	BEBAN OTL DIVISI PELY. PETIKEMAS					
	01 Beban Kepala DUT & Staf	183,857,382	160,381,000	247,733,327	134.72	154.47
	02 Beban Dinas Adm. & Perencanaan	2,434,961,843	1,977,392,000	2,893,118,109	118.82	146.31
	03 Beban Dinas B/M Peti Kemas	317,250,750	398,247,000	384,618,968	121.24	96.58
	03 Beban Dinas Peralatan Peti Kemas	846,339,474	887,404,000	1,016,426,821	120.10	114.54
	JUMLAH 16	3,782,439,449	3,423,424,000	4,541,897,225	120.08	132.67
824	BEBAN OTL D.U.T.P.K.					
	01 Beban Kepala DUTPK & Staf	0	0	0	0.00	0.00
	02 Beban Dinas PP Uster PK	0	0	0	0.00	0.00
	JUMLAH 17	0	0	0	0.00	0.00
	JUMLAH 2 (14 s/d 17) B	17,740,685,441	17,845,619,000	20,182,668,056	113.76	113.10
3	BEBAN PENUNJANG OPERASI					
831	BEBAN PO DIVISI TEKNIK					
	01 Beban Kadiv Teknik & Staf	1,892,717,343	2,054,536,000	3,127,639,407	165.25	152.23
	02 Beban Dinas Bangunan Pelabuhan	6,099,513,505	4,500,324,000	5,078,779,174	81.27	112.85
	03 Beban Dinas Peralatan Pelabuhan	3,543,865,977	3,289,094,000	3,607,385,967	101.79	109.68
	JUMLAH 18	11,536,096,825	9,843,954,000	11,813,804,548	102.41	120.01
832	BEBAN PO DIVISI KEUANGAN					
	01 Beban Kadiv Keuangan & Staf	2,990,126,165	3,999,764,000	4,749,201,680	155.83	118.74
	02 Beban Dinas Administrasi Keuangan	10,964,712,753	6,233,690,000	9,010,327,100	82.18	144.54
	03 Beban Dinas Akuntansi	3,152,829,195	4,638,382,000	3,285,507,127	104.21	70.83
	JUMLAH 19	17,107,668,113	14,871,836,000	17,045,035,907	99.63	114.61
833	BEBAN PO KACAB DAN BAGIAN UMUM					
	01 Beban Kepala Cabang & Staf	8,719,632,461	7,799,988,000	9,038,738,048	103.66	115.88
	02 Beban Kabag Umum & Staf	2,858,263,126	3,869,397,000	2,943,343,918	102.99	76.07
	03 Beban Sub Bagian Hukum & Humas	8,640,749,529	7,639,825,000	10,099,561,537	116.88	132.20
	04 Beban Sub Bagian Tata Usaha	0	0	0	0.00	0.00
	04 Beban Sub Bagian Tata Usaha	10,491,604,912	19,987,046,000	12,956,619,384	123.78	64.98
	05 Beban Sub Bagian Personalia	2,399,330,965	3,360,499,000	3,195,393,816	133.18	95.09
	06 Beban Sub Bagian Data & Informasi	33,109,580,996	42,656,755,000	38,263,656,703	115.57	89.70
	JUMLAH 20	61,753,345,934	67,372,545,000	67,122,497,158	108.69	99.63
	JUMLAH 3 (18 s/d 20) = C	219,053,865,684	235,764,658,000	247,257,830,423	112.88	104.87
	JUMLAH BEBAN OPERASI (A+B+C) = D					



Akun	Uraian	Realisasi Tahun 2005 (Audited)	Anggaran Tahun 2006	Realisasi Tahun 2006 (Audited)	Kecenderungan %	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
4	BEBAN PENGELOLAAN					
841	BEBAN PENGELOLAAN KANTOR PUSAT					
	01 Beban Direksi dan Staf	5,351,937,314	3,803,950,000	6,490,419,567	121.27	170.62
	02 Beban Subdit Wilayah Ops I	606,341,711	870,945,000	335,629,773	48.90	38.54
	03 Beban Subdit Wilayah Ops II	1,552,911,824	903,606,000	314,132,386	20.23	34.76
	04 Beban Subdit Pemeliharaan Bangunan & LatPel	1,759,612,558	4,304,519,000	1,928,807,097	109.62	44.81
	05 Beban Subdit Pemasaran	674,977,815	1,690,579,000	629,145,222	93.21	37.21
	06 Beban Subdit Pengembangan Bang&LatPel	2,848,992,597	1,214,171,000	2,535,272,744	85.99	208.61
	07 Beban Subdit Mutu & Manajemen Risiko	824,776,286	911,533,000	486,904,046	59.03	53.42
	08 Beban Subdit Akuntansi Manajemen	202,614,190	606,164,000	448,632,382	221.42	74.01
	09 Beban Subdit Akuntansi Keuangan	2,222,643,718	3,298,085,000	6,046,560,874	272.04	183.34
	10 Beban Subdit Perbendaharaan	2,155,317,375	2,820,811,000	1,759,695,855	81.64	62.38
	11 Beban Subdit Sumber Daya Manusia	9,378,850,849	9,623,954,000	21,820,425,515	232.66	226.73
	12 Beban Subdit Hukum	1,359,738,796	2,445,695,000	425,465,459	31.29	17.40
	13 Beban Subdit Umum	8,386,746,947	4,152,357,000	5,976,035,818	71.26	143.88
	14 Beban Sekretaris Perusahaan	2,372,324,029	3,112,239,000	1,173,939,264	49.48	37.72
	15 Beban Sabban Pengawas Intern	1,621,861,415	1,924,490,000	581,660,014	35.86	30.22
	16 Beban Komisaris	2,083,177,812	2,183,140,000	2,441,035,114	117.18	111.81
	17 Staf Khusus	232,573,694	0	0	0.00	0.00
		0	0	0	0.00	0.00
	JUMLAH 21 E	43,715,398,930	43,867,238,000	53,393,761,130	122.14	121.72
	JUMLAH BEBAN USAHA (D + E) F	252,769,264,614	279,631,896,000	300,651,591,553	114.47	107.52
842	BEBAN BUNGA PINJAMAN JP G	0	0	0	0.00	0.00
891	BEBAN DI LUAR USAHA					
	01 Rugi Selisih Kurs Pembukuan	7,407,654,814	0	5,484,479,470	74.04	0.00
	02 Rugi Penjualan Kertas Berharga	0	0	0	0.00	0.00
	03 Beban Administrasi Bank	116,591,328	140,457,000	89,308,889	75.60	63.58
	04 Beban Giro	0	0	0	0.00	0.00
	05 Beban Cetak Formulir	171,738,451	140,553,000	29,125,000	16.96	20.72
	06 Beban Pembelian Material	212,079,188	394,699,000	548,871,443	258.80	0.80
	07 Rugi Selisih Persediaan	0	0	4,416,337	0.00	0.00
	08 Rugi Penjualan Aktiva Tetap	577,197,242	0	0	0.00	0.00
	09 Rugi Penjualan Persediaan	19,722,581	3,284,000	100,000,000	932.61	3,045.07
	10 Koreksi Rugi Tahun Lalu	0	0	0	0.00	0.00
	11 Rugi Penghapusan Aktiva Tetap	0	14,536,000	1,027,874,188	0.00	7,071.23
	12 Beban Operasional PKBL	107,814,095	142,300,000	130,334,054	120.89	91.59
	13 Beban Bunga Pinjaman	5,533,940,144	2,786,996,000	2,782,726,922	50.29	99.85
	14 Beban Denda Administrasi Pokok Pajak (SKP)	0	0	5,008,433,124	0.00	0.00
	15 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	0	0	11,023,714,503	0.00	0.00
	99 Beban Di luar Usaha Lainnya	10,685,223,247	31,000,000,000	5,870,682,819	54.94	18.94
	JUMLAH 22 H	24,822,861,090	34,622,815,000	32,099,966,748	129.32	92.71
	JUMLAH BEBAN SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	287,592,125,704	314,254,711,000	332,751,558,301	115.70	105.89
901	BEBAN POS-POS LUAR BIASA					
	01 Rugi Laba Selisih Kurs	0	0	0	0.00	0.00
	02 Kerugian Karena Bencana Alam	0	0	0	0.00	0.00
	03 Rugi Karena Kebakaran	0	0	0	0.00	0.00
	04 Rugi Tabrakan Kapal	0	0	0	0.00	0.00
	99 Pos-Pos Luar Biasa Lainnya	0	0	0	0.00	0.00
	JUMLAH 901 I	0	0	0	0.00	0.00
	JUMLAH BEBAN	287,592,125,704	314,254,711,000	332,751,558,301	115.70	105.89
	JUMLAH PENDAPATAN	358,399,204,629	395,799,631,000	435,670,903,331	118.26	110.07
	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	80,807,078,925	81,544,920,000	102,919,345,030	127.36	126.21
	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	22,013,298,119	24,550,739,773	28,913,222,266	131.34	117.77
	LABA/RUGI SETELAH PAJAK	58,793,780,806	56,994,180,227	74,006,122,764	125.87	129.85

DAFTAR RINCIAN BEBAN PER JENIS
PERIODE 12 (DUA BELAS) BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dalam Perbandingan)

(Dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2005 (Audited)	Anggaran Tahun 2006	Realisasi Tahun 2006 (Audited)	Kecenderungan (%)	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	BEBAN PEGAWAI					
101	Beban Gaji Direksi	3,666,761,858	3,521,750,000	4,126,460,476	112.54	117.17
102	Beban Gaji Pegawai	20,971,816,629	22,115,988,000	29,305,087,793	139.74	132.51
103	Beban Tunjangan Prestasi	26,949,155,735	37,932,257,000	25,552,090,052	94.82	67.36
104	Beban Tunjangan Khusus Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00	0.00
105	Beban Lembur	122,960,450	186,551,000	152,651,617	124.15	81.83
107	Beban Tunjangan Air, Listrik, dan Telpon	0	0	0	0.00	0.00
108	Beban Tunjangan Jabatan	2,780,319,794	3,169,783,000	3,282,095,213	118.05	103.54
109	Beban Bonus	14,740,000,000	15,000,000,000	17,250,000,000	117.03	115.00
199	Beban Biaya Pegawai Lainnya	156,916,126	229,980,000	498,576,581	317.73	216.79
	JUMLAH 1	69,387,930,552	82,156,309,000	80,166,961,732	115.53	97.58
2	BEBAN BAHAN					
201	Beban Bahan Bakar	10,095,443,691	22,850,095,000	19,879,239,164	196.91	87.00
202	Beban Bahan Pelumas	885,583,807	1,049,219,000	982,828,631	110.98	93.67
203	Beban Bahan Makanan	3,259,415,580	3,159,686,000	3,198,060,533	98.12	100.90
204	Beban Air	8,323,972,217	8,405,204,000	10,757,331,348	129.23	127.98
205	Beban Listrik	4,179,969,171	4,306,214,000	4,506,679,950	107.82	104.66
206	Beban Telepon	1,247,270,088	1,316,376,000	1,215,601,628	97.46	92.34
207	Beban Obat-obatan	0	0	0	0.00	0.00
208	Beban Bahan Medis	15,270,555	70,851,000	15,056,225	98.60	21.25
209	Beban Bahan Pas Pelabuhan	295,394,244	355,575,000	347,156,913	117.52	97.63
210	Beban Bahan Pemadam Kebakaran	93,035,492	236,435,000	177,463,300	190.75	75.06
211	Beban Perlengkapan	2,682,629,453	2,105,896,000	2,837,369,853	105.77	134.73
213	Insentif Operasional	4,553,364,430	4,459,551,000	5,715,518,245	125.52	128.16
299	Beban Bahan Lainnya	98,648,250	140,553,000	121,107,723	122.77	86.17
	JUMLAH 2	35,729,996,978	48,465,655,000	49,753,413,513	139.25	102.66
3	BEBAN PEMELIHARAAN					
301	Beban Pemeliharaan Bangunan Fas. Pelabuhan	4,261,115,296	3,349,990,000	6,333,003,628	148.62	189.05
302	Beban Pemeliharaan Kapal	9,747,464,405	7,998,579,000	8,896,202,442	91.27	111.22
303	Beban Pemeliharaan Alat-alat Fas. Pelabuhan	8,253,901,511	8,257,009,000	8,354,191,618	101.22	101.18
304	Beban Pemeliharaan Instalasi Fas. Pelabuhan	1,527,226,812	1,796,944,000	2,032,194,722	133.06	113.09
305	Beban Pemeliharaan Tanah	38,212,000	9,122,000	0	0.00	0.00
306	Beban Pemeliharaan Jalan dan Bangunan	6,913,123,980	4,804,468,000	8,175,020,703	118.25	170.15
307	Beban Pemeliharaan Peralatan	1,501,209,590	1,619,252,000	1,717,366,339	114.40	106.06
308	Beban Pemeliharaan Kendaraan	437,062,864	575,563,000	644,243,521	147.40	111.93
309	Beban Pemeliharaan Emplasemen	2,143,977,822	2,027,002,000	2,101,440,428	98.02	103.67
	JUMLAH 3	34,823,294,280	30,437,929,000	38,253,663,401	109.85	125.68
4	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI					
401	Beban Penyusutan Bangunan Fas. Pelabuhan	9,718,243,690	11,099,603,000	10,143,042,614	104.37	91.38
402	Beban Penyusutan Kapal	2,799,642,918	3,126,414,000	3,122,220,027	111.52	99.87
403	Beban Penyusutan Alat-alat Fas. Pelabuhan	10,984,831,682	11,058,018,000	11,425,345,268	104.01	103.32
404	Beban Penyusutan Instalasi Fas. Pelabuhan	1,231,530,416	1,455,501,000	1,664,768,993	135.18	114.38
406	Beban Penyusutan Jalan dan Bangunan	2,266,635,462	2,224,087,000	2,137,487,294	94.30	96.11
407	Beban Penyusutan Peralatan	538,597,919	559,331,000	595,058,698	110.48	106.39
408	Beban Penyusutan Kendaraan	584,588,012	741,679,000	793,024,148	135.66	106.92
409	Beban Penyusutan Emplasemen	619,360,083	818,454,000	820,257,090	132.43	100.22
410	Beban Penyusutan Aktiva Tetap Penugasan	10,303,812	8,837,000	15,495,062	150.38	175.34
411	Beban Amortisasi Survey Yang Ditangguhkan	313,071,713	695,495,000	457,438,714	146.11	65.77
412	Beban Amortisasi Konsultan Yang Ditangguhkan	149,064,819	75,407,000	42,766,229	28.69	56.71
413	Beban Amortisasi Yang Ditangguhkan	0	0	0	0.00	0.00
414	Beban Amortisasi Pendidikan yg Ditangguhkan	392,322,684	1,158,350,000	1,139,201,674	290.37	98.35
415	Beban Amortisasi Pemeliharaan yg Ditangguhkan	1,722,005,828	3,579,472,000	2,272,719,051	131.98	63.49
416	Beban Amortisasi Akta Pendirian	276,203,719	36,708,000	18,354,104	6.65	50.00
417	Beban Amortisasi A. Aplikasi Komputer	113,199,589	298,509,000	11,987,134	10.59	4.02
418	Beban Amortisasi HPL Tanah	302,046,775	141,710,000	409,593,314	135.61	289.04
419	Beban Amortisasi Rugi Kurs Yg. Ditangguhkan	0	0	0	0.00	0.00
425	Beban Amortisasi Monitoring Proyek	0	0	34,980,357	511.23	0.00
429	Beban Amortisasi Aplikasi Tarif	6,842,395	0	20,178,319	79.74	0.00
430	Beban Amortisasi Aplikasi Akuntansi/ Beban	25,305,815	0	0	0.00	0.00
	JUMLAH 4	32,053,805,351	37,077,585,000	35,123,918,090	109.58	94.73

No	Uraian	Realisasi Tahun 2005 (Audited)	Anggaran Tahun 2006	Realisasi Tahun 2006 (Audited)	Kecenderungan (%)	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
5	BEBAN ASURANSI					
501	Beban Asuransi Bangunan Fasilitas Pelabuhan	47,940,829	80,624,000	83,809,054	174.82	103.95
502	Beban Asuransi Kapal	191,666,327	273,651,000	256,570,050	133.86	93.75
503	Beban Asuransi Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	865,841,355	994,182,000	968,333,016	111.84	97.40
506	Beban Asuransi Jalan dan Bangunan	27,766,458	79,984,000	43,037,160	155.00	53.81
507	Beban Asuransi Peralatan	149,049	350,000	170,000	114.06	48.57
508	Beban Asuransi Kendaraan	47,959,657	83,333,000	73,383,901	153.01	78.63
510	Beban Asuransi Kecelakaan Kerja	429,202,948	1,030,092,000	352,642,720	82.16	34.23
599	Beban Asuransi Lainnya	237,665,902	372,600,000	405,811,077	204.41	130.38
	JUMLAH 5	1,848,192,525	2,924,826,000	2,263,756,978	122.48	77.40
6	BEBAN SEWA					
601	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Pelabuhan	682,986	0	6,150,000	900.46	0.00
602	Beban Sewa Kapal	365,304,900	387,860,000	480,819,250	131.62	123.97
603	Beban Sewa Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	637,813,935	129,331,000	71,306,116	11.18	55.13
606	Beban Sewa Jalan dan Bangunan	188,589,020	181,708,000	299,930,110	159.04	165.06
607	Beban Sewa Peralatan	0	0	0	0.00	0.00
608	Beban Sewa Kendaraan	197,722,500	80,000,000	222,639,000	112.60	278.30
609	Beban Upah Buruh/Tenaga Kerja	18,817,301,347	17,189,706,000	20,402,998,500	108.43	118.69
699	Beban Sewa Lainnya	130,417,990	484,902,000	721,770,583	553.43	148.85
	JUMLAH 6	20,337,832,678	18,453,507,000	22,205,813,559	109.18	120.33
7	BEBAN ADMINISTRASI KANTOR					
701	Beban Cetak dan Foto Copy	1,603,977,360	1,917,582,000	1,873,080,818	116.78	97.68
702	Beban Kertas dan Alat Tulis	764,462,460	885,210,000	922,784,680	120.71	104.24
703	Beban Pengiriman Surat dan Kawat	114,027,824	127,419,000	118,055,583	103.53	92.65
704	Beban Surat Kabar Majalah dan Buletin	182,738,509	180,578,000	174,182,487	95.32	96.46
705	Beban Rapat dan Jamuan	384,699,974	337,437,000	448,730,386	116.64	132.98
706	Beban Rumah Tangga	814,211,867	772,418,000	1,086,081,738	133.39	140.61
709	Beban Administrasi Bank	135,692,361	140,457,000	89,308,889	65.82	63.58
799	Beban Administrasi Lainnya	554,244,798	394,699,000	441,922,478	80.10	112.47
	JUMLAH 7	4,554,055,153	4,755,800,000	5,156,147,059	113.22	108.42
8	BEBAN UMUM					
801	Beban Perjalanan Dinas	7,044,576,336	5,280,190,000	8,335,432,167	118.32	157.86
802	Beban Penyisihan Piutang	379,543,011	294,573,000	13,123,711,956	3,457.77	5,155.19
803	Beban Penagihan Piutang	204,356,021	329,125,000	227,130,206	111.14	69.01
804	Beban Keamanan Pelabuhan	2,948,673,388	3,164,192,000	3,306,520,125	112.14	104.50
805	Beban Survey	779,702,549	499,467,000	658,194,669	84.42	131.78
806	Beban Promosi	1,910,410,759	1,653,815,000	2,075,797,275	108.66	125.52
807	Beban Pajak Bumi dan Bangunan	4,174,614,923	4,340,952,000	4,726,366,891	113.22	108.88
808	Beban Pajak Kendaraan	225,720,265	274,718,000	356,554,972	157.96	129.79
809	Beban Pesangon Ganti Rugi	4,917,751,120	5,990,621,000	6,579,425,003	194.79	159.91
810	Beban Klaim	11,458,300	50,000,000	14,800,000	129.16	29.60
811	Beban Konsultan	0	0	88,660,000	0.00	0.00
812	Beban Olah Raga dan Kesenian	386,209,022	464,150,000	504,735,418	130.69	108.74
813	Beban Pakailan Dinas dan Kerja	944,308,827	1,143,125,000	1,012,769,239	107.25	88.60
814	Beban Pendidikan dan Latihan	2,815,247,569	2,446,426,000	2,930,065,524	104.08	119.77
815	Beban Bantuan Sosial	5,069,118,385	5,595,588,000	6,615,089,714	129.98	118.22
816	Beban Iuran Dana Pensiun	13,219,127,794	39,581,889,000	7,524,825,079	56.92	19.01
817	Beban Dewan Komisaris	2,083,177,812	2,183,140,000	2,330,453,479	111.87	106.75
818	Beban Perawatan Kesehatan	5,576,357,824	5,093,092,000	6,529,935,753	117.10	128.21
819	Beban Penghapusan Aktiva Tetap	2,789,734,172	14,536,000	0	0.00	0.00
820	Beban Pemasaran	4,430,874,828	4,243,927,000	4,197,331,172	94.73	98.90
821	Beban Pemeriksaan	1,206,498,490	1,050,000,000	1,243,058,698	103.03	118.39
823	Beban Penghapusan Barang Persediaan	10,722,581	0	5,324,136	49.65	0.00
824	Beban Penghapusan Aktiva	13,295,128	3,284,000	1,027,874,188	7,791.21	31,299.46
825	Beban Penanganan Kasus	212,344,950	262,000,000	330,912,600	155.84	126.30
826	Beban Realokasi Aktiva Tetap	0	0	0	0.00	0.00
827	Beban Rugi Kurs Pembukuan	0	0	0	0.00	0.00
898	Koreksi Perhitungan L/R Tahun Lalu	14,433,885,080	3,135,004,000	14,685,575,259	101.74	468.44
899	Beban Umum Lainnya	83,215,363,948	87,053,814,000	96,915,022,993	116.46	111.33
	JUMLAH 8					
9	POS-POS LUAR BIASA					
901	Beban Selisih Kurs	0	0	0	0.00	0.00
902	Rugi Karena Bencana Alam	0	0	0	0.00	0.00
999	Pos-Pos Luar Biasa Lainnya	0	0	0	0.00	0.00
	JUMLAH 9	5,533,840,144	2,786,986,000	2,782,726,922	50.29	99.85
10	Beban BUNGA PINDAHAN JK. PANJANG	107,814,095	142,300,000	130,334,054	120.89	91.59
11	Beban OPERASIONAL PKBL	287,592,125,704	314,254,711,000	332,751,558,301	115.70	105.89
	JUMLAH BEBAN	368,399,204,629	395,799,631,000	435,670,903,331	118.26	110.07
	TOTAL PENDAPATAN	80,807,078,925	81,544,920,000	102,919,345,030	127.36	126.21
	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	22,013,298,119	24,550,739,773	28,913,222,266	131.34	117.77
	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	58,793,780,806	56,994,180,227	74,006,122,764	125.87	129.85
	LABA/RUGI SETELAH					



REALISASI LABA RUGI CABANG, UPK DAN KANTOR PUSAT
TAHUN 2006

(Dalam rupiah)

NO	URATAN	P/B/L	REALISASI THN 2006 (Audited) Disajikan kembali	RUCAP TAHUN 2005	REALISASI TAHUN 2006 (Audited)	T R E N D (%)	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MAKASSAR	P	112.908.474.427	108.323.851.000	130.726.088.088	115,78	120,68
		B	77.205.729.369	77.224.478.000	78.224.622.766	101,32	101,30
		L	35.703.745.058	31.099.373.000	52.501.465.332	147,05	168,82
2.	BALIKPAPAN	P	62.313.543.822	64.703.588.000	75.812.177.420	121,68	117,17
		B	30.251.383.019	35.441.647.000	36.972.780.815	122,22	104,32
		L	32.062.360.803	29.261.919.000	38.839.396.605	121,14	132,73
3.	SAMARINDA	P	37.609.418.904	36.491.114.000	46.225.018.555	122,91	126,67
		B	19.585.173.886	18.086.623.000	22.248.446.004	113,60	123,01
		L	18.024.245.018	18.404.491.000	23.976.572.551	133,02	130,28
4.	BITUNG	P	32.616.449.400	33.998.090.000	42.140.604.764	129,20	123,95
		B	32.696.558.755	34.481.847.000	37.334.332.866	114,18	108,27
		L	(80.109.355)	(483.957.000)	4.805.271.898	6.099,64	1.093,32
5.	AMBON	P	8.586.238.821	8.838.746.000	10.959.636.372	127,84	124,02
		B	6.632.787.279	9.108.566.000	9.865.414.972	115,44	109,40
		L	(46.348.458)	(272.620.000)	994.221.400	2.235,88	464,42
6.	SORONG	P	10.268.852.993	8.390.639.000	11.433.520.455	111,34	121,75
		B	10.333.892.337	8.880.005.000	9.825.062.061	85,08	110,64
		L	(64.999.344)	610.634.000	1.508.458.394	2.574,58	314,99
7.	JAYAPURA	P	7.683.511.772	8.283.605.000	10.491.352.957	136,54	126,65
		B	4.689.598.598	5.195.525.000	5.431.647.140	115,82	104,54
		L	2.993.943.174	3.088.080.000	5.059.705.817	169,00	163,85
8.	TARAKAN	P	6.660.431.073	9.253.454.000	11.065.819.306	127,77	118,99
		B	6.014.174.991	6.126.644.000	6.982.715.032	110,78	106,75
		L	2.646.256.082	3.126.810.000	4.403.104.274	168,39	140,82
9.	PANTOLAN	P	8.593.112.748	8.937.241.000	9.324.204.777	108,48	104,33
		B	7.830.660.681	8.026.472.000	8.795.583.738	112,32	109,58
		L	764.452.065	910.769.000	528.621.039	69,15	68,04
10.	TERNATE	P	6.062.274.842	6.152.281.000	7.509.226.519	123,87	122,06
		B	6.054.089.519	6.009.371.000	6.542.882.935	108,07	108,88
		L	8.185.223	142.890.000	865.343.684	11.805,95	676,29
11.	PAREPARE	P	3.992.905.585	3.443.814.000	3.890.303.013	119,32	107,16
		B	4.120.760.663	3.963.679.000	4.358.895.625	105,73	109,92
		L	(1.027.855.077)	(513.865.000)	(666.592.612)	164,85	(128,22)
12.	KENDARI	P	3.228.620.295	3.686.937.000	3.673.346.911	115,97	105,06
		B	3.032.670.261	3.219.516.000	3.325.712.905	109,68	103,30
		L	195.550.034	467.421.000	547.634.005	279,48	117,16
13.	BIAK	P	2.434.840.712	3.035.621.000	2.974.714.180	121,18	97,99
		B	3.067.014.117	3.165.080.000	3.000.883.905	97,84	94,81
		L	(612.173.405)	(129.469.000)	(26.149.715)	104,27	130,20
14.	MANOKWARI	P	3.902.817.122	4.113.587.000	5.158.432.263	132,18	125,40
		B	3.423.093.685	3.626.373.000	3.850.752.547	112,49	108,19
		L	479.523.536	487.214.000	1.307.679.716	272,79	266,40
15.	MERAUKE	P	3.127.059.125	2.927.884.000	4.041.290.286	129,24	136,03
		B	2.384.374.602	2.632.026.000	2.925.801.599	122,70	111,15
		L	742.684.523	295.856.000	1.115.688.687	150,23	377,11
16.	NUNUKAN	P	3.898.134.783	4.287.954.000	3.902.579.977	100,11	91,01
		B	2.380.670.277	3.800.969.000	2.929.455.718	123,05	77,07
		L	1.517.464.486	486.985.000	973.124.259	64,13	199,83
17.	FAKFAK	P	3.096.810.671	3.313.002.000	5.116.009.152	165,20	154,42
		B	3.424.347.426	3.890.154.000	4.767.573.680	139,23	123,51
		L	(327.436.755)	(547.152.000)	348.435.472	206,41	163,68
18.	GORONTALO	P	1.621.374.812	1.965.768.000	1.686.838.541	104,04	85,81
		B	1.589.318.995	1.722.965.000	1.655.144.297	104,14	96,00
		L	32.055.916	242.803.000	31.694.244	98,87	13,05
19.	UPK BONTANG	P	33.068.259.895	35.752.517.000	34.295.741.737	103,71	95,93
		B	3.001.601.492	3.311.023.000	4.518.406.712	150,53	136,47
		L	30.066.658.403	32.441.494.000	29.777.335.025	99,04	91,79
20.	UPK SANGATA	P	4.798.983.368	5.356.181.000	5.320.222.894	110,86	99,33
		B	1.740.878.938	1.479.998.000	1.815.444.428	104,30	122,67
		L	3.058.306.430	3.876.283.000	3.504.777.666	114,60	90,42
	JUMLAH CABANG/UPK :	P	357.595.025.249	362.253.832.000	425.747.127.487	119,06	117,53
		B	231.468.316.892	239.363.973.000	255.149.339.745	110,24	106,59
		L	126.136.708.357	122.889.859.000	170.597.787.742	133,33	138,82
21.	KANTOR PUSAT	P	10.604.179.380	33.545.800.000	9.923.775.844	91,85	29,58
		B	56.133.808.812	74.890.739.000	77.602.218.556	138,25	103,62
		L	(45.329.629.432)	(41.344.939.000)	(67.878.442.712)	149,30	163,69
	TOTAL :	P	368.399.204.629	395.799.632.000	435.670.903.331	118,26	110,07
		B	287.592.125.784	314.254.712.000	332.751.558.381	115,70	105,89
		L	80.807.078.925	81.544.920.000	102.919.345.030	127,36	126,21
PAJAK BADAN LABA BERSIH			22.013.298.119	24.550.739.773	28.913.222.266	131,34	117,77
			58.793.780.866	58.994.180.227	74.006.122.764	125,87	129,85